

LAPORAN TAHUNAN 2023

LAPORAN TAHUNAN 2023



Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B Bogor 16111, Telp. 0251-8333964, 8325177
Faks. 0251-8314496, email: psekp@pertanian.go.id, psepkemtan@gmail.com

 psekp.setjen.pertanian.go.id  psekp kemtan  @psekp_kementan  psekp_kemtan  PSEKP Kementan



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

LAPORAN TAHUNAN TA 2023



Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2024

LAPORAN TAHUNAN TA 2023

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Sudi Mardianto
Ketua : Erma Suryani
Sekretaris : Julia F. Sinuraya
Anggota : Eko Nugroho
Sumedi
Eni Widjajati
Irma Damayanti
Muhammad Suryadi
Frans B.M. Dabukke
Lira Mailena
Ahmad Makky Ar-Rozi
Ibnu Salman
Rizghina Ikhwan



Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2024

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai institusi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban. Berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas PSEKP sebagai unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal adalah melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh PSEKP selama tahun anggaran 2023 yang meliputi: struktur organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kegiatan, program, kerja sama dan layanan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, laporan ini juga memuat sinopsis hasil-hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan PSEKP pada tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari persiapan sampai penyelesaian laporan disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja PSEKP ke depan.



Pogor, Februari 2024

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.

NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Visi dan Misi.....	2
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Kajian Analisis Kebijakan.....	3
II. SUMBER DAYA MANUSIA	5
III. SARANA DAN PRASARANA.....	25
IV. PROGRAM	35
4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan.....	35
4.2. Perencanaan Kegiatan Kajian Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2023	35
V. SINOPSIS ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN TAHUN 2023.....	41
5.1. Kebijakan Perlindungan Petani dan Bantuan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	41
5.2. Pelaksana Kegiatan "Dinamika Capaian Kebijakan dan Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)	42
5.3. Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan	45
5.4. Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	46
VI. KERJA SAMA DAN LAYANAN HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	67
6.1. Kerja Sama.....	67
6.2. Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian...	74

6.2.1. Bentuk-Bentuk Diseminasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	74
6.2.2. Distribusi Publikasi.....	84
6.2.3. Perpustakaan	85
6.3. Penyelenggaraan 2 nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (ICANaRD).....	92
VII. EVALUASI DAN PELAPORAN.....	95
7.1. Kegiatan Evaluasi	95
7.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	96
7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2023	96
7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Kebijakan.....	97
7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Kajian Analisis Kebijakan.....	104
7.3.3. Evaluasi Layanan Perpustakaan	107
7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi	109
7.3.5. Sarana Kajian Analisis Kebijakan	111
VIII. PENUTUP	113
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.	Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan (2022-2023).....	5
2.	SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang pensiun pada tahun 2023.....	5
3.	Mutasi alih tugas di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2023	6
4.	Kenaikan pangkat PNS Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2023	7
5.	Kenaikan gaji berkala pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama tahun 2023	7
6.	Jumlah pengajuan cuti pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan jenis cuti, 2023.....	9
7.	Jadwal pelaksanaan MBKM-Riset Universitas Lampung di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023	10
8.	Pembagian tim dan pembimbing mahasiswa magang Unila, 2023	11
9.	Jadwal pembekalan materi MBKM-Riset Universitas Lampung, 2023.....	12
10.	Presentasi hasil kajian mahasiswa MBKM-Riset Universitas Lampung, 2023.....	13
11.	Hasil audit pengelolaan arsip tahun 2021 yang ditindaklanjuti tahun 2023.....	15
12.	Daftar penilaian DUPAK JFAK Kementan ke TPP, 2023	20
13.	Usulan kenaikan jenjang dan pangkat JFAK Kementan hasil sidang Juli 2023	21
14.	Daftar uji kompetensi JFAK tahun 2023	22
15.	Tabel pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mengikuti Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan, 2023.....	22
16.	Daftar kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	26
17.	Perkembangan pelaksanaan keuangan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	31
18.	Realisasi anggaran per jenis pengeluaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023	31
19.	Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	32
20.	Rekapitulasi PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2023..	33

21. Judul analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester, 2023	37
22. Judul policy brief, 2023	37
23. Judul proposal/KAK analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester-1 TA 2024	38
24. Kegiatan kerja sama kajian di PSEKP TA 2023.....	68
25. Statistik naskah jurnal PSEKP, 2023	75
26. Naskah masuk per bulan untuk jurnal PSEKP, 2023	76
27. Judul dan penulis artikel Jurnal Agro Ekonomi Vol. 40 No. 2, Oktober 2022.....	77
28. Judul dan penulis artikel Jurnal Agro Ekonomi Vol. 41 No. 1, Mei 2023	77
29. Judul dan penulis artikel Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 40 No. 2, Desember 2022	78
30. Judul dan penulis artikel Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 41 No. 1, Juli 2023.....	79
31. Judul dan penulis artikel Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 41 No. 2, Desember 2023	79
32. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 21 No. 1, Juni 2023.....	80
33. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 21 No. 2, Desember 2023	81
34. Menu website PSEKP, 2023	83
35. Rekap unggahan media sosial PSEKP Tahun 2023.....	84
36. Distribusi publikasi PSEKP 2023	85
37. Sebaran pengunjung Perpustakaan PSEKP berdasarkan profesi, 2023	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023.....	4
2.	Keragaan SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2023	6
3.	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan, 2023	16
4.	Hasil Survei Kualitas Pelayanan, 2023	17

5.	Hasil Survei Pelayanan Kearsipan, 2023.....	18
6.	Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE), Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) yang dikelola PSEKP, 2023.....	75
7.	Agro Socio-economic Newsletter yang dikelola PSEKP, 2023	82
8.	Website PSEKP, 2023	82
9.	Media sosial PSEKP, 2023.....	84
10.	Tampilan OPAC Perpustakaan Digital PSEKP melalui aplikasi Inlislite.....	88
11.	Tampilan Perpustakaan Digital PSEKP melalui serverlib/PSEKP/	88
12.	Pengunjung Perpustakaan PSEKP, 2023	89
13.	Grafik akses pengguna ke aplikasi Perpustakaan Digital PSEKP per bulan, 2023	90
14.	Grafik sebaran konten promosi Perpustakaan PSEKP melalui media sosial selama tahun 2023	91
15.	Kegiatan kelas literasi penyusunan Infografis, 2023	91
16.	Seminar proposal/KAK tim analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 21 Maret 2023.....	99
17.	Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kajian analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 19 Desember 2023	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1.	Pengadaan bahan pustaka TA 2023.....	117

I. PENDAHULUAN

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan institusi setingkat Eselon II. Pendirian institusi ini berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali institusi ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Dengan nama yang sama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT/010/8/2015. Namun demikian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 232/Kpts/OT.010/4/2016, pembinaan teknis penelitian, pembinaan teknis pejabat fungsional peneliti PSEKP tetap berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang meliputi: penilaian angka kredit, pendidikan, pelatihan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi. Semua anggaran yang digunakan oleh PSEKP untuk membiayai belanja baik pegawai, modal, operasional maupun nonoperasional dialokasikan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Organisasi PSEKP saat ini mengacu pada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa dari sejak berdirinya (1976–2024), PSEKP telah dipimpin oleh sembilan Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976–1983), Dr. Faisal Kasryno (1983–1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989–1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995–1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998–2002 dan 2005–2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002–2005), Dr. Handewi P. Saliem (2010–2016), Dr. Ir. Abdul Basit, M.S (2016–2019), dan Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si. (2019–sekarang).

Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi institusi yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan. Program

analisis sosial ekonomi dan kebijakan PSEKP dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan institusi PSEKP dalam merumuskan alternatif dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian pada masa depan. Hal ini secara rinci telah dituangkan dalam Renstra yang memayungi program tersebut serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk merealisasikannya. Program tersebut disusun berlandaskan visi dan misi yang futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan paradigma pembangunan pertanian masa datang.

Inovasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP harus berkualitas, cepat, dan akurat serta difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan dengan: (1) perdagangan multilateral perjanjian regional dan bilateral, (2) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi perdesaan secara berkala, (3) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (*supply constraint*), (4) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (agroindustri), (5) ketahanan pangan dan kemiskinan terkait SDG's, dan (6) penurunan kualitas infrastruktur dan sumber daya pertanian.

1.1. Visi dan Misi

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP adalah lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Visi

“Menjadi pusat analisis yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern”

Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP adalah:

Misi

1. Melakukan analisis guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, sintesis, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.

4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis dan kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 BAB XVII Pasal 287 dan Pasal 288, tugas dan fungsi PSEKP sebagai bagian dari institusi Kementerian Pertanian adalah:

Tugas:

Melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

Fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. Pelaksanaan analisis dan sosial ekonomi pertanian;
3. Pelaksanaan analisis kebijakan dan isu strategis di bidang pertanian;
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan pertanian;
5. Pemberian layanan teknis analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
6. Pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
8. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja, PSEKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setingkat Eselon IIA, dibantu oleh struktural setingkat Eselon IIIA, yaitu Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja, dengan struktur organisasi seperti disajikan pada Gambar 1.

1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Kajian Analisis Kebijakan

1. Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
2. Pejabat pembuat kebijakan lembaga negara di luar Kementerian Pertanian;
3. Praktisi agribisnis;
4. Politisi, ilmuwan, dan masyarakat peminat pembangunan pertanian; dan
5. Analis Kebijakan dan fungsional lainnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten dibidangnya sesuai dengan jabatan yang tersedia. Jumlah pegawai mengalami penurunan dari 70 orang tahun 2022 menjadi 69 orang di tahun 2023. Keragaan jumlah pegawai PSEKP sesuai dengan jabatan yang tersedia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut jabatan (2022-2023)

No.	Jabatan	2022	2023
1.	Struktural	2	2
2.	Analisis Kebijakan	28	27
3.	Perencana	1	2
4.	Analisis SDM Aparatur	1	1
5.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	3	3
6.	Arsiparis	1	2
7.	Pranata Komputer	3	4
8.	Pranata Humas	2	2
9.	Pustakawan	1	1
10.	Statistisi	2	2
11.	Pranata SDM Aparatur	1	1
12.	Pranata Pengelola Keuangan APBN	1	1
13.	Pelaksana	22	19
14.	Petugas Belajar	2	2
	Jumlah	70	69

Jumlah pegawai PSEKP yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2023 sebanyak empat orang. Rincian berdasarkan nama dan jabatan pegawai yang purna tugas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang pensiun pada tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1.	Ir. Sunarsih, M.Si.	Analisis Kebijakan	1 Februari 2023
2.	Tunggul Aji Nuroso	Verifikator Keuangan	1 Februari 2023
3.	Dedi Yogasuria	Pengemudi	1 Mei 2023
4.	Nurdin	Pengadministrasi Keuangan	1 Juli 2023

Sumber: SIM ASN Kementan, 2023

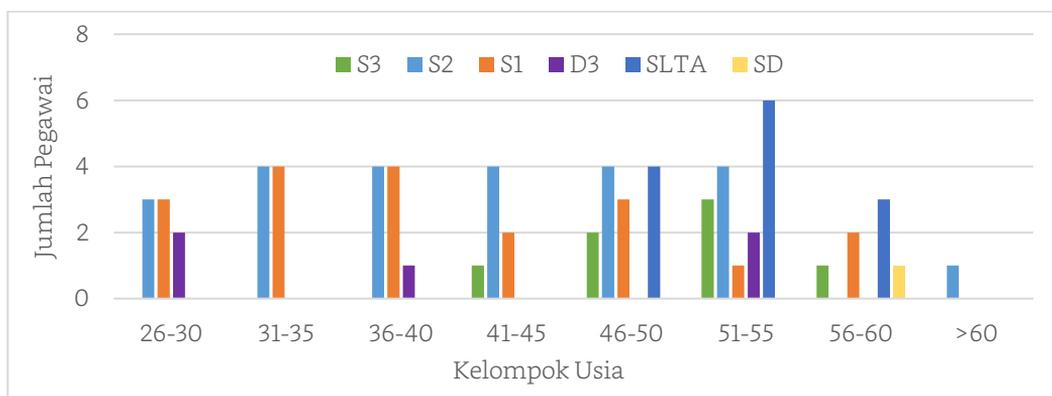
Jumlah SDM PSEKP mengalami penurunan dengan berakhirnya mutasi pegawai khususnya para peneliti ke BRIN pada bulan Maret dan Agustus 2022. Kemudian, pada tahun 2023 terdapat mutasi alih tugas, yaitu sebanyak tiga orang dengan rincian pada Tabel 3.

Tabel 3. Mutasi alih tugas di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2023

No.	Nama	TMT	Ket
1.	Dr. Fitria Yuliani, S.TP, M.SE.	1 Agustus 2023	Mutasi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2.	Maha Matahari Eddy Purnomo, S.E., M.H.	1 Desember 2023	Mutasi dari Biro Hukum
3.	Prima Luna, S.TP, M.Si., Ph.D.	1 Desember 2023	Mutasi dari PSEKP ke BSIP Pascapanen Pertanian

Sumber: SIM ASN Kementan, 2023

SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD hingga S3 serta bervariasi menurut kelompok usia. Keragaan SDM menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2023 disajikan pada Gambar 2.



Sumber: SIM ASN Kementan, 2023

Gambar 2. Keragaan SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menurut usia dan tingkat pendidikan akhir per bulan Desember 2023

Kegiatan Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga pada tahun 2023

A. Layanan Kepegawaian (Layanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dan Layanan Cuti Pegawai)

Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga PSEKP mempunyai tugas layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai. Uraian dan rincian kegiatan dari setiap layanan adalah sebagai berikut.

a) Layanan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat PNS dilakukan sebanyak dua kali per tahun, yaitu periode KP April dan periode KP Oktober 2023 sebanyak enam orang. Rincian nama SDM yang naik pangkat pada periode KP April dan KP Oktober disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kenaikan pangkat PNS Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2023

No.	Nama	Golongan Lama	Golongan Baru	TMT Pensiun
1.	Dr. Sumedi, S.P., M.Si. 197302031999031002	4a	4b	01 April 2023
2.	Sumantri Ginting 197606152002121002	3a	3b	01 April 2023
3.	Dr.Ir. Erma Suryani, M.Si. 196603041995032001	4b	4c	1 Oktober 2023
4.	Prima Luna, S.TP, M.Si., Ph.D. 198306082009122003	3c	3d	1 Oktober 2023
5.	Sheila Savitri, S.Sos. 197709202007012001	3c	3d	1 Oktober 2023
6.	Kartika Sari Septanti, S.T, M.E. 198809282019022002	3b	3c	1 Oktober 2023

b) Layanan Kenaikan Gaji

Kenaikan gaji berkala selama tahun 2023 diberikan kepada 38 orang pegawai PSEKP. Nama pegawai dan TMT kenaikan gaji berkala diuraikan pada Tabel 5.

c) Layanan Cuti Pegawai

Tahun 2023 telah diberikan izin cuti kepada pegawai dengan dengan alasan cuti tahunan, mendampingi anak sakit, melahirkan anak pertama, dan mendampingi istri melahirkan. Cuti tahunan yang dikeluarkan sebanyak 127 kali dalam tahun 2023. Adapun rincian jumlah pengajuan cuti dan alasannya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Kenaikan gaji berkala pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama tahun 2023

No.	Jabatan	NIP	TMT
1.	Sri Suharyono, S.Sos., M.Si.	198101202011011008	1 Januari 2023
2.	Amalia Ulpah, S.TP, M.Si.	198303062011012013	1 Januari 2023
3.	Agung Saras, S.Sos., MPA	198208052011011009	1 Januari 2023
4.	Rangga D. Yofa, S.P., M.Si.	198610172011011006	1 Januari 2023
5.	Rina Cantayani, S.H.	198408152011012015	1 Januari 2023

No.	Jabatan	NIP	TMT
6.	Fitna D. Wulandari, S.Hum.	198310182011012009	1 Januari 2023
7.	Ibnu Salman, A.Md.	198307012009101001	1 Januari 2023
8.	Sugiarti, S.P., M.M.	197912062003122001	1 Januari 2023
9.	Kartika Sari S, S.T., M.E.	198809282019022002	1 Februari 2023
10.	Resty P Perdana, S.P., M.P.	199005092019022001	1 Februari 2023
11.	Frans Betsi M D, S.P., M.Si.	197201042001121001	1 Februari 2023
12.	Ahmad M Ar-Rozi, S.Sos., M.Si.	198401122009121003	1 Februari 2023
13.	M. Wiryadi Effendi, S.P.	197901012009121005	1 Februari 2023
14.	Dr. Wahida, S.P., M.Si.	197011111995032001	1 Maret 2023
15.	Adi Setiyanto, S.P., M.Si.	196909131995031002	1 Maret 2023
16.	Dr. Sumedi, S.P., M.Si.	197302031999031002	1 Maret 2023
17.	Yadi Mulyadi	197107041992031004	1 Maret 2023
18.	Dede Supriyadi	197302191994031002	1 Maret 2023
19.	R. Hestu Wiseno	196603271994031001	1 Maret 2023
20.	Annisa Rika R, S.P.	198608012015032002	1 Maret 2023
21.	Dyah Rahmawati, S.E.	198811232015032002	1 Maret 2023
22.	Dr.Ir. Erma Suryani, M.Si.	196603041995032001	1 April 2023
23.	Ikarianto Haryadi, S.E.	196408211990031002	1 April 2023
24.	Yani Riani, S.Sos.	196904121999032001	1 April 2023
25.	Ir. Wartiningsih	196602261997032001	1 April 2023
26.	Nurdin	196506301994031002	1 April 2023
27.	Sapari	196805091998031001	1 April 2023
28.	Agus Suganda N	196708202000031001	1 April 2023
29.	Maman Surachman	196804282000031002	1 April 2023
30.	Hendra	197303152008121002	1 April 2023
31.	Miftahul Azis, S.E., M.Si.	198204162009121003	1 Mei 2023
32.	Joko Mulyono, S.TP, M.Si.	197511212008121001	1 Juni 2023
33.	Muhammad Suryadi, S.P., M.Si.	197305102001121002	1 Juni 2023
34.	Cut Rabiatal Adawiyah, S.P., M.Si.	197705162009122001	1 Juni 2023
35.	Julvinus Saragih	196709222003121001	1 Juli 2023
36.	Prima Luna, S.TP, M.Si., Ph.D.	198306082009122003	1 Juli 2023
37.	Sri Yuliati, S.E.	197607032009122004	1 Agustus 2023
38.	Hari Hermawan, S.P., M.Si.	197709172007101001	1 Oktober 2023

Tabel 6. Jumlah pengajuan cuti pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan jenis cuti, 2023

No.	Jenis Cuti	Jumlah Cuti yang Disetujui	Keterangan
1.	Cuti tahunan	127	Jan-Des 2023
2.	Cuti Besar	1	a.n Sheila S, karena mendampingi anaknya sakit selama tiga bulan
3.	Cuti Melahirkan	1	a.n Annisa FA melahirkan anak pertama
4.	Cuti alasan penting istri melahirkan	1	a.n M Wiryadi mendampingi istri melahirkan

B. Layanan Ketatausahaan

Layanan ketatausahaan yang menjadi bagian tugas dari Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga selama tahun 2023 terdiri dari layanan magang mahasiswa, layanan kearsipan, layanan jabatan fungsional, dan layanan rumah tangga. Uraian dan rincian kegiatan dari masing-masing layanan adalah sebagai berikut.

a) Layanan Magang Mahasiswa

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Bab XVII Pasal 286. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (Pasal 287). Fungsi PSEKP dalam melaksanakan tugas seperti tercantum dalam Pasal 288 yang terkait dengan pelayanan magang adalah pelaksanaan kerja sama dan penyebarluasan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Kerja sama ini disesuaikan dengan model magang terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Oleh karena itu, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 5204/UN26.14/KS/2023 dan Nomor 1267.1/PKS/HM.240/A.11/ 2023 bahwa Unila sebagai perguruan tinggi negeri yang bertanggung jawab dalam implementasi kurikulum MBKM dan PSEKP sebagai mitra perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Kerja sama kegiatan magang dapat dibedakan menjadi dua tujuan yaitu dari sisi hubungan kerja sama dan manfaat yang diperoleh dari mahasiswa magang. Tujuan dari kerja sama ini sebagai bentuk kerja sama antarinstansi sehingga saling dapat bertukar informasi dan pengalaman dengan instansi lain. Tujuan dilaksanakannya MBKM ini bagi mahasiswa yaitu: (1) memberikan pengalaman

belajar mahasiswa di dunia kerja dan (2) mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih siap dalam memasuki dunia kerja dan pengembangan kariernya.

Outcome yang ingin dicapai baik bagi universitas maupun mahasiswa dari kegiatan MBKM-Riset ini yaitu: (1) meningkatkan kualitas lulusan Prodi Agribisnis; (2) meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik *hard skills* maupun *soft skills* melalui pembelajaran *experiential learning*; dan (3) meningkatkan jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus setara 20 SKS.

Pelaksanaan kegiatan MBKM-Riset dilaksanakan sejak tanggal 1 September sampai 29 November 2023. Kegiatan dilaksanakan secara *offline* di PSEKP dan mengikuti jam kerja PSEKP yaitu Senin-Kamis pukul 07.30-16.00 dan Jumat pukul 07.30-16.30. Jadwal kegiatan MBKM-Riset secara umum disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jadwal pelaksanaan MBKM-Riset Universitas Lampung di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
September 2023	Materi-materi pembekalan	Panitia
Oktober 2023	Mengumpulkan data dan penyusunan laporan	Ketua Tim
November 2023	Penyusunan laporan	Ketua Tim
22 November 2023	Seminar hasil kajian mahasiswa magang	Panitia

Peserta MBKM-Riset terdiri dari enam orang mahasiswa semester lima Fakultas Pertanian Unversitas Lampung yaitu:

1. Lusya Dhea Mutiara
2. Frisky Fahira
3. Nisrina Salsabila
4. Annisa Lutfiya Effendi
5. Agnes Alloysia Sinaga
6. Arum Sekar Kinasih

Silabus untuk magang ditentukan dari PSEKP sebagai penyelenggara magang namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dari Universitas Lampung. Kegiatan ini akan dikonversi menjadi beberapa mata kuliah sejumlah 20 SKS, mata kuliah tersebut adalah (1) metode penelitian sosial ekonomi; (2) praktik umum; (3) analisis kuantitatif agribisnis; (4) riset operasional; (5) kebijakan pertanian; (6) strategi dan kebijakan agribisnis; dan (7) perencanaan dan pengembangan wilayah. Pelaksanaan magang ini diawali dengan pembekalan materi dari PSEKP sebagai dasar dalam melakukan kajian. Beberapa materi diadopsi dari kegiatan magang tahun sebelumnya dan ada beberapa yang merupakan materi baru. Materi yang diberikan oleh narasumber dari PSEKP yaitu:

1. Arah pembangunan pertanian 2020-2024.
2. Pengenalan tuisi PSEKP.
3. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan analisis kajian sosek dan kebijakan pertanian.
4. Layanan hasil analisis dan kebijakan PSEKP.
5. Pengantar kebijakan pertanian.
6. Teknik dan kaidah penyusunan proposal/KAK.
7. Metode-metode penelitian.

Materi tersebut diberikan pada bulan September 2023 sesuai jadwal terlampir. Dengan materi tersebut diharapkan mahasiswa siap untuk berkontribusi dalam kegiatan magang selama tiga bulan, karena keenam mahasiswa tersebut dibagi menjadi tiga kelompok untuk ikut terlibat langsung dalam tim analisis kebijakan PSEKP semester dua tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan MBKM-Riset tahun 2023 dengan menempatkan masing-masing dua mahasiswa di ketiga judul kajian analisis kebijakan. Metode magang ini disesuaikan dengan kegiatan PSEKP yang sedang berlangsung agar mahasiswa dapat berkontribusi langsung ke tim analisis kebijakan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyusun rekomendasi. Di samping itu, mahasiswa juga secara spesifik memiliki hasil kajian sebagai output magang karena waktu penyelesaian magang lebih dahulu dibandingkan dengan waktu penyelesaian kajian PSEKP. Judul kajian dan pembimbing lapangan masing-masing mahasiswa disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Pembagian tim dan pembimbing mahasiswa magang Unila, 2023

No.	Judul Kajian Anjak	Pembimbing	Mahasiswa	Judul Kajian Spesifik Mahasiswa
1.	Analisis kelayakan usaha tani berbagai komoditas	Muhammad Suryadi, S.P., M.Si.	1. Lusia Dhea Mutiara 2. Frisky Fahira	Analisis perbandingan kelayakan usaha tani pada agroekosistem sawah irigasi, rawa pasang surut, rawa lebak, dan sawah tadah hujan.
2.	Strategi peningkatan efektivitas kebijakan subsidi pupuk: transformasi kebijakan subsidi harga ke subsidi langsung	Rangga Ditya Yofa, S.P., M.Si.	1. Agnes Alloysia Sinaga 2. Arum Sekar Kinasih	Strategi peningkatan efektivitas kebijakan subsidi pupuk: transformasi kebijakan subsidi harga ke subsidi langsung
3.	Dinamika indikator pencapaian kemandirian pangan Indonesia	Dr. Wahida, S.P., M.Si.	1. Nisrina Salsabila 2. Annisa Lutfiya Effendi	Komparasi Definisi Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN, Uni Eropa, dan Afrika

Masing-masing mahasiswa dibimbing langsung oleh ketua tim dan memiliki kesempatan untuk ikut melakukan pengumpulan data baik ke Jakarta maupun ke daerah. Tim analisis kelayakan usaha tani dan dinamika indikator kemandirian pangan berkesempatan mengikuti pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dan sekitarnya, sedangkan tim subsidi pupuk berkesempatan ke Kabupaten Subang dan Karawang. Pelaksanaan MBKM-Riset pada bulan September 2023 merupakan kombinasi tugas individu dari ketua tim dan mengikuti materi pembekalan disajikan pada Tabel 9.

Selain materi kuliah di kampus, materi pembekalan berguna menambah pengetahuan untuk mendukung penyelesaian masa studi mahasiswa. Kegiatan bulan Oktober dan November 2023 fokus ke substansi yaitu penyusunan laporan akhir magang. Laporan tersebut dipresentasikan pada tanggal 22 November 2023 (Tabel 10).

Dari hasil paparan masing-masing tim mendapatkan masukan dari para pembimbing tim lain dan dari para Dosen Unila. Laporan akhir yang telah mengakomodir masukan-masukan dikumpulkan sebelum tanggal 29 November 2023. Mahasiswa telah menyelesaikan keseluruhan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Kegiatan MBKM-Riset tahun 2023 telah terlaksana dengan baik. Kegiatan dengan metode baru dari PSEKP memberikan informasi yang lebih berkualitas terhadap mahasiswa magang. Mahasiswa magang memperoleh pengalaman langsung terlibat dalam kegiatan tim kajian analisis kebijakan. Mengikuti keseluruhan kegiatan di kajian dan analisis sehingga dapat merasakan secara nyata bekerja di bidang kajian sosial ekonomi pertanian.

Tabel 9. Jadwal pembekalan materi MBKM-Riset Universitas Lampung , 2023

No.	Hari, Tanggal	Pukul	Materi	Narasumber
1.	Rabu, 6 September 2023	11.00-15.00	1. Arah pembangunan pertanian 2020-2024. 2. Pengenalan Tusi PSEKP	1. Lira Mailena, S.P., M.Si., Ph.D. 2. Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.
2.	Senin, 11 September 2023	10.00-12.00	1. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan Analisis dan kajian sosek dan kebijakan pertanian 2. Layanan hasil analisis dan kebijakan PSEKP	1. Dr. Julia Forcina Sinuraya, S.P., M.Si. 2. Lira Mailena, S.P., M.Si., Ph.D.
3.	Selasa, 12 September 2023	08.00-10.00	1. Pengantar kebijakan pertanian 2. Teknik dan kaidah penyusunan proposal/TOR	1. Dr. Julia Forcina Sinuraya, S.P., M.Si. 2. Lira Mailena, S.P., M.Si., Ph.D.
4.	Selasa, 19 September 2023	09.00-12.00	Metode-metode penelitian (1)	Rangga Ditya Yofa, S.P., M.Si.
5.	Rabu, 20 September 2023	11.00-15.00	Metode-metode penelitian (1)	Aldho Riski Irawan, S.Si.

Tabel 10. Presentasi hasil kajian mahasiswa MBKM-Riset Universitas Lampung, 2023

No.	Pukul	Acara	Narasumber
1.	09.00-09.10	Pembukaan	Kepala PSEKP
2.	09.10-09.30	Presentasi hasil riset Tim-1: Analisis Perbandingan Kelayakan Usaha Tani pada Agroekosistem Sawah Irigasi, Rawa Pasang Surut, Rawa Lebak, dan Sawah Tadah Hujan	Tim-1
3.	09.30-09.50	Presentasi hasil riset Tim-2: Komparasi Definisi Ketahanan Pangan di Kawasan ASEAN, Uni Eropa, dan Afrika	Tim-2
4.	09.50-10.10	Presentasi hasil riset Tim-3: Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk: Transformasi Kebijakan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung	Tim-3
5.	10.10-10.40	Komentar pembimbing dari PSEKP	Moderator
6.	10.40-11.00	Komentar pembimbing dari Unila	Moderator
7.	11.00-11.30	Kesan dan pesan	1. Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung 2. Pembimbing PSEKP 3. Perwakilan Dosen Agribisnis Unila

b) Layanan Pengelolaan Kearsipan PSEKP

Layanan Tata Usaha Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian antara lain pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kegiatan surat menyurat ini dipandang sebagai suatu kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan organisasi pemerintahan. Pada tahun anggaran 2023, pengelolaan surat menyurat PSEKP dibagi atau dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

1. Surat Masuk sebanyak 751 exp, dikelola menggunakan Srikandi dan dilakukan filling secara digital.
2. Surat Keluar sebanyak 2.951 exp, yang terdiri dari Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Surat Balasan dari surat masuk. Pengelolaan surat menggunakan aplikasi google sheet untuk mempermudah layanan;
3. Pengelolaan Arsip, dengan menyiapkan daftar dan dokumen Arsip Usul Musnah sebanyak 6.239 berkas (berkas keuangan periode tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 dan 2013).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa surat memegang peranan penting dalam instansi pemerintahan, sehingga pengelolaan surat masuk dan surat keluar perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien walaupun secara *de facto/real* masih banyak kekurangan, dimana jumlah nomor surat keluar setelah diberkaskan, pihak

pencipta arsip tidak menyerahkan arsipnya sehingga pengolah dokumen tidak menemukan arsip atau dokumennya sesuai nomor surat, begitu pula dengan masih adanya dokumen menggunakan nomor mundur.

Dalam rangka efisiensi penggunaan ruang arsip (*record center*) PSEKP sesuai UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan bahwa pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan. Proses pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna telah habis retensinya dan telah melalui uji petik oleh ANRI. PSEKP telah mengajukan arsip usul musnah sebanyak 6.239 arsip diajukan ke Biro Umum dan menunggu persetujuan dari ANRI untuk di musnahkan.

- ***Pengawasan Internal Kearsipan sebagai tindak lanjut dari Hasil Audit Kearsipan oleh Unit Kearsipan Biro Umum dan Pengadaan***

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan KepMentan Nomor 367/KPTS/TU.110/M/6/2020 tentang Unit Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian, berkedudukan sebagai Unit Kearsipan III. Merujuk PKPKT KepMentan tahun 2022, telah ditentukan Unit Pengolah di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagai obyek pengawasan.

Audit Kearsipan Internal pada Unit Pengolah di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selaku obyek pengawasan telah dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Maret 2022. Audit dilakukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip tahun 2021. Hasil audit tersebut secara umum ditindaklanjuti pada tahun 2023. Hasil audit pengelolaan arsip tahun 2021 yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 11.

Dari 10 poin temuan Audit Internal Kearsipan Internal PSEKP telah ditindaklanjuti 8 poin hasil temuan, kurang lebih **80%** dari hasil temuan audit kearsipan. Output dari laporan kinerja dapat dicapai pada bulan Desember 2023 dan untuk kegiatan kearsipan di tahun 2024 akan terus melakukan kegiatan di Tim Kerja Kepegawaian dan Rumah Tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

- ***Evaluasi Pengelolaan Kearsipan PSEKP***

Evaluasi layanan pengelolaan kearsipan di PSEKP dalam meningkatkan layanan Kearsipan PSEKP dilakukan melalui survei internal menggunakan *gforms* yang disebarluaskan ke seluruh pegawai PSEKP.

Metode survei evaluasi menggunakan skala likert atau *summated rating scale*. Metode ini mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Terdapat empat skala pilihan untuk kuesioner skala likert sehingga pilihan netral tidak tersedia. Skala likert yang digunakan adalah angka, yaitu: (1) sangat kurang memuaskan; (2) kurang memuaskan; (3) memuaskan; dan (4) sangat memuaskan.

Tabel 11. Hasil audit pengelolaan arsip tahun 2021 yang ditindaklanjuti tahun 2023

No.	Hasil Temuan/Masalah 2022	Tindak Lanjut/Progress 2023
1.	Beberapa nota dinas dan surat tugas penomoran, tembusan, format penulisan pada pelimpahan wewenang penandatanganan masih belum sesuai ketentuan Permentan No.06/2020.	Telah dilakukan perbaikan nota dinas dan surat tugas sesuai ketentuan Permentan No.06/2020 pada bulan September 2023.
2.	- Belum memiliki Out Guide/Out indicator . - Penyusunan arsip aktif belum berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.	- Telah dilakukan perbaikan dengan membuat dan menyiapkan out guide/out indicator. - Arsip aktif di susun sudah berdasarkan sistem klasifikasi kearsipan pada bulan September 2023
3.	Fisik arsip yang disimpan belum semuanya terdaftar di dalam daftar arsip aktif yang sesuai ketentuan tetapi hanya sekitar 30% dari arsip aktif yang tercipta dan arsip yang disimpan sudah melewati retensi aktif.	Telah dilakukan perbaikan daftar arsip aktif, semua arsip aktif yang di simpan sudah terdaftar di dalam daftar arsip aktif pada bulan Oktober 2023.
4.	Daftar arsip vital , belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lampiran II Permentan 30/2019) karena daftar arsip vital yang digunakan hanya bersumber dari SIMAK BMN .	Telah dilakukan pemilahan Arsip vital,PSEKP sampai saat ini yang masuk kategori Arsp Vital adalah data aset bergerak dan tak bergerak pada bulan Desember 2023
5.	Aspek pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, dalam hal ini obyek pengawasan tidak memiliki, menghasilkan dan menyimpan arsip terjaga .	Karena PSEKP <i>outputnya</i> adalah rekomendasi, dengan di dukung perubahan regulasi di mana peneliti berpindah ke BRIN sehingga rekomendasi yang di ciptakan PSEKP bersifat temporer.
6.	Alih media terhadap arsip aktif belum dilengkapi dengan pembuatan daftar arsip alih media dan berita acara alih media .	Telah dibuatkan berita acara alih media dan daftar arsip alih media di bulan November 2023
7.	Penyajian arsip aktif bagi kepentingan eksternal belum berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis .	Penyajian arsip aktif telah berdasarkan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip dinamis di bulan Oktober 2023
8.	Pada aspek penyusutan arsip, Unit Pengolah belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan III PSEKP pada tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan secara rutin.	Walaupun belum semua unit pengolah memindahkan arsip inaktifnya tetapi bagian Sekretariat Kapus dan Kepegawaian dan Rumah Tangga sudah melaksanakan pemindahan/menyerahkan Arsip ke record center pada bulan Desember 2023
9.	Terkait sumber daya manusia kearsipan , Kedudukan hukum Arsiparis dan pengelola arsip, seluruhnya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, golongan III.	Pada bulan September 2023 ada penambahan 1 SDM kearsipan dari P3K Ahli Pertama – Arsiparis bernama Astuti Niwati, NIP : 197901282023212004

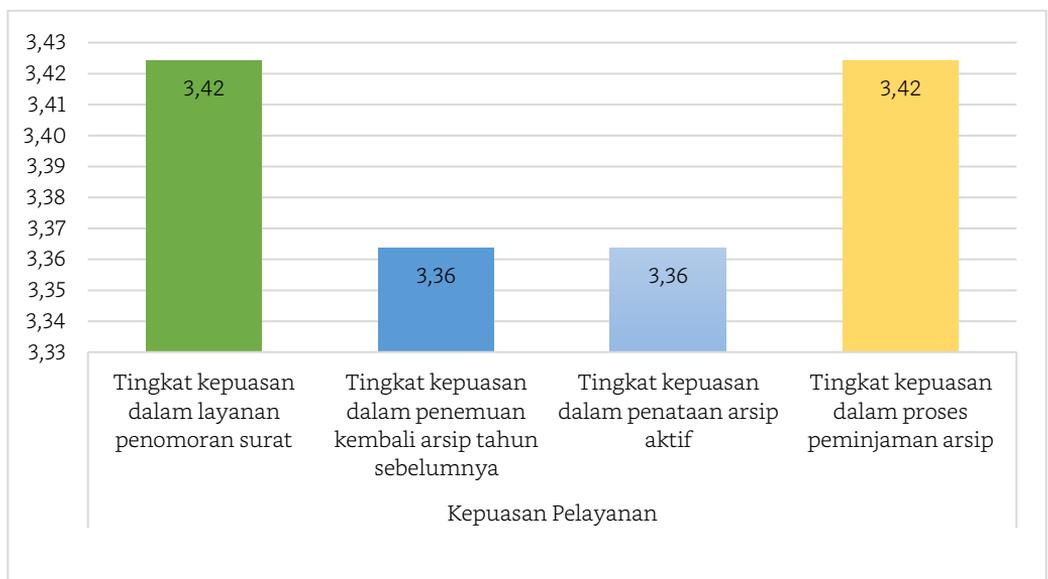
No.	Hasil Temuan/Masalah 2022	Tindak Lanjut/Progress 2023
10.	Belum tersedianya <i>out indicator</i> , indeks dan tunjuk silang yang sesuai ketentuan dalam pemberkasan arsip aktif.	Telah disiapkan <i>out indicator</i> dan telah dimanfaatkan untuk peminjaman berkas pada akhir Tahun 2023

Kerlinger dan Lee (2000), menyarankan sebanyak 30 sampel minimal dalam kajian kuantitatif. Oleh karena itu, responden dalam survei ini sebanyak 33 orang yang diperoleh secara *random sampling* dari beberapa kategori responden, yaitu: (1) Analis SDM Aparatur; (2) Analis Kebijakan; (3) Perencana; (4) Pustakawan; (5) Pranata Komputer; serta (6) Staff Keuangan dan BMN. Survei dilaksanakan pada bulan Desember 2023 karena penilaian layanan selama satu tahun.

Daftar pertanyaan kuesioner Evaluasi Kinerja Pelayanan Kearsipan Kuesioner disusun di *google form* dan disebarluaskan melalui link <https://forms.gle/fDNbUqY5Pqed5vnW8>. Hasil survei dijelaskan dalam dua kategori yaitu per subbagian dan secara keseluruhan. Tujuan pembahasan per subbagian supaya terlihat bagian layanan mana yang perlu ditingkatkan. Hasil survei kinerja sebagai berikut:

1. Kepuasan Pelayanan

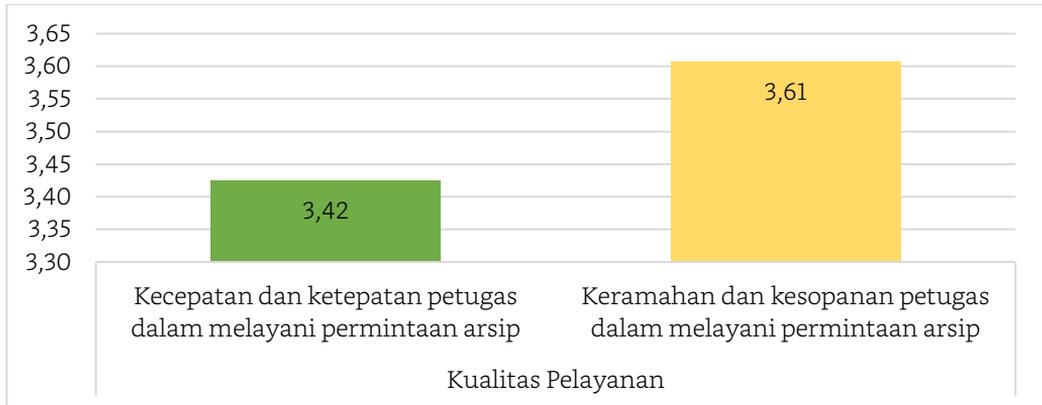
Secara keseluruhan kepuasan pelayanan masih di atas angka 3,36 skala likert dari 4 skala likert (Gambar 3) yang menandakan bahwa kepuasan pelayanan tergolong memuaskan. Namun memang perlu perbaikan dalam hal penemuan arsip kembali tahun sebelumnya dan penataan arsip aktif. Kendala yang dihadapi dalam sarana dan prasarana yang kurang memadai.



Gambar 3. Hasil Survei Kepuasan Pelayanan, 2023

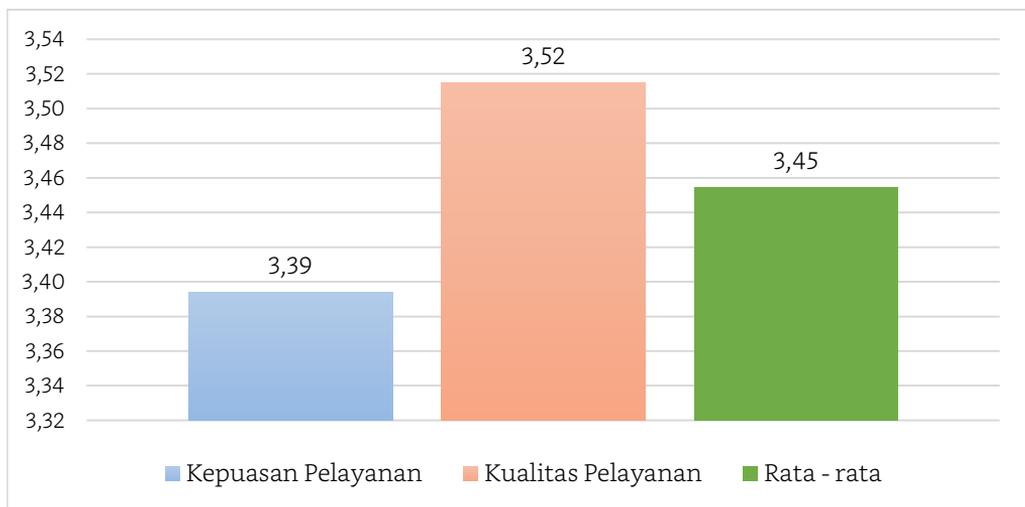
2. Kualitas Pelayanan

Evaluasi kinerja dari kualitas pelayanan berada di skala 3,42 skala likert dari 4 skala likert, masih dalam kategori memuaskan (Gambar 4). Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah terkait kecepatan dan ketepatan petugas dalam melayani permintaan arsip. Hal ini disebabkan proses penyimpanan arsip yang tidak memadai, serta pengetahuan petugas penata dokumen belum memadai.



Gambar 4. Hasil Survei Kualitas Pelayanan, 2023

Terdapat dua kategori evaluasi kinerja pelayanan kearsipan, dan dari kedua kategori penilaian tersebut diambil rata-rata untuk penilaian secara keseluruhan yang menunjukkan angka 3,45 skala likert dari 4 (Gambar 5). Angka tersebut menunjukkan bahwa pelayanan secara keseluruhan masuk dalam kategori memuaskan, namun masih perlu beberapa perbaikan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa masukan konstruktif dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil Survei Pelayanan Kearsipan, 2023

- a. Perlu menggunakan aplikasi persuratan yang dapat diakses pengguna kearsipan (internal kantor), peningkatan jaringan *online* untuk melihat arsip, membuat database arsip berbasis digital, arsip dapat disimpan sehingga aksesnya lebih mudah.
- b. Pengelola kearsipan sesuai dengan jabatan fungsionalnya dan kapasitasnya perlu ditingkatkan salah satunya dengan pelatihan.
- c. Diperlukannya petugas kearsipan pada setiap bagian.
- d. Penempatan penataan ruangan arsip yang memadai.
- e. Sosialisasi kearsipan oleh arsiparis, contohnya pencatatan penomoran surat-surat dinas agar sesuai dengan Tata Naskah Dinas Kementan terbaru.

Secara keseluruhan pelayanan kearsipan masuk dalam kategori memuaskan. Namun, masih perlu beberapa perbaikan layanan terutama dalam penataan arsip aktif, sehingga kecepatan dan ketepatan petugas dalam pelayanan untuk penemuan kembali arsip tahun sebelumnya dapat cepat ditemukan. Hasil survei terbuka, layanan yang perlu di tingkatkan yaitu sarana dan prasarana serta pengetahuan SDM, yang perlu dikembangkan adalah keikutsertaan dalam pelatihan atau seminar yang terkait dengan pengelolaan arsip khususnya arsip dinamis. PSEKP telah mengarah ke pengelolaan arsip secara digital mulai tahun 2024, sebelumnya menggunakan google spreadsheet untuk pencatatan data surat masuk dan keluar, saat ini disempurnakan dengan *melinkkan* dengan aplikasi Google Drive sebagai tempat penyimpanan file arsip surat masuk dan keluar digital berformat PDF. Semoga dengan sistem pengarsipan digital ini dapat memudahkan dan mempercepat temu kembali arsip sehingga kecepatan dan ketepatan petugas dapat ditingkatkan. Sosialisasi tentang kearsipan dan layanan kearsipan sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi kearsipan di PSEKP, agar pengetahuan dasar arsip dapat dipahami semua pencipta arsip. Contohnya pencatatan penomoran surat-surat dinas agar sesuai dengan Tata Naskah Dinas Kementan terbaru.

Kegiatan rumah tangga yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- b. Pemeliharaan Gardu Listrik dan Penggantian Kapasitor bank
- c. Penggantian Penangkal Petir
- d. Perawatan AC, Genset dan Pompa serta instalasi air bersih
- e. Peningkatan Layanan Jaringan internet
- f. Peminjaman ruang rapat untuk memfasilitasi rapat-rapat yang diselenggarakan PSEKP maupun unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

c) Layanan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Kementerian Pertanian

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 230.03/Kpts/OT.050/A.11/02/2023 tentang Penetapan Tim

Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Tim Penilai (STP) memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
2. menyiapkan pelaksanaan sidang penilaian Tim Penilai JFAK;
3. menyusun berita acara sidang penilaian Tim Penilai JFAK;
4. menyampaikan hasil penilaian evaluasi kinerja JFAK sebagai salah satu bahan pertimbangan penetapan pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan/pangkat;
5. menyusun laporan pelaksanaan evaluasi kinerja JFAK;
6. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Tim Penilai JFAK.

Berdasarkan fungsi di atas maka pada tahun 2023 Sekretariat JFAK Kementan melakukan beberapa kegiatan meliputi verifikasi DUPAK dan assesmen penilaian JFAK yang dikirim ke TPP, melakukan penilaian DUPAK di TPI baik internal maupun eksternal instansi, memfasilitasi uji kompetensi baik perpindahan jabatan maupun kenaikan jenjang, dan mengusulkan pelatihan dasar bagi JFAK PSEKP. Secara rinci kegiatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Assesmen DUPAK ke TPP

Menurut Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 58 Ayat 1 berbunyi bahwa hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing. Oleh karena itu, tahun 2023 merupakan penilaian terakhir pengusulan angka kredit periode DUPAK sampai dengan bulan Desember 2022. Penilaian di Tim Penilai Pusat (TPP) LAN untuk DUPAK bagi JFAK Madya IVb ke atas dan pada tahun 2023 hanya satu kali penilaian. Daftar usulan DUPAK JFAK Kementan ke TPP disajikan pada Tabel 12.

Dengan adanya peraturan terbaru maka tidak terlihat dengan jelas perolehan penilaian angka kredit karena berbeda dari format sebelumnya. Penilaian DUPAK sebelum adanya peraturan baru, masih konvensional sedangkan penilaian ini menggunakan PAK terintegrasi sehingga tidak dapat dianalisis perbandingan assesmen dengan perolehan penilaian. Dari hasil perolehan penilaian angka kredit ke TPP ada dua JFAK yang perolehan angka kreditnya telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dari IV-b ke IV-c yaitu Dr. Ir. Evi Savitri, M.Si. dan Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si. Syarat kenaikan pangkat tersebut yaitu mencapai angka kredit 300.

2. Verifikasi dan Penilaian DUPAK di TPI

Pada tahun 2023 STP melakukan verifikasi dan penilaian DUPAK baik internal maupun eksternal Kementerian Pertanian. DUPAK JFAK Kementan telah selesai diverifikasi dan dinilai sebanyak 47 usulan yang disidangkan pada 10 Juli

2023 dan 6 usulan yang disidangkan pada bulan September 2023. Selain itu, juga melakukan penilaian terhadap 14 usulan DUPAK dari Lembaga Ketahanan Nasional. Rincian sidang yang dilaksanakan pada bulan Juli terdiri dari AK Madya 8 orang, AK Muda 34 orang, AK Pertama 5 orang sehingga totalnya 47 orang. Dari hasil sidang maka diperoleh nama-nama yang telah memenuhi syarat-syarat kenaikan jenjang maupun pangkat sesuai pada Tabel 13.

Selain internal, STP juga melakukan penilaian eksternal yaitu merupakan salah satu fungsi pelayanan terhadap K/L lain yaitu dengan menilai 14 usulan dari Lemhanas. Pada sidang tanggal 14 September 2023 selain menyidangkan DUPAK JFAK dari Lemhanas juga dari Kementan yaitu 6 usulan yang terdiri dari 1 usulan susulan dan 5 dari jalur pengangkatan pertama. Usulan DUPAK Lemhanas terdiri dari 7 orang AK Muda dan 7 orang AK Pertama. Sedangkan usulan DUPAK JFAK Kementan terdiri dari 1 orang AK Muda dan 5 orang AK Pertama dari jalur pengangkatan pertama. Dari hasil sidang tersebut diperoleh hasil satu orang yang

Tabel 12. Daftar penilaian DUPAK JFAK Kementan ke TPP, 2023

No.	Nama/NIP	Eselon 1	Jabatan/ Pangkat	usulan AK	Angka kredit integrasi
1.	Dr. Sumarjo G I, MS, DAA/ 196010241987031001	BSIP	AK Utama/IVe	35,00	225,00
2.	Dr. Ir. Muhrizal, M.Sc./ 196003291984031001	BSIP	AK Utama/IVd	33,00	162,00
3.	Ir. Ewin Suib, M.M/ 196609011997031001	Setjen	AK Madya/ IVb	88,50	201,00
4.	Ir. Maria Sumartini, M.P./ 196803031992032001	Ditjen PKH	AK Madya/ IVb	102,95	291,35
5.	Ir. Rindayuni Triavini, M.Sc./ 196406211989032001	Barantan	AK Madya/ IVb	169,33	284,21
6.	Ir. Erlita Adriani, M.B.A./ 196501081989032001	BSIP	AK Madya/ IVb	29,85	251,93
7.	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si./ 196603041995032001	Setjen	AK Madya/ IVb	92,90	309,00
8.	drh. Eka H, M.Si./ 197101122001121001	BPPSDMP	AK Madya/ IVb	115,54	241,27
9.	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si./ 196801161994032002	BSIP	AK Madya/ IVb	22,98	308,97
10.	Dr. Ir. Ladiyani R W, M.Sc./ 196903031994032001	BSIP	AK Madya/ IVb	59,75	213,44
11.	Dr. Agus A, S.Si., M.Si./ 197404021999031001	BSIP	AK Madya/ IVb	79,00	173,44
12.	Dr. Akhmad M/ 197304051999031001	BSIP	AK Madya/ IVc	17,50	398,19

Tabel 13. Usulan kenaikan jenjang dan pangkat JFAK Kementan hasil sidang Juli 2023

No.	Nama	Jabatan saat ini	Kenaikan Jenjang
1.	Adi Setiyanto, S.P., M.Si.	AK Muda IVa	AK Madya IVa
2.	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.	AK Muda IVa	AK Madya IVa
3.	Ari Abdul Rouf, S.Pt., M.Si.	AK Muda IIIId	AK Madya IVa
4.	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.	AK Muda IIIId	AK Madya IVa
5.	Esty Asriyana Suryana, S.P., M.Si.	AK Pertama IIIc	AK Muda IIIc
6.	Rangga Ditya Yofa, S.P., M.Si.	AK Pertama IIId	AK Muda IIIc
7.	Miftahul Azis, S.E., M.Si.	AK Pertama IIIc	AK Muda IIIc
8.	Resty Puspa Perdana. S.P., M.P.	AK Pertama IIId	AK Muda IIIc
9.	Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.	AK Madya IIIc	AK Madya IIIId

memenuhi syarat untuk uji kompetensi dari AK Muda ke AK Madya yaitu Nuning Argo Subekti (BSIP).

Secara keseluruhan pada tahun 2023, STP telah melakukan penilaian DUPAK sebanyak 67 usulan (47 sidang ke-1 dan 20 sidang ke-2) yang sudah dituangkan dalam PAK integrasi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023. Selain melakukan penilaian STP juga telah melakukan konversi PAK konvensional ke PAK integrasi seluruh PAK JFAK Kementan sebagai angka dasar yang akan ditambahkan dengan angka kredit dari konversi predikat nilai kerja SKP mulai tahun 2023.

3. *Fasilitasi Uji Kompetensi*

STP juga mendapatkan tugas tambahan pimpinan untuk membantu memfasilitasi uji kompetensi baik kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan. Peserta ujkom yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 disajikan pada Tabel 14.

Pada tahun 2023, STP telah memfasilitasi sebanyak 16 pelaksanaan uji kompetensi yang terdiri dari 6 perpindahan jabatan dan 10 kenaikan jenjang. Ada 8 orang JFAK yang sudah dilantik, dan lainnya belum karena ada beberapa sebab yaitu masih menunggu tanda tangan Sekjen definitif, belum menyelesaikan masa studinya, dan ada yang baru saja selesai ujkom sehingga masih proses untuk menunggu pelantikan.

4. *Pengusulan Pelatihan*

Pada tahun 2023, seluruh JFAK PSEKP yang belum mengikuti pelatihan Khusus Analisis Kebijakan sejumlah 20 orang telah diusulkan ke Pusbangkom TSK LAN namun hanya 6 orang yang diterima menjadi peserta karena adanya kuota dari LAN untuk masing-masing K/L. Selain pelatihan KAK, juga diusulkan 1 orang untuk mengikuti pelatihan Calon Analisis Kebijakan (CAK). Adapun daftar nama pegawai yang telah mengikuti pelatihan disajikan pada Tabel 15.

Tabel 14. Daftar uji kompetensi JFAK tahun 2023

No.	Nama	Waktu	Keterangan
1.	Maha Matahari E Purnomo, S.E., M.H. (dilantik)	1-2 Maret 2023	Perpindahan jabatan
2.	Risman Mangidi, S.Sos., M.M. (dilantik)	1-2 Maret 2023	Perpindahan jabatan
3.	Kartika Sari Septanti, S.T., M.E. (dilantik)	1-2 Maret 2023	Kenaikan jenjang
4.	Dyah Margani Utami, S.TP., M.Si.	9-10 Mei 2023	Perpindahan jabatan
5.	Dr. M. Apuk Ismane, S.Pt., M.Si. (dilantik)	24-25 Juli 2023	Perpindahan jabatan
6.	Adi Setiyanto, S.P., M.Si.	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
7.	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
8.	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
9.	Rangga Ditya Yofa, S.P., M.Si. (dilantik)	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
10.	Miftahul Azis, S.E., M.Si. (dilantik)	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
11.	Esty Asriyana Suryana, S.P., M.Si. (dilantik)	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
12.	Resty Puspa Perdana, S.P., M.Si. (dilantik)	29 dan 31 Agustus 2023	Kenaikan jenjang
13.	Muhammad Una Atsawan, S.Pd., M.Ec.Dev	25 Okt dan 1 Nov 2023	Perpindahan jabatan
14.	Dr. Markwin Hasahatan, S.E., M.Si.	25 Okt dan 1 Nov 2023	Perpindahan jabatan
15.	Dr. Julia Forcina Sinuraya, S.P., M.Si.	27 Oktober 2023	Kenaikan jenjang
16.	Idha Susanti, S.Pt., M.M.	27 Oktober 2023	Kenaikan jenjang

Tabel 15. Tabel pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mengikuti Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan, 2023

No.	Nama	Waktu pelatihan	Jenis pelatihan
1.	Dr. Wahida, S.P., M.Si.	13 Maret-10 April 2023	KAK
2.	Frans B.D. Marojahan, S.P., M.Si.	13 Maret-10 April 2023	KAK
3.	Ahmad Makky A, S.Sos., M.Si.	24 Juli-16 Agustus 2023	KAK
4.	Amalia Ulpah, S.P., M.Si.	24 Juli-16 Agustus 2023	KAK
5.	Joko Mulyono, S.P., M.Si.	24 Juli-16 Agustus 2023	KAK
6.	Esty Asriyana Suryana, S.P., M.Si.	24 Juli-16 Agustus 2023	KAK
7.	Riska Nurhafizhah, S.	11 Oktober-2 November 2023	CAK

5. Penginputan Nomor Induk Analisis Kebijakan Nasional (NIAKN)

Input data Analisis Kebijakan Kementerian Pertanian pada aplikasi NIAKN mulai tahun 2023 dilaksanakan secara digitalisasi yang diinput oleh Sekretariat masing-masing K/L. Pada tahun 2023, Sekretariat TPI telah menginput profil 85 JFAK yang terdiri dari 14 Analisis Kebijakan Pertama, 43 Analisis Kebijakan Ahli Muda, 26 Analisis Kebijakan Ahli Madya, dan 2 Analisis Kebijakan Ahli Utama. Masih ada penambahan AK yang akan diinput segera pada tahun 2024.

III. SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan sebagai kegiatan utama PSEKP didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu terdiri dari barang-barang tidak bergerak dan barang-barang yang bergerak. Barang-barang yang tidak bergerak terdiri dari: (1) tanah bangunan rumah negara golongan II, (2) bangunan gedung kantor permanen, (3) gedung pertemuan Dr. Ir. Ismunadji; bangunan *groundtank*/rumah panel, serta (4) rumah negara golongan II tipe C dan D permanen. Sementara barang-barang bergerak secara umum meliputi alat angkutan (kendaraan roda 4 dan roda 2), *furniture*, elektronik, serta aset tetap lainnya.

Pengelolaan Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) walaupun merupakan tanggung jawab Bagian Umum, tetapi secara moral adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan. Secara rinci daftar kondisi barang yang dimiliki PSEKP sampai pada periode 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 16.

Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Barang tidak bergerak yang dimiliki PSEKP meliputi tanah dan bangunan. Keseluruhan tanah yang dimiliki PSEKP seluas 1.558 m² yang terdiri dari tanah bangunan rumah negara golongan II seluas 1.558 m² terletak di Ciapus, Bogor. Sementara itu, bangunan yang dimiliki PSEKP adalah kantor yang terdiri atas dua unit bangunan di Jl. Tentara Pelajar 3B; satu unit bangunan gedung pertemuan, satu unit bangunan *groundtank*/rumah panel, empat buah rumah dinas (2 rumah golongan II Tipe C Permanen dan 2 rumah Tipe D Permanen), dan satu pagar permanen yang secara keseluruhan dalam kondisi baik. Rincian barang tidak bergerak disajikan pada Tabel 16.

Barang-Barang Bergerak

Pada periode tahun 2023, jumlah barang-barang bergerak yang dimiliki oleh PSEKP sebanyak 3.575 unit, 3.540 unit dalam kondisi baik dan 35 unit kondisi rusak. Barang-barang bergerak tersebut meliputi sarana transportasi/kendaraan dinas, mesin dan peralatan kantor, sarana komunikasi, dan barang bergerak penunjang kegiatan kantor lainnya. Fasilitas penunjang kerja yang dimiliki dalam kondisi baik adalah 122 unit komputer, 29 unit *notebook*, 10 unit laptop, 17 unit tablet PC, 23 unit *scanner*, dan 88 unit printer.

a. Barang Inventaris Alat Angkutan

Pada tahun 2023, kendaraan roda empat yang dimiliki PSEKP terdiri dari 11 unit minibus (kapasitas penumpang <14 orang) dalam kondisi baik. Kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang sejumlah 1 unit dan sepeda motor ada 12 unit dalam keadaan baik. Tahun 2023 ada pengadaan alat angkutan berupa kendaraan roda empat untuk operasional Kepala Pusat.

b. Barang Inventaris Peralatan Kantor

Pada tahun anggaran 2023 barang inventaris peralatan kantor berjumlah 3.551 unit dengan rincian sebanyak 3.516 unit kondisi baik dan 35 unit kondisi rusak. Ada satu jenis barang yang dalam usulan penghapusan yaitu mesin ketik manual Langewagon (18-27 Inchi). Terdapat ketidaksesuaian jumlah fisik barang inventaris yang di data secara manual dengan jumlah yang ada di aplikasi, untuk itu pendataan barang inventaris dalam aplikasi perlu *diupdate* secara rutin. Sumber dana pengadaan barang inventaris tersebut berasal dari akumulasi pengadaan barang pada tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran untuk pengadaan barang inventaris peralatan kantor di anggaran tahun 2023. Rincian daftar dan kondisi barang inventaris dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Daftar kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
I. BARANG TIDAK BERGERAK					
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.558	1.558		
2.	Rumah Panel	1	1		
3.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2		
5.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	2	2		
6.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	2	2		
7.	Pagar Permanen	1	1		
8.	Sumur Pemboran Air	1	1		
Subtotal (I)		1.568	1.568		
II. BARANG BERGERAK					
1.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	11	11		
2.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	1	1		
3.	Sepeda Motor	12	10	2	
4.	Baggage Trolley	1	1		
5.	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	2	2		
6.	TRIPOD	1	1		
7.	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	1		
8.	Alat Penggiling Kopi	1	1		
9.	Rak-Rak Penyimpan	4	4		
10.	Lemari Penyimpan	3	3		
11.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4	4		
12.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	1		
13.	Mesin Penghitung Uang	1	1		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
14.	Mesin Fotocopy Folio	1	1		
15.	Lemari Besi/Metal	37	37		
16.	Lemari Kayu	79	79		
17.	Rak Besi	12	12		
18.	Rak Kayu	3	3		
19.	Filing Cabinet Besi	63	63		
20.	Brankas	5	5		
21.	Locker	4	4		
22.	Roll Opek	3	3		
23.	Lemari Display	1	1		
24.	Hydrant	1	1		
25.	CCTV - Camera Control Television System	26	24	2	
26.	Papan Visual/Papan Nama	2	2		
27.	Alat Penghancur Kertas	1	1		
28.	Panel Pameran	4	4		
29.	Penangkal Petir	2	1	1	
30.	LCD Projector/Infocus	8	8		
31.	Proyector Spider Bracket	2	2		
32.	Perkakas Kantor Lainnya	2	2		
33.	Meja Kerja Kayu	104	104		
34.	Kursi Besi/Metal	712	712		
35.	Sice	30	30		
36.	Bangku Panjang Besi/Metal	1	1		
37.	Meja Rapat	78	78		
38.	Meja Komputer	3	3		
39.	Meja Resepsionis	2	2		
40.	Workstation	93	93		
41.	Meubelair Lainnya	1	1		
42.	Jam Elektronik	7	7		
43.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		
44.	Mesin Pemetong Rumput	2	2		
45.	Lemari Es	1	1		
46.	A.C. Sentral	65	65		
47.	A.C. Split	45	45		
48.	Televisi	9	9		
49.	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	3	2	1	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
50.	Amplifier	2	1	1	
51.	Equalizer	1	1		
52.	Loudspeaker	11	11		
53.	Sound System	1	1		
54.	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	1	1		
55.	Wireless	2	2		
56.	Microphone	4	4		
57.	Microphone Table Stand	2	2		
58.	Mic Conference	26	3	23	
59.	Camera Video	1	1		
60.	Tustel	2	1	1	
61.	Tangga Aluminium	1	1		
62.	Dispenser	7	7		
63.	Handy Cam	3	2	1	
64.	Kabel Roll	8	8		
65.	DVD Player	2	2		
66.	Audio Mixing Console	1	1		
67.	Audio Mixing Portable	36	36		
68.	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	3	3		
69.	Microphone/Wireless MIC	6	6		
70.	Power Supply Microphone	1	1		
71.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5		
72.	Power Amplifier	1	1		
73.	Compact Disc Recorder	1	1		
74.	Blitzzer	2	2		
75.	Video Presenter	1	1		
76.	Voice Recorder	11	11		
77.	Rak Peralatan	1	1		
78.	Tripod Camera	2	2		
79.	Lighting Stand Tripod	7	7		
80.	Lensa Kamera	2	2		
81.	Layar Film/Projector	7	7		
82.	Head Set	1	1		
83.	Camera Digital	9	6	3	
84.	Video Conference	2	2		
85.	LCD Monitor	1	1		
86.	Camera Conference	1	1		

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
87.	Mesin Jilid	2	2		
88.	Kamera Udara	1	1		
89.	Telephone (PABX)	3	3		
90.	Intermediate Telephone/Key Telephone	3	3		
91.	Pesawat Telephone	39	39		
92.	Telephone Mobile	25	22	3	
93.	Handy Talky (HT)	6	6		
94.	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	5	4	1	
95.	Radio Communication Matching Switch (RCMS)	1	1		
96.	Feeder Lainnya (Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar)	1	1		
97.	Genset	1	1		
98.	Diagnostik Set	1	1		
99.	Temperatur Monitor	3	2	1	
100.	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	1	1		
101.	Tripod	2	2		
102.	TV Monitor	5	5		
103.	Ketel Pemasakan	7	7		
104.	Alat Crimp Tester	1	1		
105.	Alat Pemadam Kebakaran	24	24		
106.	Data Input	1	1		
107.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	4	4		
108.	Wireless Data Tranmission System	2	2		
109.	Cable Tester	1	1		
110.	DC / AC Power Supply	1	1		
111.	Internet	3	3		
112.	P.C Unit	152	132	20	
113.	Lap Top	12	7	5	
114.	Note Book	52	48	4	
115.	Tablet PC	17	17		
116.	Personal Komputer Lainnya	3	3		
117.	Komputer Unit Lainnya	2	2		
118.	Console Unit (Peralatan Mainframe)	1	1		
119.	Hard Disk	1	1		
120.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
121.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	133	94	39	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
122.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	27	21	6	
123.	External	59	59		
124.	External/ Portable Hardisk	6	6		
125.	Server	4	4		
126.	Router	2	2		
127.	Netware Interface External	1	1		
128.	Acces Point	1	1		
129.	Capasitor Bank	1	1		
130.	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	1		
131.	Monografi	420	420		
132.	Buku Lainnya	34	34		
133.	Majalah	86	86		
134.	Buletin	350	350		
135.	Laporan	758	758		
136.	Atlas	3	3		
137.	Software Komputer	5	5		
138.	Pompa Air	1		1	
139.	Video Cassette	1		1	
140.	Camera Film	2		2	
141.	Lensa Kamera	3		3	
142.	Mini Komputer	4		4	
	Subtotal (II)	3.917	3.792	125	
	TOTAL	5.485	5.360	125	

Anggaran DIPA, PNBP, dan Kerja Sama Penelitian

Keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan utama didukung oleh kegiatan penunjang. Secara umum perkembangan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 93,77%. Rincian pagu, realisasi, dan sisa anggaran tahun 2023 disajikan pada Tabel 17.

Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 terdiri dari tiga jenis pengeluaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Realisasi anggaran per jenis pengeluaran selama tahun 2023 diuraikan pada Tabel 18.

Tabel 17. Perkembangan pelaksanaan keuangan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Kegiatan Utama (Rekomendasi Kebijakan Sosek dan Pembangunan Pertanian)	18.751.539.000	17.583.425.940	93,77	1.168.113.060	6,23
Kegiatan Penunjang					
Total	18.751.539.000	17.583.425.940	93,77	1.168.113.060	6,23

Tabel 18. Realisasi anggaran per jenis pengeluaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
51	Belanja Pegawai	5.534.117.000	4.674.110.946	84,46	860.006.054	15,54
52	Belanja Barang	12.317.522.000	12.032.431.994	97,69	282.786.212	2,31
53	Belanja Modal	899.900.000	876.883.000	97,44	23.017.000	2,56
	Jumlah	18.751.539.000	17.583.425.940	93,77	1.168.113.060	6,23

Tabel 19. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI		SALDO ANGGARAN	
			Rp	%	Rp	%
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	8.317.522.000	8.195.754.028	98,54	121.767.972	1,46
EBA.994	Layanan Perkantoran PSEKP	9.534.117.000	8.590.138.017	90,10	943.978.983	9,90
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal PSEKP	899.900.000	876.883.000	97,44	23.017.000	2,56
Jumlah		18.751.539.000	17.583.425.940	93,77	1.168.113.060	6,23

Tabel 20. Rekapitulasi PNBPN Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian 2023

KODE MAK	URAIAN MAK	PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET %
1	2	3	4	5	6	7
	Penerimaan Umum					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.528.000	8.716.753	8.716.753	-	
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.640.070	3.640.070	-	
425112	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7.341.975	7.341.975	-	
	Jumlah Penerimaan Umum	3.528.000	19.698.798	19.698.798	-	
	Penerimaan Fungsional					
423216	Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah Umum + Fungsional	3.528.000	19.698.798	19.698.798	0	

IV. PROGRAM

4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan

Tujuan umum kegiatan penyusunan program adalah untuk mendapatkan arah kajian analisis kebijakan yang lebih terencana dan sistematis agar pelaksanaan kegiatan dan analisis kebijakan layak untuk dilaksanakan.

Secara rinci pelaksanaan kegiatan program bertujuan untuk:

1. Membuat perencanaan program dan anggaran kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP TA. 2023;
2. Merencanakan kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian PSEKP TA 2023; dan
3. Memperoleh saran tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang berdasarkan evaluasi kegiatan TA 2022.

Luaran yang diharapkan:

1. Program perencanaan anggaran dan kegiatan PSEKP TA. 2023;
2. Saran tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang; dan
3. Paket perencanaan kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2023.

4.2. Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan Tahun Anggaran 2023

Tujuan perencanaan kegiatan adalah agar seluruh kegiatan PSEKP dapat terlaksana secara optimal sesuai tahapan yang telah direncanakan. Sesuai dengan siklus perencanaan, penyusunan kegiatan PSEKP dilakukan pada satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Artinya, rencana kegiatan TA 2023 dilakukan pada TA 2022; perencanaan kegiatan TA 2024 dilakukan pada TA 2023; dan seterusnya. Usulan bentuk dan besaran anggaran untuk kegiatan rutin dikoordinasikan oleh penanggung jawab kegiatan masing-masing bagian dan kelompok berdasarkan kebutuhan riil kegiatan serta ketersediaan anggaran.

Mekanisme Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan TA 2023 dan Pelaksanaan Tupoksi Tim Kerja Program Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tahapan perencanaan kegiatan analisis kebijakan PSEKP pada saat ini merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. PSEKP dengan dikoordinasi oleh Setjen, diharapkan lebih mampu berperan besar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan pertanian dalam lingkup yang lebih luas.

Tahap pertama dari siklus proses perencanaan analisis kebijakan dimulai dengan penjarangan topik-topik kajian analisis kebijakan PSEKP yang disinkronkan

dengan Rencana Strategis (Renstra) PSEKP, Sekjen, serta program-program utama Kementan. Tahap selanjutnya dari penjaringan isu adalah penentuan topik yang menjadi prioritas yang akan dikaji. Pada tahap ini disusun matriks ringkas kajian yang memuat gambaran judul, justifikasi, dan ruang lingkup yang akan dilakukan. Proses selanjutnya adalah penentuan penanggung jawab dan mentoring penyusunan proposal. Setelah proposal tersusun, maka dilanjutkan evaluasi dan penajaman kembali.

Pada tahap penajaman proposal diberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan proposal tersebut terhadap aspek-aspek: (a) perumusan masalah, *review* hasil kajian sebelumnya dan justifikasi kajian, (b) perumusan tujuan dan keluaran, (c) kerangka pemikiran (landasan teoritis), (d) perencanaan *sampling* (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, responden), (e) analisis data dan jenis data untuk menjawab setiap tujuan kajian, dan (f) perencanaan operasional (SDM, dana, dan lain-lain). Perbaikan-perbaikan tersebut disampaikan kembali kepada penyusun proposal sebagai bahan penyempurnaan proposal operasional yang akan dipresentasikan dalam kegiatan seminar dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Seiring dengan tahap-tahap perencanaan kegiatan kajian tersebut (TOR-RKAKL-Proposal) dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan dalam hal redaksional judul kajian, rencana kegiatan, penanggung jawab, lokasi, maupun biaya/anggaran kajian. Beberapa penyebab perubahan tersebut antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan tingkat Kementerian Pertanian terkait prioritas kegiatan, (2) penghematan anggaran akibat kebijakan nasional, dan (3) perubahan terkait administrasi kegiatan sehingga berdampak pada pelaksanaan rencana kegiatan; serta (4) Berdasarkan hasil pembahasan pimpinan dan mempertimbangkan dukungan PSEKP terhadap program Kementerian Pertanian, ketersediaan sumber daya manusia, serta indikator kinerja utama (IKU).

PSEKP melaksanakan 15 kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian serta 14 analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian dalam bentuk *policy brief* dan telaahan staf pada TA 2023 (Tabel 21 dan 22). Lima belas kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian yang dihasilkan tersebut lebih banyak dibanding jumlah kajian pada TA 2022, hal ini disebabkan adanya perubahan sistem pelaksanaan analisis kebijakan.

Selain merencanakan judul kajian regular dan analisis kebijakan, dalam tahap perencanaan ini juga merumuskan judul proposal kajian TA. 2023. Pada tahun 2023, porsi kegiatan kajian analisis kebijakan lebih banyak dibandingkan kajian regular. Hal ini dilakukan karena isu-isu aktual terkait implementasi kebijakan pertanian berkembang sangat dinamis, sehingga membutuhkan respon yang sifatnya responsif dan antisipatif. Kegiatan kajian regular direncanakan ada dua judul, sedangkan kajian terkait analisis kebijakan biasanya mengikuti perkembangan isu yang berkembang. Untuk tahap awal, kegiatan kajian analisis kebijakan direncanakan ada lima judul (Tabel 23).

Tabel 21. Judul analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester, 2023

No.	Judul analisis kebijakan
Periode Satu Tahun	
1.	Kebijakan Perlindungan Petani dan Bantuan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian
2.	Pelaksana Kegiatan "Dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
3.	Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan
Periode Semester	
1.	Kajian Stok Pangan Strategis
2.	Prospek Pengembangan Industri Gula Nasional
3.	Prediksi Produksi Padi Nasional 2023 Terkait Perubahan Iklim dan Krisis Energi dan Pangan Global
4.	Kajian Kecukupan dan Pasokan Pangan Ibu Kota Negara Baru
5.	Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
6.	Rumusan Program Tindak Lanjut Implementasi Deklarasi G-20 Terkait Agrifood Systems
7.	Analisis Kelayakan Usahatani Berbagai Komoditas Pertanian
8.	Antisipasi Dampak El-Nino terhadap Produksi Komoditas Pertanian Indonesia
9.	Dinamika Indikator Pencapaian Kemandirian Pangan Indonesia
10.	Analisis Efektivitas Program Pembangunan Pertanian
11.	Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk: Transformasi Kebijakan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung
12.	Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Tabel 22. Judul policy brief, 2023

No.	Judul <i>policy brief</i>
1.	Mewaspadaai Masa Panen Raya Padi 2023
2.	Mewaspadaai Musim Tanam Padi Periode April-September 2023 (untuk kalangan terbatas)
3.	Menimbang Penerapan Subsidi Pupuk Langsung ke Petani
4.	Menelisik Penyebab Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
5.	Analisis Dampak El-Nino terhadap Produksi Tanaman Pangan
6.	Prospek Keberlanjutan Produksi Karet Alam Indonesia
7.	Mewaspadaai Dampak Keluarnya Rusia dari Kesepakatan Black Sea Grain Initiative terhadap Ketahanan Pangan Global dan Domestik
8.	Lonjakan Harga Beras Dunia dan Potensi Dampaknya terhadap Indonesia
9.	Menimbang Ekspor Telur Ayam Ras ke Singapura

No.	Judul <i>policy brief</i>
10.	Menimbang Pembentukan Direktorat Jenderal yang Berfungsi Mendorong Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Pertanian
11.	Situasi Harga Pangan Global: Saatnya Mewaspadai Efek Berantai Harga Pangan di Pasar Domestik
12.	Mewaspadai Musim Panen Raya dan Produksi Padi 2024
13.	Saran Pikir Tata Kelola Bantuan Langsung Pupuk
14.	Peningkatan Efektivitas Pengendalian Inflasi di Provinsi Banten dan Tiga Kota Pemantauan Inflasi yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon (4 Policy Brief)

Tabel 23. Judul proposal/KAK analisis kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP periode satu tahun dan semester-1 TA 2024

No.	Judul analisis kebijakan
1.	Outlook Pertanian dan Strategi Pencapaian Target Pembangunan Pertanian 2025-2029
2.	Dinamika Capaian Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perdesaa: PATANAS (Panel Petani Nasional)
3.	Pembaruan Sistem Perbenihan Padi dan Jagung untuk Menjamin Ketersediaan Benih Bermutu
4.	Membangun Sistem Perbenihan Komoditas Hortikultura yang Berdaya Saing di Pasar Dalam Negeri
5.	Optimasi Berbagai Perjanjian Kerja Sama Pedagangan dalam Meningkatkan Ekspor Produk Pertanian
6.	Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan Penguatan Penyuluhan Pertanian

Permasalahan yang Menonjol dalam Pelaksanaan Kegiatan di Tim Kerja Program pada Tahun 2023

Selama kurun waktu 2023, permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan di Tim Kerja Program adalah:

- a. Apa yang direncanakan sering harus berubah karena kondisi anggaran yang tidak menentu.
- b. Sering ada arahan dari pimpinan/pengambil keputusan yang bersifat mendadak yang terpaksa harus mengubah apa yang sudah direncanakan.
- c. Perubahan sering terjadi pada saat anggaran sudah di bahas dan sudah terbit menjadi DIPA, misalnya *automatic adjustment* yang sudah dilakukan beberapa tahun ini.
- d. Belum kompatibelnya rincian anggaran yang ada di DIPA/RKAKL dengan jenis kegiatan yang terjadi di lapangan.

- e. Sering munculnya kegiatan baru dari pimpinan yang mendadak pada tahun berjalan, padahal kegiatan yang ada sudah direncanakan, dibahas dengan *stakeholders* pada tahun anggaran sebelumnya.

Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Tim Kerja Program tersebut adalah:

- a. Dokumentasi arsip-arsip perencanaan program dan perbaikan koordinasi kegiatan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan perubahan perencanaan yang bersifat segera/mendadak baik akibat kebijakan Kementan atau Kementerian Keuangan.
- b. Peningkatan kemampuan staf baik terkait dengan operasionalisasi *software*, pemahaman dalam pembebanan mata anggaran dan peraturan-peraturan administratif lainnya, serta selalu melakukan monitoring untuk *updating software* dan informasi lainnya.

V. SINOPSIS ANALISIS KEBIJAKAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN TAHUN 2023

5.1. Kebijakan Perlindungan Petani dan Bantuan Pemerintah Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan agar perlindungan dan pemberdayaan petani dicapai melalui pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD (provinsi dan/atau kabupaten/kota), serta lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan. Adanya bantuan pemerintah melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan luas panen (populasi ternak) dan produktivitas yang dapat meningkatkan produksi. Pencapaian kedua hal tersebut sangat tergantung dari ketepatan sasaran dan efektivitas program/kebijakan. Untuk itu, diperlukan kajian kebijakan perlindungan petani dan bantuan pemerintah untuk peningkatan produksi pertanian.

Kajian menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber di tingkat pusat berupa data luas tanam, luas panen, populasi ternak, produktivitas dan produksi, serta anggaran bantuan pemerintah (APBN) khususnya yang berada di lingkup Kementerian Pertanian. Data primer dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan petani penerima bantuan dan bukan penerima bantuan serta informan kunci secara langsung di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Lamongan dan Madiun) dan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Temanggung dan Demak) dan menyebarkan kuesioner secara *online* ke kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, serta Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta. Secara keseluruhan jumlah responden mencapai 685 orang.

Nilai alokasi anggaran bantuan pemerintah dalam konteks perlindungan petani untuk meningkatkan produksi pada komoditas padi, kedelai, tebu, dan sapi mengalami peningkatan setiap tahun (2018-2021). Namun demikian, dalam periode yang sama, untuk komoditas jagung, bawang merah, dan cabai mengalami penurunan. Kajian mengamati bahwa jumlah kabupaten/kota yang menerima bantuan pemerintah untuk tujuh komoditas tersebut menunjukkan dinamika yang cenderung statis, khususnya untuk padi cenderung tidak berubah.

Realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah dalam konteks perlindungan petani untuk meningkatkan produksi menunjukkan belum efektif dan relatif kurang berdampak pada peningkatan produksi. Hal ini dapat terlihat dari: 1) nilai rasio antara peningkatan produksi dibandingkan dengan pertambahan nilai anggaran menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% anggaran untuk masing-masing komoditas diikuti penurunan produksi padi (-0,20%), kedelai (-2,70%), bawang merah (-0,34%), cabai (-0,08%), dan daging sapi (-0,07%), namun menunjukkan sebaliknya untuk produksi jagung (0,14%) dan produksi gula (0,99%); 2) hasil analisis DID regresi berganda periode 2019-2021 dibanding 2015 – 2018

menunjukkan bahwa kabupaten/ kota penerima bantuan memproduksi lebih rendah 6.306,32 ton untuk padi, lebih tinggi 414,36 ton untuk jagung, lebih rendah 1.131,08 ton untuk kedelai, lebih tinggi 6.826,71 ton untuk bawang merah, lebih tinggi 956,81 ton untuk cabai, lebih rendah 782,41 ton untuk tebu dan lebih rendah 9.549,94 ton untuk sapi jika dibandingkan kabupaten/kota bukan penerima bantuan; 3) hasil analisis persepsi terkait efektifitas menunjukkan bahwa diantara tujuh komoditas yang dikaji, secara rata-rata hanya pada komoditas tebu yang cukup efektif (persepsi keefektifan > 60%), sekalipun responden memiliki persepsi secara rata-rata bantuan pemerintah untuk tujuh komoditas yang dikaji belum memenuhi standar kecukupan (rata-rata dibawah 60%).

Rekomendasi yang dapat disarankan adalah: 1) perlu dilakukan reorientasi sasaran kegiatan baik dari sisi lokasi/wilayah maupun penerima bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan agar bantuan pemerintah dapat efektif dan berdampak positif untuk peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi; 2) bantuan pemerintah yang diberikan kepada penerima sasaran perlu difokuskan pada jenis bantuan yang tidak bisa diadakan/dipenuhi secara mandiri oleh petani dan memprioritaskan pada peningkatan produksi pada lokasi dan penerima bantuan yang tepat dan menghindari bias orientasi; 3) pelaksanaan kegiatan/program bantuan pemerintah harus didasarkan pada perencanaan yang baik termasuk juga aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program bantuan tidak semata-mata berhenti pada sisi output (penyaluran) namun juga menilai pada sisi *outcome* dan dampaknya; 4) bantuan pemerintah yang diberikan selama ini lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat fisik dan sangat minim untuk yang bersifat non fisik yang mengarah kepada pemberdayaan petani. Oleh karena itu diperlukan alokasi penganggaran secara proporsional antara bantuan fisik dan non fisik.

5.2. Pelaksana Kegiatan "Dinamika Capaian Kebijakan Dan Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)

Kegiatan dinamika capaian kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan (Panel Petani Nasional) pada tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2022, yang merupakan bagian dari pelaksanaan desain kegiatan tahun 2020-2024. Kegiatan pada tahun 2023 ini masih pada tahap survei yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 yang tertunda akibat pandemi Covid-19 dan *refocusing* program dan anggaran. Dalam rangka menyediakan informasi dan data tersebut, analisis sosial ekonomi yang bersifat panel sangat diperlukan. Data dan informasi tentang dinamika dan perubahan sosial ekonomi perdesaan sebagai dampak pembangunan pertanian diperoleh melalui analisis panel. Data dan informasi diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan sekaligus bahan evaluasi program pembangunan pertanian di perdesaan.

Secara umum tujuan kegiatan Patanas adalah merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan di berbagai agroekosistem.

Tujuan secara rinci adalah, (1) mengembangkan database berupa data panel tingkat rumah tangga, tingkat usaha tani, dan tingkat desa di berbagai agroekosistem, (2) menganalisis keragaan dan dinamika indikator-indikator sosial ekonomi perdesaan di berbagai agroekosistem, (3) merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. Kegiatan Patanas tahun 2023 dilakukan di tujuh provinsi pada agroekosistem yang berbeda, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Hasil kajian Patanas 2023 terbagi menjadi enam pokok bahasan yakni (1) transformasi perdesaaan, (2) dinamika tenaga kerja, (3) produktivitas lahan, (4) kebijakan pembatasan pupuk subsidi terutama pada komoditas kentang, (5) perilaku petani dalam menyikapi hasil panen, dan (6) profil petani di desa Patanas.

Transformasi perdesaan terus terjadi, pada satu sisi hal ini menunjukkan proses kemajuan ekonomi perdesaan, namun pada sisi lain cukup mengkhawatirkan untuk kelangsungan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Beberapa indikator terjadinya transformasi perdesaan adalah terjadinya alih komoditas di berbagai desa dengan basis tanaman pangan ke komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Arah sebaliknya dapat terjadi dengan dukungan infrastruktur pertanian terutama irigasi. Namun demikian, kondisi agroekosistem tetap menjadi pembatas dalam pemilihan komoditas.

Pola hubungan kerja borongan memiliki kecenderungan menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pola kerja upah harian. Pola ini sesuai pada kondisi tenaga kerja yang relatif terbatas, dan semakin menguatnya hubungan ekonomi dibanding dengan sosial. Menarik untuk diperhatikan, adalah masih bertahannya hubungan kerja sambatan. Untuk usaha tani padi, pola sambatan menghasilkan tingkat produktivitas tenaga kerja paling rendah, dibanding harian atau borongan. Hal ini dapat dipahami, karena hitungan saling tukar “sambatan” adalah jumlah hari kerja bukan hasil kerja. Berdasarkan informasi lapang, pola sambatan masih bertahan justru sebagai strategi petani mengatasi kekurangan modal usaha, sehingga saling membantu dalam bentuk pekerjaan.

Berdasarkan analisis produktivitas lahan di agroekosistem sawah, pola tanam yang memberikan pendapatan paling tinggi adalah padi-padi-sayuran/palawija. Pola ini juga sesuai dengan rekomendasi teknis untuk memutus siklus hama dan penyakit dan menjaga kualitas lahan. Pola tanam padi-padi-padi meningkatkan risiko kegagalan akibat iklim (banjir atau kekeringan) dan serangan OPT.

Kebijakan pembatasan subsidi pupuk hanya untuk sembilan komoditas berdampak besar terhadap penggunaan pupuk komoditas yang tidak mendapatkan subsidi (contoh: kentang), serta berdampak terhadap penurunan produktivitas dan pendapatan petani. Analog dengan kentang, hal tersebut juga

diduga akan terjadi untuk komoditas lainnya. Dampak positif pembatasan subsidi tersebut adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik.

Pemahaman terhadap perilaku petani produsen padi dalam pemanfaatan produksinya sangat bermanfaat untuk kebijakan logistik pangan dan upaya stabilisasi pasokan dan harga beras. Secara umum petani tidak menjual sekaligus hasil panennya namun menyimpan sebagian untuk kebutuhan konsumsi, benih, atau untuk dijual kemudian. Perilaku ini berbeda antar agroekosistem dan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Stok yang relatif besar umumnya terdapat pada petani yang luas garapannya lebih besar. Hal ini nampak dari ketimpangan penguasaan stok antar petani yang tinggi. Dari hasil neraca pangan tingkat rumah tangga sebagian besar petani di agroekosistem sawah, mengalami defisit atau *net consumer*.

Proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian, terjadi dengan semakin rendahnya keturunan petani yang menjadi petani, terutama di agroekosistem sawah. Kondisi ini pada satu sisi membuka peluang terjadinya konsolidasi lahan sehingga luas garapan akan meningkat, namun pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran karena usah pertanian pangan dipandang tidak mampu memberikan pendapatan yang baik. Fenomena *aging farmer* secara umum dan meningkatnya jumlah petani muda khususnya pada agroekosistem sayuran, secara implisit menunjukkan bahwa adanya *missmatch* antara preferensi jenis pekerjaan yang diinginkan oleh tenaga kerja muda dengan kesempatan yang tersedia. Artinya sepanjang jenis pekerjaan pertanian belum mampu menumbuhkan image positif dan dianggap mempunyai prospek maka fenomena *aging farmer* akan terus berlangsung, namun pada sisi lain apabila mampu menghadirkan jenis pekerjaan pertanian yang dapat memberikan hasil pendapatan memadai dan didukung dengan tingkat pendidikan, maka keduanya merupakan *leverage point factor* terhadap peningkatan minat petani muda untuk lebih serius melakukan usaha pertanian.

Implikasi kebijakan yang dapat disarankan berdasarkan fenomena dinamika sosial ekonomi perdesaan yang terjadi antara lain, (1) perlu upaya khusus agar sektor pertanian menarik untuk generasi muda dan SDM yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Kondisi pada agroekosistem sawah lebih serius dibanding lahan kering berbasis hortikultura atau perkebunan, (2) upaya Pemerintah meningkatkan luas tanam padi, melalui peningkatan indeks pertanaman perlu dipetakan dengan baik, dilakukan pada lahan-lahan dengan dukungan ketersediaan air yang memadai, dan tidak dilakukan secara terus menerus. Peningkatan indeks pertanaman dilakukan dengan didasarkan pada analisis usaha, sehingga pilihan komoditas dapat memberikan peningkatan pendapatan petani. (3) perlu dipertimbangkan kembali membuka pembatasan komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk, untuk mencegah penurunan produktivitas komoditas strategis selain sembilan komoditas. (4) mempertimbangkan perilaku penggunaan produksi gabah/beras oleh petani dan sebagian petani yang *net consumer* beras, diperlukan surplus yang lebih besar untuk dapat mengamankan

stabilitas ketersediaan dan harga beras. Surplus yang dicapai setidaknya lebih besar dari volume beras yang mengisi jalur distribusi dan kebutuhan konsumsi untuk waktu tertentu.

5.3. Koordinasi, Bimbingan dan Dukungan Teknis Supervisi dan Pendampingan Program Strategis Kementan

Kegiatan supervisi dan pendampingan program strategis Kementan yang dilaksanakan oleh PSEKP sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 493.1/KPTS/OT.050/M/9/2021 tentang Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian. PSEKP diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan supervisi dan pendampingan pada empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang dilakukan melalui pemberian dukungan untuk percepatan diseminasi teknologi pertanian dan peningkatan fungsi BPP.

Pada tahun 2023, kegiatan dukungan untuk percepatan diseminasi teknologi pertanian dan peningkatan fungsi BPP dilaksanakan pada empat BPP (satu BPP disetiap kabupaten), yaitu:

- a. BPP Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan kegiatan pengembangan komoditas strategis cabe dan bawang merah;
- b. BPP Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga dengan kegiatan pengembangan komoditas strategis labu madu;
- c. BPP Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dengan kegiatan Top Working komoditas strategis durian;
- d. BPP Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dengan kegiatan pengembangan komoditas strategis kacang hijau.

PSEKP juga telah melaksanakan *workshop* dengan tema: Efektivitas Peran BPP dalam Percepatan Diseminasi Teknologi Pertanian Mendukung Kegiatan Utama Kementerian Pertanian untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan identifikasi permasalahan pembangunan pertanian di wilayah pendampingan, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 bertempat di Hotel Aston Imperium, Kabupaten Purwokerto. *Workshop* ini melibatkan semua BPP model sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dari masing-masing kabupaten di wilayah penugasan pendampingan PSEKP. Tindak lanjut untuk kegiatan supervisi dan pendampingan kegiatan utama Kementan TA 2023 adalah perlu dilakukan monitoring atas keberlanjutan kegiatan dan proses adopsi kegiatan oleh BPP lainnya khususnya dalam lingkup kabupaten yang sama sehingga kemanfaatan atas dukungan kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh para petani secara lebih luas.

5.4. Analisis Responsif Dinamika Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan semester 1 dan semester 2 tersebut bersifat khusus, yakni penugasan secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2023. Analisis kebijakan dan fungsional lainnya seperti fungsional statistisi dan pranata komputer yang dilibatkan dan ditugaskan dalam kegiatan analisis tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik kegiatan yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 98,88% dari target pagu Rp5.022.922.000,00

a. Kajian Stok Pangan Strategis

Ketahanan pangan global terancam oleh ketidakpastian perekonomian dunia dan konflik Rusia-Ukraina yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Guncangan pangan dunia tercermin dari mahalanya harga pangan di pasar global ditambah lagi dengan gangguan suplai bahan baku pupuk yang berlanjut pada kenaikan harga pupuk dan penurunan produksi pangan. Dalam kondisi ini, jaminan pasokan pangan menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan di tingkat domestik. Upaya menjaga ketersediaan dan ketahanan stok pangan masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan sebaran sentra produksi, karakteristik produk pangan, pola distribusi dan pelaku tata niaga dalam rantai pasok pangan serta koordinasi pendataan yang belum berjalan baik. Tantangan lain yang cukup krusial dalam penanganan ketersediaan dan ketahanan stok pangan adalah sistem pendataan stok pangan yang belum terkoordinasi dengan kondisi pasar sehingga memicu kebijakan impor pangan. Sebagai instansi pemerintah yang berwenang di sektor produksi pangan, Kementerian Pertanian tetap berkepentingan dalam upaya menjaga ketersediaan dan stok pangan karena kedua aspek ini menjadi indikator kerawanan pangan nasional. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pemodelan harga pangan dan stok pangan strategis. Secara spesifik tujuan kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) menganalisis keterkaitan antara stok dan harga pangan strategis dan simulasi pemodelan harga dan stok pangan strategis, (2) melakukan validasi dan pengujian model harga pangan dan stok pangan pada daerah sampel terpilih berdasarkan pola produksi dan distribusi pangan serta kebijakan pangan yang sudah dan akan diterapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer dengan metode analisis yaitu analisis regresi berganda dan simulasi monte carlo.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pandataan neraca pangan saat ini belum dapat menggambarkan ketersediaan pangan secara riil di pasar, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Neraca pangan nasional memiliki akurasi yang lebih baik, untuk menunjukkan kondisi surplus atau defisit yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan ekspor-impor. Dengan pendekatan berbasis produksi, dan belum adanya komponen perdagangan antar wilayah, maka data ketersediaan pangan provinsi dan kabupaten/kota lebih menunjukkan

dinamika produksi disuatu wilayah, dan tidak merepresentasikan ketersediaan di wilayah tersebut, karena aktivitas perdagangan antar wilayah. Neraca pangan wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) bermanfaat untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan, yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Kondisi saat ini, neraca pangan wilayah belum dapat digunakan sebagai indikator ketersediaan ataupun kekurangan pasokan pangan disuatu wilayah, namun dapat digunakan sebagai informasi produksi pangan. Dinamika harga pangan disuatu wilayah lebih dapat merepresentasikan kondisi keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan di pasar. Kekurangakuratan data neraca pangan disebabkan karena faktor metode pengumpulan, keberagaman pelaksanaan pendataan di lapangan, dukungan infrastruktur termasuk sistem pedataan dan belum tersedianya data tertentu saat ini (pedagangan antar wilayah dan konsumsi non rumah tangga).

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian ini yaitu: (1) Kementerian Pertanian diharapkan dapat fokus pada penyempurnaan informasi spasial periodik pola tanam dan panen komoditas pangan strategis. Upaya ini sangat bermanfaat dalam menggambarkan (i) perilaku harga di pasar (produksi tinggi harga turun dan sebaliknya), dan (ii) Bulog akan dapat menggunakan data panen dan jumlah produksi untuk pengadaan stok dalam negeri; (2) untukantisipasi kondisi yang akan terjadi, dapat dilakukan peramalan (*forecasting*) berdasarkan data series stok pangan yang telah dikumpulkan dengan baik, sehingga dapat memperkirakan kondisi panen, jumlah produksi, dan harga beberapa waktu kedepan. Kementan dapat menambahkan data proyeksi produksi ke depan untuk setiap komoditas pangan sebagai barometer ditjen teknis dalam melaksanakan program distribusi dan stabilisasi pasokan komoditas pangan strategis; (3) data stok pangan yang sudah ada diperkuat pada stok di pedagang saja, data kebutuhan sebaiknya menggunakan Susenas level provinsi yang dikumpulkan Maret (sampel lebih besar), serta data konsumsi horeka dan industri dapat menggunakan Survei Bapok; (4) Kementerian Pertanian lebih baik memperbaiki dan menyempurnakan ketersediaan data pola tanam produksi/panen setiap komoditas serta menyediakan data lengkap sumber pangan meliputi sentra produksi, waktu panen, produsen, dan jumlah produksi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan stabilisasi pasokan; (5) peranan ditjen teknis adalah melakukan akurasi perencanaan tanam dan panen komoditas strategis. Informasi tersebut akan menjadi input pelaku pasar dalam melaksanakan bisnis termasuk mendukung implementasi kerja sama antar daerah (KAD).

b. Prospek Pengembangan Industri Gula Nasional

Peranan penting gula dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu barang pangan pokok diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 jo. 59 Tahun 2020. Kebutuhan konsumsi gula semakin meningkat, sementara produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan gula nasional menyebabkan impor gula tidak dapat dihindari. Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan gula nasional di tingkat *on-farm*, *off-farm*, maupun kelembagaan pendukung. Strategi yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pemenuhan kebutuhan gula konsumsi nasional adalah: (a) identifikasi kesesuaian lahan baru untuk tebu; (b) pemanfaatan lahan HGU yang terlantar; (c) revitalisasi pabrik gula; (d) investasi pabrik gula baru; dan (e) perbaikan pola kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu. Kajian bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kinerja industri gula nasional, (2) mengidentifikasi kebijakan dan permasalahan yang terjadi pada industri gula nasional, (3) mengetahui prospek dan strategi pengembangan industri gula nasional, dan (4) merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan industri gula nasional.

Lokasi kajian di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Responden dipilih secara sengaja terdiri dari: (1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; (2) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kementerian Perindustrian; (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; (4) Asosiasi Gula Indonesia (AGI); (5) Pabrik Gula; (6) Para Pakar; dan (7) instansi terkait lainnya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah bidang yang menangani komoditas tebu dan gula. Pada tingkat kecamatan dan desa adalah: (1) Asosiasi Petani Tebu; (2) KUD; dan (3) Petani. Data dan informasi dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis SWOT.

Rata-rata luas lahan dan produksi tebu perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta periode 2010-2022 mengalami penurunan, sedangkan luas lahan perkebunan besar negara mengalami peningkatan. Produksi gula di Indonesia pada kurun waktu 2010-2022 cenderung memiliki tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan yang positif. Secara umum rendemen PG swasta lebih tinggi dari PG BUMN yang berlokasi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Impor *raw sugar* memiliki tren yang meningkat pada kurun waktu 2012 – 2022. Nilai ekspor *raw sugar* pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun 2021. Rata-rata harga gula internasional yang digambarkan oleh *white sugar* terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan harga gula pasar domestik selama tahun 2018 – 2022.

Kebijakan untuk mendukung pengembangan industri gula nasional masih diperlukan diantaranya penyediaan lahan usaha tani tebu, kebijakan pengendalian harga tebu dan harga gula, kebijakan investasi industri gula dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan perdagangan gula. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa industri gula nasional berada pada kuadran 4, industri gula selain mempunyai hambatan pada faktor eksternal juga mempunyai hambatan pada sumber daya internal. Strategi yang digunakan untuk mengatasi dengan melakukan kegiatan yang bersifat defensif dan meminimalkan kelemahan, serta menghindari ancaman.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan yaitu: 1) peningkatan produksi gula domestik melalui penguatan *on-farm*, penguatan riset budi daya, penguatan pascapanen, dan penguatan kapasitas petani; 2) penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; dan 3) penguatan cadangan/stok gula nasional.

c. *Prediksi Produksi Padi Nasional 2023 Terkait Perubahan Iklim dan Krisis Energi dan Pangan Global*

Perubahan dan variabilitas iklim, dan perkembangan situasi lingkungan strategis pembangunan pertanian baik domestik maupun global menjadi tantangan penting bagi pembangunan pertanian Indonesia. Dalam jangka pendek, berdasarkan Prakiraan Musim Hujan 2022/2023 dan Climate Outlook 2023 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diperoleh gambaran bahwa El Nino and Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada pada fase La Nina dan Indian Ocean Dipole (IOD) berada pada fase negatif. Dalam jangka panjang, Bappenas (2010) memperkirakan akan terjadi El-Nino dan La-Nina bergantian selama 6 – 9 bulanan, diselingi dengan periode normal pada tahun 2023 – 2027, El-Nino akan terjadi dalam jangka 1 tahunan pada 2029-2030, dan kecenderungan normal pada tahun 2028. Kajian ini bertujuan untuk, (1) Menganalisis situasi perberasan nasional tahun 2023 dan prediksinya untuk 2024 dalam menghadapi perubahan dan variabilitas curah hujan dan iklim dan tidak menentunya kondisi perekonomian global, dan (2) Merumuskan rekomendasi kebijakan antisipatif perberasan nasional terkait perubahan iklim dan krisis pangan dan energi global.

Situasi Perberasan Nasional Pada Awal Tahun 2023 menunjukkan gejala. Pada periode 2018-2022, Luas panen padi nasional menurun rata-rata 2,06% per tahun, produktivitas meningkat rata-rata 0,27% per tahun dan produksi menurun rata-rata 1,78% per tahun, penyebabnya adalah: (1) produksi padi masih bertumpu di Pulau Jawa dan mengalami penurunan, dan penurunan juga terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi; (2) pada provinsi produsen utama padi, luas panen hanya meningkat di Provinsi Lampung, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali, di luar wilayah itu hanya di Provinsi Sulawesi Barat; (3) pada provinsi produsen utama, tidak terjadi peningkatan produktivitas signifikan; dan (4) produksi padi di wilayah produsen utama hanya meningkat di Provinsi Lampung, Provinsi Banten dan Provinsi DI Yogyakarta. Pada periode yang sama, (1) produksi padi menurun sementara terjadi peningkatan konsumsi; (2) peningkatan konsumsi di Luar Jawa jauh lebih tinggi mendorong peningkatan harga dan permintaan pasokan dari Jawa; (3) harga beras di Pulau Jawa dan nasional ikut meningkat. Kondisi dan situasi perberasan nasional sangat terkait dengan perekonomian global yang masih tidak menentu dimana sekalipun terjadi kecenderungan penurunan harga minyak bumi, penurunan harga pupuk internasional, dan juga penurunan harga pangan utama non beras, namun harga beras makin meningkat sebagai akibat dari: (1) gagal panen karena iklim di beberapa negara, (2) pulihnya pandemi di wilayah Asia menjadikan restocking di China yang meningkatkan permintaan

beras, (3) pembatasan ekspor untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri di India, Vietnam dan beberapa negara lain, dan (4) konflik Rus-a - Ukraina yang berkepanjangan mendorong kenaikan harga internasional beras.

Perubahan luas panen yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan luas panen itu sendiri antara 65% - 72% dan perubahan produktivitas antara 9,12%-16,43%. Perubahan produktivitas yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan produktivitas itu sendiri antara 51% - 53%, perubahan luas panen 31% - 40%. Kontribusi pengaruh masing-masing faktor meningkat di 2024 dibanding 2023. Kontribusi pengaruh pada MK (April – September) lebih besar jika dibandingkan pada MH (Oktober – Maret). Berdasarkan prediksi bahwa: (1) harga minyak mentah dunia pada 2023 dibanding 2022 menurun rata-rata 15,9% dan harga tahun 2024 dibanding tahun 2023 meningkat rata-rata 2,4%; (2) harga beras dunia pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 meningkat rata-rata 16,8% dan harga 2024 dibanding 2023 menurun rata-rata 3,9%; dan (3) SOI EL Nino masing-masing meningkat 3,79% dan 4,19% pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Hasil analisis prediksi menurut provinsi menunjukkan terjadi penurunan luas panen, produktivitas dan produksi hampir diseluruh wilayah produsen utama padi di Indonesia (18 provinsi) pada 2023 maupun 2024, baik dirinci menurut MH, MK, MH+MK maupun periode Januari – Desember. Hal yang sama juga terjadi di 16 provinsi lainnya, yang bukan merupakan wilayah produsen utama padi. Produksi padi pada 2023 dibanding 2022 pada MH meningkat 2,22% atau 553,19 ribu ton, MK menurun 6,77% atau 1.978,79 ribu ton, MH+MK menurun 2,63% atau 1.425,60 ribu ton, Jan-Des menurun 3,16% atau 1.750,96 ribu ton. Pada 2024 dibanding 2022 pada MH meningkat 0,70% atau 175,49 ribu ton, MK menurun 6,64% atau 1.943,17 ribu ton, MH+MK menurun 3,26% atau 1.767,68 ribu ton, Jan-Des menurun 3,75% atau 2.080,97 ribu ton.

Rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan antara lain, (1) unit-unit Eselon 1 yang terkait dengan produksi padi perlu mengkondisikan perencanaan dan implementasinya berdasarkan pilihan skenario yang tepat untuk peningkatan produksi pada masing-masing provinsi. Selain itu juga harus berkoordinasi dengan instansi daerah provinsi untuk memetakan kabupaten yang berpeluang untuk segera meningkatkan produksi sesuai dengan pilihan skenario yang tepat untuk masing-masing. Unit Eselon 1 harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain di pusat maupun didaerah untuk memastikan dan meningkatkan ketersediaan benih toleran cekaman iklim, ketersediaan pupuk, sarana prasarana irigasi, kapasitas petani dalam adaptasi terutama terhadap perubahan iklim, dan kesiapsiagaan atau kesiapan untukantisipasi adanya outbreak OPT, (2) berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan lahan yang dapat digunakan untuk pertanaman padi baik padi ladang maupun padi lahan lebak dan pasang surut, (3) berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk berperan aktif mengawal percepatan tanam periode akhir MK 2023 (Juli-September 2023) dan MH 2024, (4)

berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, BULOG, Kementerian Keuangan dan Bapanas untuk sedapat mungkin tidak melakukan impor karena pengaruh harga dunia dan harga impor beras Indonesia, dan perubahan volume impor beras terhadap perubahan luas panen dan produktivitas padi sangat tinggi, melebihi pengaruh perubahan iklim dan harga energi dan BBM domestik.

d. Kajian Kecukupan dan Pasokan Pangan Ibu Kota Negara Baru

Perpindahan ibu kota ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. Dampak langsung terjadi akibat migrasi tenaga kerja khususnya pegawai pemerintah pusat beserta keluarganya. Adapun dampak tidak langsung terjadi secara gradual sebagai akibat dari perkembangan ekonomi IKN. Konsekuensi utama dari peningkatan jumlah penduduk yaitu peningkatan kebutuhan pangan. Permintaan pangan di Provinsi Kalimantan Timur relatif tidak besar karena bukan merupakan sentra wisata dengan proporsi jumlah penduduk yang relatif kecil. Namun dengan peningkatan jumlah penduduk akibat perpindahan Ibu Kota Negara ini, secara otomatis akan meningkatkan permintaan pangan. Permasalahan muncul mengingat Provinsi Kalimantan Timur secara umum bukanlah merupakan provinsi sentra produksi pangan dan pertanian. Penyediaan pangan di Provinsi Kalimantan Timur banyak dipasok dari provinsi lain disekitarnya. Kajian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kebutuhan pangan saat ini dan proyeksi kebutuhan pangan kedepan di wilayah IKN, (2) menganalisis potensi produksi pertanian di wilayah dan sekitar wilayah IKN, (3) memetakan rantai tata niaga dan pola distribusi pangan strategis wilayah IKN, dan (4) menyusun rekomendasi kebijakan pemenuhan pangan strategis di wilayah IKN.

Pembangunan IKN dibagi menjadi sembilan Wilayah Perencanaan (WP) yaitu, (1) WP KIPP (6.671 ha), (2) WP IKN Barat (17.206 ha), (3) WP IKN Selatan (6.753 ha), (4) WP IKN Timur 1 (9.761 ha), (5) WP IKN Timur 2 (3.720 ha), (6) WP IKN Utara (12.067 ha), (7) WP Simpang Samboja (4.366 ha), (8) WP Kuala Samboja (3.062 ha), (9) WP Muara Jawa (9.084 ha).

Kebutuhan pangan di wilayah IKN cukup besar relatif dibandingkan dengan kebutuhan pangan Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan kebutuhan pangan meningkat cukup besar terutama pada periode 2024-2029. Peningkatan kebutuhan pangan pada periode tersebut rata-rata berkisar antara 35,08% per tahun (bawang merah) hingga 130,53% per tahun (daging sapi). Peningkatan kebutuhan pangan mulai melandai pada periode 2029-2045 seiring dengan semakin berkurangnya tambahan jumlah penduduk yang diproyeksi bermigrasi ke IKN. Dengan adanya IKN, secara tidak langsung mendorong peningkatan konsumsi pangan di wilayah Kalimantan Timur. Kebutuhan pangan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi terutama pada kabupaten/kota yang berhimpitan dengan wilayah IKN.

Sumber produksi pangan di IKN bersumber dari wilayah yang terdelineasi IKN dan kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah yang terdelineasi IKN merupakan wilayah sentra produksi pertanian di masing-masing kabupaten asalnya. Kecamatan Sepaku bersama dengan Kecamatan Babulu merupakan sentra produksi padi dan cabai rawit di Kabupaten PPU, begitupun dengan Kecamatan Samboja yang merupakan sentra produksi cabai rawit dan cabai merah keriting di Kabupaten Kukar. Sentra produksi pertanian komoditas strategis juga berada pada kabupaten/kota yang berhimpitan dengan wilayah IKN. Kabupaten Kukar, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda merupakan sentra produksi padi, dimana produksi dari kelima kabupaten/kota tersebut mencapai 85,35% dari total produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan tidak mencukupinya produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka tingkat ketergantungan pangan dari luar Pulau Kalimantan sangat tinggi. Perdagangan antar pulau menjadi kunci utama pasokan pangan ke IKN. Efisiensi rantai tata niaga suatu komoditas pangan dilihat dari seberapa pendek rantai tata niaga tersebut.

Dengan demikian, terdapat tiga simpul penting dalam penyediaan pangan yaitu produksi pangan, cadangan pangan, dan perdagangan pangan. Terkait produksi pangan, diperlukan (1) pemetaan dan uji kesesuaian lahan baik pada 9 WP maupun pada wilayah penyangga lingkungan dan ketahanan pangan. Amanah Perpres Nomor 64 Tahun 2022 adalah penyediaan lahan pertanian pangan sebesar 42 ribu hektar atau sekitar 16% dari total luas daratan IKN. Namun berdasarkan RDTR yang sudah ditetapkan pada sembilan WP baru sekitar 8.000 hektare lahan pertanian pangan yang sudah terpetakan; (2) memastikan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak terkena proyek pembangunan, (3) implementasi program peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman pada lahan eksisting, dan (4) perlu dibentuk BUMD Pangan IKN yang melakukan ekstensifikasi penanaman komoditas pangan strategis di wilayah penyangga IKN (Kabupaten PPU dan Kukar serta Kota Balikpapan dan Samarinda). Terkait cadangan pangan, diperlukan (1) Pemda Kaltim dan OIKN perlu menetapkan cadangan pangan di wilayah IKN dan wilayah sekitar IKN baik jenis komoditas maupun besarnya, (2) BUMN Pangan (Bulog dan ID Food) membangun infrastruktur cadangan pangan seperti gudang, *cold storage*, *cold chain*, dan *controller atmosphere storage*, terutama untuk komoditas selain beras, (3) meningkatkan kapasitas terisi gudang Bulog Kanwil Kaltim-Kaltara, terutama pada gudang yang dekat dengan wilayah IKN (Kab. PPU, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda), (4) BUMD Pangan IKN juga perlu membangun infrastruktur CPPD seperti gudang, *cold storage* dan *cold chain*, *controller atmosphere storage*, armada transportasi pangan, dan infrastuktur lainnya. Terkait perdagangan pangan, diperlukan (1) membentuk tiga BUMD Pangan untuk memudahkan dan memperlancar perdagangan pangan dengan tiga konsentrasi bisnis yang berbeda, (2) setiap BUMD Pangan membangun jejaring bisnis to bisnis dengan pelaku perdagangan pangan di daerah-daerah sentra produksi.

e. Implementasi Regulasi Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan

Ketersediaan lahan di bidang pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Terbitnya UU Cipta Kerja telah dilakukan penyesuaian pada pasal tertentu pada berbagai Undang-Undang termasuk UU No. 41 Tahun 2009. Penyesuaian pada pasal-pasal tertentu akan berdampak pada implementasi UU No. 41 Tahun 2009. Ketidakefektifan penerapan UU No. 41 Tahun 2009 dan adanya penyesuaian pasal tertentu ke dalam UU Cipta Kerja perlu dicermati secara baik agar dapat diketahui sumber permasalahannya. Untuk membedah ketidakefektifan tersebut, diperlukan kajian yang menganalisis permasalahan secara komprehensif. Tujuan dari kajian ini adalah, (1) menggali informasi kondisi eksisting implementasi regulasi perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan (UU No. 41 Tahun 2009), (2) menganalisis permasalahan dan tantangan terkait implementasi UU No. 41 Tahun 2009, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk efektifitas implementasi UU No. 41 Tahun 2009.

Implementasi UU No. 41 Tahun 2009 belum berjalan efektif. Indikator ketidakefektifan ini terlihat dari lambatnya penetapan LP2B baik yang diintegrasikan dalam Perda RTRW maupun melalui penerbitan Perda LP2B. Cakupan isi Perda LP2B yang diterbitkan pemerintah daerah beragam antar daerah dan belum seluruhnya memuat data spasial sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2009. Belum tersedianya data spasial dalam dokumen Perda RTRW atau Perda LP2B, hal ini berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya alih fungsi lahan pertanian.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 41 Tahun 2009 pada masa mendatang tidak mudah. Pertumbuhan pembangunan di sektor non pertanian seiring meningkatnya jumlah penduduk, hal ini berpotensi untuk memanfaatkan lahan pertanian dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Di sisi lain pemerintah belum mampu memberikan insentif yang memadai pada pemilik/penggarap lahan LP2B agar tetap mempertahankan lahan pertanian tersebut sebagai lahan produksi pangan. Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menangani perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kurang efektifnya peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dan terbatasnya infrastruktur penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Strategi yang dimungkinkan dapat dilakukan untuk mempercepat implementasi UU No. 41 Tahun 2009, kunci utamanya adalah mendorong komitmen kepala daerah agar lebih serius dalam menjalankan program perlindungan lahan pertanian pangan di wilayahnya. Adanya komitmen tersebut, kepala daerah akan mampu mengatur program-program prioritas untuk

dilaksanakan melalui penyediaan anggaran yang memadai. Selain itu, proses penetapan LP2B juga harus diupayakan melengkapi data spasial agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam pemberian sanksi hukum ketika terjadi pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya yang terlibat dalam program implementasi UU No. 41 Tahun 2009 perlu dilakukan dengan cara meminimalkan proses mutasi dan memberi kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Faktor koordinasi lintas sektor melalui FPRD perlu diintensifkan agar fungsi pengawasan berjalan efektif, hal ini diharapkan mampu menekan kegiatan alih fungsi lahan pertanian di daerah.

Rekomendasi kebijakan yang bisa disarankan dari kajian ini antara lain, (1) Kementerian Pertanian dapat meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mendorong komitmen pimpinan daerah (provinsi dan kab/kota) agar lebih serius dan memprioritaskan implementasi UU No. 41 tahun 2009. (2) percepatan penetapan Perda LP2B atau yang diintegrasikan ke dalam Perda RTRW perlu dukungan anggaran yang memadai, untuk itu pemerintah pusat (Kementan) dapat memberikan bantuan dengan prioritas ke wilayah penghasil beras yang ketersediaan anggaran untuk penetapan LP2B relatif terbatas. (3) perlu dibuat standarisasi kelengkapan dokumen penetapan LP2B agar tidak bervariasi antar kabupaten/kota. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan revisi juknis rekomendasi perlindungan LP2B yang dikeluarkan Direktorat Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan. (4) penetapan luas LP2B perlu didukung data spasial yang dilengkapi *by name by address*, hal ini untuk memudahkan dalam penerapan hak dan kewajiban pemilik/penggarap lahan LP2B serta penegakan sanksi hukum sesuai ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2009. (5) penguatan tugas dan fungsi Forum Tata Ruang Daerah, selain untuk membantu pimpinan daerah dalam pemberian izin usaha yang berbasis lahan yang sesuai ketentuan berlaku, juga dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. (6) mendorong sosialisasi dapat dilakukan secara masif, Direktorat lahan, Ditjen PSP perlu bekerja sama dengan BPPSDMP dalam menyiapkan materi sosialisasi tentang LP2B yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait di kabupaten/kota.

f. Rumusan Program Tindak Lanjut Implementasi Deklarasi G-20 Terkait Agrifood Systems

Tiga isu utama yang diangkat oleh Presidensi Indonesia dalam kelompok kerja pertanian atau Agriculture Working Group (AWG) adalah 1) *Promoting Resilient and Sustainable Agriculture and Food Systems*; 2) *Promoting an Open, Fair, Predictable, Transparent, and Non-Discriminatory Agricultural Trade to Ensure Food Availability and Affordability for All* dan 3) *Innovative Agri-preneurship through Digital Agriculture to Improve Farmers' Livelihood in Rural Areas*. Ketiga isu tersebut dijabarkan dalam 21 paragraf terkait upaya negara anggota G-20 menyeimbangkan produksi dan perdagangan pangan yang bersifat inklusif bagi seluruh masyarakat di dunia.

Isu yang diusulkan oleh Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab kelompok kerja pertanian juga merefleksikan pembangunan sektor pertanian khususnya pangan dengan mengedepankan aspek resiliensi (daya tahan) dan keberlanjutan (*sustainability*). Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai rekomendasi yang telah disepakati dan menerjemahkannya dalam bentuk program kerja lintas Eselon 1 lingkup Kementan. Proses penyusunan naskah *joint communique* dilakukan sepenuhnya oleh tim substansi yang diwakili oleh tim pakar dengan keahlian dan pengalaman terkait tiga tema yang diusung oleh kelompok kerja pertanian. Berdasarkan kondisi diatas, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai institusi yang “membidani” naskah deklarasi kelompok kerja pertanian, berupaya untuk mengidentifikasi dan menelisik “rumusan program” yang telah direncanakan oleh masing-masing Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan kesesuaiannya dengan hasil deklarasi.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait rumusan program tindak lanjut implementasi deklarasi G-20 terkait *agri-food system*, sedangkan secara khusus tujuan kajian ini yaitu: (1) mengidentifikasi isu *agri-food systems* yang diangkat dalam deklarasi G-20 dan unit kerja teknis terkait yang terlibat; (2) mengidentifikasi tingkat “*awareness*” dan/atau “implementasi” dari isu *agri-food systems* di masing-masing unit kerja teknis; (3) mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan rencana dan/atau pelaksanaan program; dan (4) menyusun rekomendasi terkait rumusan program yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut deklarasi G-20.

Mekanisme untuk mengukur langkah tindak lanjut G-20 dimulai dengan mendata daftar isu sistem pertanian pangan yang tertuang dalam *chairs' summary* dan mengidentifikasi instansi pelaksana yang bertanggung jawab dalam melakukan implementasi (usulan kegiatan, program atau kebijakan), kemudian menyesuaikan narasi dalam *issue note* dengan kegiatan/program/rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Untuk mengidentifikasi tingkat “*awareness*” dan kendala dan hambatan yang dihadapi dilakukan wawancara dengan pimpinan di Ditjen teknis lingkup Kementan.

Lokasi kajian ini yaitu Kementerian Pertanian (Kementan): Biro Perencanaan; Direktorat Jenderal Teknis mencakup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Data yang dibutuhkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Ditjen teknis lingkup Kementerian Pertanian dan Bapanas. Sedangkan data sekunder melalui dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, serta dokumen terkait pelaksanaan G-20. Rentang waktu data yang dianalisa yaitu sebelum adanya kegiatan *G20 Presidency*

of Indonesia sampai tahun 2021, saat pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, hingga pasca pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Semua data dalam kajian ini dianalisis secara deskriptif.

Tingkat "*awareness*" atau kesadaran serta implementasi isu agri-food systems di masing-masing unit kerja teknis beragam. Kementerian Pertanian (Kementan): Tingkat kesadaran rendah karena kurangnya sosialisasi hasil deklarasi G-20 dan kurangnya mandat khusus untuk tindak lanjut. Beberapa program seperti pertanian organik dan teknologi pertanian berkelanjutan terkait dengan isu-isu dalam deklarasi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP): Terlibat dalam kegiatan yang mendukung isu-isu dalam deklarasi, terutama dalam pengembangan SDM pertanian. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana (PSP): Banyak kegiatan yang sejalan dengan deklarasi, terutama dalam pengelolaan air irigasi dan fasilitasi pembiayaan pertanian. Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH): Tingkat kesadaran cukup baik dan beberapa poin dalam deklarasi telah ditindaklanjuti, terutama dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR) dan pengawasan kesehatan hewan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: kesadaran rendah, tetapi beberapa program mendukung isu-isu dalam deklarasi, seperti pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produksi. Direktorat Jenderal Hortikultura: kesadaran rendah, tetapi kegiatan mendukung isu-isu dalam deklarasi, terutama dalam pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produksi. Badan Karantina Pertanian: berperan penting dalam mengawasi dan melaksanakan komitmen Indonesia terhadap Deklarasi G-20, terutama dalam keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan fasilitasi perdagangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas): kesadaran masih rendah, tetapi beberapa program mendukung implementasi deklarasi, seperti program selamatkan pangan dan pengembangan industri pangan berkelanjutan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program meliputi minimnya komunikasi dengan Eselon 1 teknis, sifat "*non-binding*" deklarasi G-20, kurangnya standar operasional pasca pertemuan tingkat Menteri, dan kurangnya lembaga koordinasi khusus (sekretariat G-20) karena kendala pendanaan yang besar.

Isu *food loss and waste* menjadi perhatian utama negara anggota G-20. Diperlukan kerja sama regional untuk mengakselerasi implementasi program terkait *food loss and waste* serta metoda pengukurannya. Komitmen masing-masing negara untuk menyediakan data dan informasi serta adanya kerja sama untuk mengharmonisasikan metoda pengukuran *food loss and waste* menjadi target yang harus dimonitor di setiap pertemuan kelompok kerja pertanian. Komitmen penyediaan data juga dituntut oleh AMIS yang menjadi *platform* database dan informasi negara-negara G-20.

Digitalisasi pertanian akan menjadi isu atau topik yang akan mewarnai diskusi kelompok kerja pertanian, kolaborasi dibidang ini sangat didorong dan isu perubahan iklim menjadi salah satu arena kerjasama yang diharapkan dapat

diagendakan didalam pertemuan dan diakomodir dalam program kementerian pertanian.

Percepatan transformasi dan inovasi digital di sektor pertanian termasuk peningkatan akses petani terhadap teknologi dan metode penyuluhan berbasis digital. Kemudian, memanfaatkan digitalisasi pertanian dalam berbagai kolaborasi untuk meningkatkan konektivitas, keterjangkauan, kapasitas petani dan pemangku kepentingan terkait.

g. Analisis Kelayakan Usaha Tani Berbagai Komoditas Pertanian

Usaha tani pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi dimana didalamnya terdapat pengelolaan sumber daya dalam rangka menghasilkan output yang diharapkan. Dengan pemahaman tersebut, maka dalam usaha tani selalu terkandung pertimbangan manfaat yang akan didapat dan biaya yang harus dikeluarkan. Informasi tentang kelayakan usaha tani komoditas pertanian relatif banyak, baik yang dipublikasikan oleh institusi formal maupun non formal. Persoalan yang sering timbul adalah umumnya informasi tersebut terbatas pada besaran kelayakan usaha tani, sangat beragam karena tergantung lokasi dan waktu, serta informasi yang ada dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini. Adanya analisis kelayakan usaha tani yang mencoba menjelaskan dinamika struktur ongkos yang ada dan menghubungkan dengan berbagai faktor yang berkaitan memungkinkan pimpinan memiliki informasi yang lebih komprehensif dalam pengambilan kebijakan terkait perencanaan pengembangan komoditas.

Secara umum, analisis ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan terkait kelayakan usaha tani berbagai komoditas pertanian. Secara khusus tujuan analisis ini yaitu: 1). mengetahui struktur biaya, pendapatan, dan keuntungan usaha tani beberapa komoditas pertanian; 2) mengetahui tingkat kelayakan usaha tani beberapa komoditas pertanian; dan 3) merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan beberapa komoditas pertanian. Pendekatan analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis data kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif pada kajian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan input produksi, biaya produksi, penerimaan, pendapatan, dan kelayakan usaha tani. Hasil analisis kuantitatif yang dilakukan kemudian dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis untuk menjawab tujuan 1 dan 2 berkaitan struktur biaya, pendapatan usaha tani, keuntungan dan tingkat kelayakan usaha tani adalah analisis finansial berupa analisis pendapatan dan R/C ratio . Tujuan (3) merupakan sintesa hasil dari tujuan (1) dan (2).

Kelayakan usaha tani dengan pendekatan aspek finansial menunjukkan bahwa tingkat kelayakan usaha tani sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan umumnya bersifat spesifik. Kriteria bahwa usaha tersebut dikatakan “layak” mempunyai rentang nilai yang lebar sehingga tidak serta merta menunjukkan

bahwa usaha tani tersebut akan terus menguntungkan, namun perlu dilihat lebih dalam bagaimana dinamika struktur biaya dan penerimaan.

Berdasarkan kriteria finansial analisis pendapatan dan R/C ratio, usaha tani padi, bawang merah, tebu, kopi dapat dikatakan layak dilakukan karena penerimaan dari usaha tani tersebut lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (nilai R/C ratio > 1). Agroekosistem memberikan pengaruh besar terhadap hasil kelayakan usaha tani. Karakteristik agroekosistem akan tercermin dalam perilaku masyarakat dalam pengelolaan usaha tani. Dinamika harga input dan output, serta tingkat efisiensi teknis masing-masing usaha tani juga sangat menentukan nilai kelayakan usaha tani.

Pada usaha tani padi, porsi biaya tenaga kerja merupakan porsi terbesar dari total biaya usaha tani (kecuali untuk agroekosistem sawah pasang surut). Pada usaha tani bawang merah, biaya benih merupakan porsi terbesar dari total biaya usaha tani. Porsi biaya terbesar untuk usaha tani tebu pada lahan sistem keprasan adalah sewa lahan, sementara porsi biaya terbesar usaha tani kopi sangat tergantung umur tanaman. Faktor-faktor tersebut penting diperhatikan dalam penyusunan strategi pengembangan komoditas agar kebijakan yang diprogramkan dapat menjadi titik ungkit peningkatan produksi dan pendapatan petani.

Dalam penentuan strategi pengembangan komoditas, hasil analisis kelayakan usaha perlu dimaknai hanya sebagai pendekatan perhitungan matematis yang memudahkan dalam menilai suatu usaha mengingat komponen biaya usaha tani selalu mengalami dinamika dan umumnya sangat spesifik. Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika komponen biaya dan penerimaan usaha tani serta daya dukung lingkungan tumbuh komoditas adalah kunci sukses dalam perencanaan pengembangan komoditas. Komponen kegiatan yang mempunyai porsi terbesar dalam biaya produksi atau komponen kegiatan yang mampu mendorong efisiensi atau justru yang menjadi faktor pembatas produksi umumnya dipengaruhi dan mempengaruhi komponen lainnya. Implikasi dari kondisi tersebut adalah bahwa dalam merancang kebijakan pengembangan komoditas, pengambil kebijakan harus menyiapkan kebijakan pendukungnya sehingga terdapat sinergitas antar kebijakan.

h. Antisipasi Dampak El-Nino terhadap Produksi Komoditas Pertanian Indonesia

Perubahan iklim berimplikasi sangat serius dan merugikan pada hampir keseluruhan aktivitas ekonomi. Sektor pertanian adalah yang paling rawan terhadap perubahan iklim (meskipun sektor ini juga berpotensi sebagai andalan aksi mitigasinya) dan pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian bersifat multidimensional. Perubahan iklim yang kini terjadi (transisi dari La Nina ke EL Nino) sebenarnya masih merupakan fase awal dari suatu era jangka panjang. Sehingga patut diduga, kejadian El Nino akan terjadi di tahun 2024-2030. Oleh karena itu perlu pengkajian dan pemetaan sejauh mana dampak perubahan iklim (fenomena El Nino) yang akan terjadi di tahun 2024-2030, agar dapat disusun

langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai persoalan yang akan muncul sebagai efek domino dari perubahan iklim. Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dampak perubahan iklim yang akan terjadi dalam tahun 2024-2030, terhadap produksi komoditas pertanian pangan; (2) menganalisis dampak perubahan iklim terhadap Luas Panen/Populasi, Produktivitas, dan Produksi komoditas pangan nasional; dan (3) merumuskan alternatif kebijakan antisipasi dampak negatif perubahan iklim terhadap produksi pertanian dengan sasaran mendukung program peningkatan produksi pangan nasional. Kajian ini menggunakan metode analisis multimarket model yang dikembangkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Kajian mencakup 22 komoditas pertanian pangan yaitu 7 komoditas dari subsektor tanaman pangan, 5 komoditas perkebunan pangan, 5 komoditas peternakan, 5 komoditas hortikultura, dan satu komoditas gandum.

Dampak fenomena iklim El Nino pada 2024-2030 diprediksi relatif lebih buruk jika dibandingkan fenomena iklim La Nina, apalagi jika dibandingkan fenomena iklim normal. Data hasil prediksi pada periode 2024-2030 dalam kondisi El Nino produksi 2024-2030 diperkirakan meningkat antara 0.04% hingga 2.70% per tahun dibanding rata-rata produksi 2019-2021. Disamping pada produksi, dampak yang lebih buruk juga terjadi untuk konsumsi, ekspor impor, stok akhir tahun, *self-sufficiency ratio*, harga riil konsumen dan produsen, konsumsi dan harga input pertanian, penyerapan tenaga kerja, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, dan pendapatan, sebagai dampak ikut dari dampak El Nino terhadap produksi dari: (1) sisi produksi, tinggi rendahnya peningkatan tergantung dari daya adaptasi tanaman dan teknologi pakan ternak, dimana agroekosistem tanaman dan ternak tersebut dibudidayakan. (2) segi dampak ikutannya, akibat El Nino, penurunan pasokan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di pasar global. Akibatnya dampak ikutan yang terjadi juga sangat penting untuk diantisipasi. (3) segi wilayah dan rumah tangga, wilayah Pulau Jawa lebih terdampak jika dibandingkan luar Pulau Jawa, dimana kelompok rumah tangga perkotaan berpendapatan tinggi, kelompok berpendapatan rendah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, lebih terdampak dibandingkan kelompok rumah tangga lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan luas areal panen dan populasi ternak lebih tinggi, jika dibandingkan peningkatan produktivitas dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan hasil kajian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif El Nino pada sektor pertanian khususnya pangan, pengarus utamaan (*mainstreaming*) dalam kebijakan program dan kegiatan pertanian sangat mendesak. Prioritasnya perlu diarahkan pada jangka pendek, menengah, dan panjang melalui: (a) perluasan lahan produksi pangan dan populasi ternak disertai dengan pertumbuhan peningkatan produktivitas dengan memperhatikan kesesuaian aspek teknik dan teknologis, sosial dan kelembagaan, ekonomi, dan regulasi; (b) menempatkan program dan kegiatan adaptasi disertai dengan

mitigasi; (c) membangun sentra-sentra baru populasi peternakan khususnya di luar Pulau Jawa; (d) peningkatan kapasitas produksi pupuk an organik, pupuk organik, dan pakan ternak baik konsentrat maupun hijauan, (2) membangun kapasitas adaptasi petani dan unsur pemerintahan hingga level daerah melalui perbaikan kinerja pengelolaan air untuk pertanian; aplikasi pola tanam adaptif perubahan iklim; peningkatan partisipasi petani dalam pemanfaatan benih dan bibit ternak unggul tahan cekaman lingkungan seperti banjir, dan atau kekeringan, dan atau gangguan OPT; aplikasi pemupukan berimbang dan peningkatan penggunaan pupuk organik, perbaikan infrastruktur irigasi dan infrastruktur usaha baik fisik dan non fisik, (3) mengingat efektivitas aksi adaptasi dan mitigasi terletak pada partisipasi aktif petani sedangkan adaptasi dan mitigasi adalah suatu proses dinamis berjangka panjang maka kebijakan dan program peningkatan kapasitas adaptasi harus sistemik, sistematis, dan terintegrasi dalam strategi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang secara konsisten, (4) dampak El Nino bersifat multidimensi, untuk itu penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tidak hanya berada dipundak Kementerian pertanian, tetapi juga K/L lain, BUMN, NGO, Swasta dan Masyarakat, (5) variasi komoditas, wilayah, agroekosistem, dan pelaku produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi perlu dirinci peran dan kontribusinya pada setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh multipihak, dan (6) mengingat konstelasi nilai yang tercakup dalam sistem, adaptasi, dan mitigasi bersifat holistik, lintas sektor, dan memerlukan pendekatan lintas disiplin maka sistem koordinasi dan integrasi harus dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

i. *Dinamika Indikator Pencapaian Kemandirian Pangan Indonesia*

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia hingga mencapai 278 juta jiwa pada tahun 2023 diprediksi akan mencapai 294 juta jiwa di tahun 2031 dan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemenuhan pangan yaitu pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dibanding pertumbuhan penyediaannya. Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan produksi nasional akan mengakibatkan perlu adanya pasokan pangan dari impor. Salah satu arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangan suatu negara menjadi sangat penting karena ada guncangan-guncangan (*shocks*), baik pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial, politik, dan kesehatan, yang harus siap dihadapi agar ketersediaan pangan tetap terpenuhi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian pangan suatu negara menjadi hal yang sangat penting karena guncangan dapat terjadi secara tiba tiba-sehingga perlu langkahantisipasi.

Tujuan dari kajian ini yaitu: (1) menganalisis tingkat kemandirian pangan Indonesia; (2) membandingkan tingkat kemandirian pangan negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan G-20 yang memiliki skor *Global Food Security*

Index (GFSI) setara dengan Indonesia; (3) mengidentifikasi kemandirian pangan di wilayah sentra dan nonsentra produksi di Indonesia; dan (4) menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka pencapaian kemandirian pangan Indonesia. Kajian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi data *food balance sheet*/FBS (1961-2021) dan literatur lainnya. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan instansi terkait maupun para informan kunci di pusat dan daerah, sampel kajian di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam pengukuran tingkat kemandirian pangan digunakan dua indikator yaitu (1) ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada produksi pangan domestik (tingkat swasembada); dan (2) ketergantungan ketersediaan pangan nasional pada pangan impor dan atau net impor (tingkat ketergantungan impor).

Hasil dan pembahasan berdasarkan tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut. (1) perkembangan tingkat kemandirian pangan Indonesia di antaranya (i) tingkat kemandirian pangan Indonesia semakin menurun; (ii) pangsa penyediaan sumber energi dan protein masih bergantung pada beras dengan tren yang menurun; (iii) penyediaan pangan sumber energi yang berasal dari gula meningkat; (iv) penyediaan pangan sumber protein hewani didominasi oleh daging ayam, telur, dan ikan; (v) selama periode tahun 1961-2021 penyediaan komoditas beras, jagung, daging ayam, telur ayam, tebu, dan minyak sawit dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, (2) perbandingan tingkat kemandirian pangan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dan G-20 menunjukkan (i) negara-negara ASEAN yang memiliki tingkat kemandirian pangan yang tinggi adalah Laos, Kamboja, dan Myanmar; (ii) Thailand memiliki tingkat penyediaan pangan dari produksi dalam negeri tertinggi; (iii) tingkat kemandirian Indonesia setara dengan Filipina; (iv) Australia memiliki tingkat kemandirian pangan yang paling tinggi karena tingkat penyediaan pangan dari produksi dalam negeri lebih dari 100% dan tingkat ketergantungan impornya rendah, dan (3) terkait kemandirian pangan daerah menunjukkan bahwa penyediaan pangan Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dari luar wilayah serta Provinsi Jawa Barat berasal dari dalam dan luar wilayah.

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian ini yaitu: (1) upaya mencapai tingkat kemandirian pangan dilakukan dengan (i) peningkatan produksi dalam negeri; (ii) diversifikasi produksi melalui pengefektifan program pangan lokal dan program pengembangan budi daya komoditas peternakan; (iii) mendorong pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA); dan (iv) mendorong diversifikasi konsumsi yang disertai dengan hilirisasi produk pangan lokal, (2) berfokus pada pencapaian ketahanan pangan, khususnya untuk beberapa komoditas yang memang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri dengan: (i) memperkuat kerja sama perdagangan pangan regional untuk menekan biaya distribusi; (ii) memperlancar arus perdagangan komoditas pangan utama; (iii) mendorong masing-masing negara ASEAN untuk menaati perjanjian perdagangan bebas dan menurunkan tarif bea masuk secara bertahap; (v)

mengefektifkan keanggotaan Indonesia dengan mendorong aktivitas ekspor dan impor, dan (3) meningkatkan akses pangan yang baik dengan (i) memperbanyak simpul distribusi pangan; (ii) memperkuat peran BUMD pangan; (iii) membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan daya beli masyarakat; (iv) meningkatkan efektifitas program gelar pangan murah; serta (v) meningkatkan perdagangan antar wilayah untuk menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan menjamin akses pangan.

j. Analisis Efektivitas Program Pembangunan Pertanian

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Pertanian memiliki 12 indikator dari dua Program Prioritas, masing-masing 10 indikator dari program prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dua indikator dari Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian. Apabila dicermati lebih jauh, rumusan indikator kinerja program dan kegiatan Kementerian Pertanian tidak pada level yang sama, sebagian indikator merupakan dampak, sebagian indikator masih output atau outcome. Pada sisi lain, kinerja nasional sektor pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Selain itu, kinerja sektor pertanian juga merupakan resultan dari kontribusi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung berupa program dari kementerian/lembaga lain, swasta, masyarakat, termasuk faktor lingkungan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan saat ini belum mampu mengukur efektivitas program/kegiatan secara komprehensif. Penyusunan pedoman pengukuran efektivitas program/kegiatan Kementerian Pertanian ini untuk memberikan panduan menyusun indikator output, outcome, dan dampak dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur efektivitas program/kegiatan dan kontribusinya terhadap kinerja sektor pertanian, sekaligus menunjukkan akuntabilitas kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, analisis efektivitas program pembangunan pertanian bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi program, sasaran dan indikator pengukuran efektivitas kegiatan direktorat teknis Kementerian Pertanian; 2) membangun indikator pengukuran efektivitas program pembangunan pertanian; 3) mengembangkan instrumen pengukuran dan analisis efektivitas program; dan 4) menyusun pedoman pengukuran efektivitas kebijakan pembangunan pertanian. Kerangka kerja pengukuran efektivitas program dan kegiatan Kementerian Pertanian ini menggunakan pendekatan *Cross Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) yang diadaptasi menjadi proses identifikasi indikator dan metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan. CRISP-DM merupakan salah satu standar pendekatan yang paling banyak digunakan

untuk menghasilkan *data driven decision making*. Model proses CRISP-DM memberikan gambaran tentang siklus hidup proyek *data mining*. CRISP-DM terdiri atas enam tahapan, yaitu *Business understanding, Data understanding, Data preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment*.

Terdapat kekurangselarasan antara rumusan indikator kinerja pembangunan pertanian nasional dengan indikator kinerja dan program atau kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian. Hal ini teridentifikasi baik pada rumusan indikator pada RPJMN, Renstra Kementerian, maupun dalam menuangkan pada kegiatan dan indikator kinerja Eselon 1. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kurang tepatnya dalam mengukur kinerja program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.

Kurang setaraan rumusan indikator kinerja dan *cascading* yang kurang proporsional antar Eselon 1. Rumusan indikator kinerja tercampur antara indikator output, outcome dan dampak serta kurang sesuaian dalam distribusi pencapaian sasaran kinerja Kementerian ke Eselon 1.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan masih menitik beratkan pada pencapaian output kegiatan tahun berjalan. Evaluasi pada level outcome dan dampak dilakukan secara parsial dengan memfokuskan pada program/kegiatan tertentu. Hal tersebut menyebabkan efektivitas kegiatan dan program belum terukur dengan baik. Kegiatan evaluasi yang dilakukan antara Eselon 1 beragam baik metodenya.

Penyelarasan rumusan sasaran, tujuan pembangunan, rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja dari RPJMN sampai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap direktorat di setiap Eselon 1. Penyempurnaan rumusan indikator kinerja di tiap Eselon 1 didahului dengan penyempurnaan *cascading* yang proporsional dengan tugas dan fungsi tiap Eselon 1 dan kesetaraan indikator dilihat dari output, outcome, dan dampak. Penetapan pedoman dalam melakukan evaluasi dan pengukuran efektivitas program kegiatan untuk semua program dan kegiatan yang dilakukan di Kementerian Pertanian. Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu menjadi prioritas dan dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu dibawah koordinasi Seketeriat Jenderal. Penyempurnaan perencanaan program/kegiatan dengan memasukkan kewajiban adanya data awal (*baseline*), rumusan output, outcome dan manfaat, dan pelaporan pelaksanaan, pemanfaatan, dan manfaat dari program/kegiatan yang dilaksanakan.

k. Strategi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk: Transformasi Kebijakan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung

Salah satu unsur esensial dalam peningkatan produksi pertanian selain dari benih adalah pupuk. Berbagai upaya perbaikan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan efektivitas pemberian subsidi pupuk. Terbitnya Permentan No. 10 Tahun 2022 menjadi babak baru dalam pemberian

subsidi pupuk. Subsidi pupuk yang semula diberikan untuk semua petani tanpa ada pembatasan komoditas, kini hanya bisa diberikan kepada petani yang menanam sembilan komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Secara umum, tujuan dari kajian ini adalah untuk menyusun tata kelola kebijakan subsidi pupuk langsung. Seara rinci tujuan dari kajian ini yaitu, (1) menganalisis dinamika kebijakan subsidi pupuk di Indonesia, (2) menganalisis kebijakan subsidi pupuk langsung di negara lain, dan (3) merumuskan tata kelola subsidi pupuk langsung yang efektif.

Pada periode 2010-2023, pemerintah menetapkan regulasi terkait pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011. Peraturan tersebut menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Tujuan dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 adalah untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan jenis pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian. Jenis pupuk bersubsidi adalah pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Pengawasan yang dilakukan pada pupuk bersubsidi adalah pengawasan pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, Harga Eceran Tertinggi (HET), serta waktu pengadaan dan penyaluran. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian tahun anggaran 2023 diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2023. Regulasi tersebut bertujuan untuk menetapkan rincian alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Jenis pupuk bersubsidi pada tahun ini masih sama dengan jenis pupuk yang ditetapkan melalui Permentan No. 10 Tahun 2022. Pada Kepmentan ini, HET pupuk pun tidak berubah dimana urea tercatat sebesar Rp2.250/kg, pupuk NPK Rp2.300/kg dan pupuk NPK untuk kakao Rp3.300/kg.

Outcome kebijakan subsidi pupuk adalah peningkatan produktivitas pertanian dan *impact* yang diharapkan adalah mendukung ketahanan pangan. Berdasarkan hasil regresi data panel dan studi literatur dapat disimpulkan bahwa *outcome* dan *impact* tersebut tercapai. Perubahan kebijakan menjadi BLP diharapkan tetap dapat (minimal) mempertahankan tingkat *outcome* dan *impact* tersebut. Terdapat perbedaan yang mendasar antara subsidi harga dengan BLP. Pada subsidi harga petani “tidak menerima uang”, kecuali hak untuk membeli pupuk bersubsidi; namun pada BLP, petani “menerima uang” yang digunakan untuk membeli pupuk. Dari aspek psikologi petani, kebijakan BLP dapat memicu kecemburuan petani yang tidak menerima BLP. Untuk itu, kriteria petani penerima, besaran nilai BLP yang diterima petani, dan waktu pemberian BLP; harus ditetapkan secara cermat dengan mendasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan serta dampaknya terhadap peningkatan produktivitas. BUMN Pupuk masih menjadi penyedia utama pupuk di pasar domestik pada masa transisi (1-2 tahun pertama setelah kebijakan bantuan langsung pupuk ditetapkan).

Beberapa negara produsen pertanian memberikan subsidi langsung pupuk kepada petani. Setiap negara memiliki motif yang beragam dalam memberikan subsidi pupuk. Pada negara berkembang tujuan subsidi pupuk diantaranya

meningkatkan produksi pertanian, menjaga stabilitas harga pangan, dan mengentaskan kemiskinan, namun pada negara maju tujuan subsidi pupuk adalah untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian yang ramah lingkungan. Mekanisme penyaluran dan besaran subsidi beragam antar negara dan umumnya didasarkan pada jumlah dan jenis sasaran subsidi. Hasil simulasi perhitungan kebutuhan anggaran untuk BLP dengan mendasarkan pada kebutuhan pupuk petani gurem (luas penguasaan lahan di bawah 0,5 ha), pemerintah perlu menyediakan anggaran subsidi yang lebih besar dibanding alokasi anggaran subsidi pupuk saat ini.

Untuk menyusun rencana BLP yang lebih operasional dan optimal dalam pengawasan implementasinya; dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan berbagai alternatif yang telah diuraikan di atas, disimpulkan beberapa instrumen perencanaan yang paling optimal dapat digunakan yaitu, (1) data SIMLUHTAN dan e-RDKK yang telah dipadu-padankan dengan NIK dapat digunakan sebagai sumber data utama untuk menetapkan petani penerima BLP, (2) status petani penerima BLP adalah petani kecil dengan batasan luas perusahaan lahan tertentu dan tidak dibatasi komoditas yang diusahakan, (3) subsidi ditentukan awal tahun, bersifat flat, dan sama untuk semua petani (tidak dibedakan antar jenis komoditas). Basis perhitungan dengan menggunakan kebutuhan pupuk petani gurem (0,5 ha) untuk komoditas padi (justifikasinya karena jumlah petaninya paling banyak dan komoditas strategis), dan (4) dana BLP ditransfer ke VA petani dalam beberapa kali pembayaran. Pilihannya dapat berdasarkan semester (dua kali per tahun) atau kuartal (tiga kali per tahun) atau triwulan (empat kali per tahun).

Berdasarkan kajian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan antara lain, (1) sebagai landasan pelaksanaan ujicoba perubahan subsidi pupuk, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian perlu menyusun pedoman pelaksanaan uji coba BLP, yang memuat aspek perencanaan, penyaluran, pengawasan, monitoring dan evaluasi, organisasi, serta pelaporan. Pedoman tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian, (2) Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggaran yang dapat dialokasikan untuk BLP (sama dengan alokasi subsidi pupuk saat ini atau dapat bertambah sesuai dengan kriteria petani penerima yang nantinya disepakati). Kepastian fleksibilitas penyediaan anggaran BLP ini sangat penting karena berdasarkan simulasi perhitungan yang paling sederhana berbasis petani gurem, diperlukan anggaran subsidi yang lebih besar dibanding alokasi subsidi pupuk saat ini, dan (3) untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan uji coba BLP dengan baik, maka diperlukan survei dasar (baseline survey) di lokasi uji coba (Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Selatan) untuk dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan kebijakan subsidi harga dengan BLP.

VI. KERJA SAMA DAN LAYANAN HASIL ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

6.1. Kerja Sama

Kegiatan kerja sama kajian yang dilakukan PSEKP pada TA 2023 dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sumber dana, yaitu kegiatan kerja sama yang dananya bersumber dari hibah luar negeri dan yang dananya bersumber dari lembaga atau institusi dalam negeri. Ada 5 (lima) kegiatan kerja sama yang dananya bersumber dari hibah luar negeri, yaitu PSEKP bekerja sama dengan lembaga The Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) dan International Food Policy Research Institute (IFPRI). Sementara ada satu kegiatan kerja sama yang dananya bersumber dari dalam negeri, yaitu PSEKP bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Seluruh kegiatan kerja sama ini berstatus lintas-tahun (*multiyears*), yang secara rinci informasi disajikan pada Tabel 24.

a. *Improving Milk Supply Competitiveness a Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (IndoDairy)*

Kegiatan penelitian/kajian ini merupakan kerja sama antara Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian dengan *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)*. Sumber dana kegiatan ini berasal dari hibah yang diberikan ACIAR. Dalam kegiatan ini ACIAR juga menggandeng Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) Kementerian Pertanian dan IPB University. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai tahun 2016 dan selesai pada tanggal 31 Maret 2022. Selanjutnya, durasi kerjasama ini diperpanjang hingga tanggal 31 Januari 2023 untuk penyelesaian administrasi.

Pada awalnya kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama periode 2016-2020, namun dalam perjalanannya muncul pandemic Covid-19 sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan dilakukan penyesuaian jadwal, hal ini berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian kegiatan secara keseluruhan. Tujuan umum kegiatan IndoDairy yang tertuang dalam proposal adalah meningkatkan produksi susu (kuantitas dan kualitas) sebanyak 25% dan pendapatan paling sedikit 3.000 peternak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020. Terkait tujuan tersebut, PSEKP bertanggung jawab pada penyediaan data yang dilakukan melalui kegiatan baseline survey di awal kegiatan (tahun 2017) dan kegiatan endline survey pada akhir periode kegiatan (tahun 2021).

Target kegiatan IndoDairy secara umum adalah meningkatkan produksi susu (kuantitas dan kualitas) sebanyak 25% dan pendapatan minimal 3000 peternak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020. Target ini sulit dicapai karena ada beberapa kondisi yang kurang kondusif untuk pencapaian target ini, diantaranya munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak

Tabel 24. Kegiatan kerja sama kajian di PSEKP TA 2023

Nama Donor	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	International Food Policy Research Institute (IFPRI)/ACIAR	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Status Dana	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Swakelola dari BPDPKS
Judul Kegiatan	Improving Milk Supply	Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (IndoDairy)	Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region (IndoAWM)	Innovative & Inclusive Agricultural Value Chain Financing (IndoFinance)	Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan (IndoTransform)	Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan (IndoTransform)	Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terhadap Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat
UPT Pelaksana	PSEKP	PSEKP	PSEKP	PSEKP	PSEKP	PSEKP	PSEKP
Nama Ketua Tim	Prof. Dr. Erwidodo	Prof. Dr. Erwidodo	Prof. Dr. Handewi P. Saliem	Prof. Dr. Sahat M. Pasaribu	Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto	Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto	Dr. Adi Setiyanto
Tahun Mulai	2016	2018	2018	2019	2020	2020	2022
Tahun Berakhir	2022	2023	2024	2023	2023	2023	2024
Nilai Hibah Register	AUD 116.012	AUD 253.743	AUD 136,448	AUD 270.000	AUD 93.602	AUD 93.602	Rp6.396.432.000,00
Nomor Register	2YYMH8ZA	2JNEH3FA	2QKBIPA	2DCBX28A	2NX53DSA	2NX53DSA	-

cukup signifikan pada keberlangsungan usaha ternak sapi perah. Selain itu, skala usaha yang relatif kecil per rumah tangga peternak mengakibatkan usaha ternak sapi perah kurang menguntungkan bagi peternak. Kebijakan yang dibutuhkan peternak, harga pakan dan harga susu yang menguntungkan peternak, belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Investasi awal untuk usaha ternak sapi perah yang relatif tinggi juga menjadi kendala dalam pengembangan ternak sapi perah mengingat keterbatasan modal yang dimiliki peternak.

b. Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscapes (IndoGreen)

Kegiatan kajian ini merupakan kerja sama antara PSEKP dan ACIAR sebagai donor hibah. Dalam pelaksanaannya, ACIAR juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga yaitu Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); *Internasional Center for Agro-Forestry (ICRAF)*; *University of Adelaide*; dan *University of New England*, Australia. Kegiatan IndoGreen telah dilaksanakan sejak tanggal 26 Maret 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, namun diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2023 untuk penyelesaian laporan akhir dan administrasi penutupan kegiatan.

Tujuan kegiatan penelitian/kajian IndoGreen adalah (1) mengestimasi dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari Kebijakan nasional dan local di tiga dataran tinggi, dan (2) menganalisis *trade-off* dan konsekuensi dari Kebijakan level nasional dan local terhadap kesejahteraan dan lingkungan. Cakupan kegiatan dalam kegiatan ini antara lain melakukan review Kebijakan dan program terkait penggunaan lahan dataran tinggi dan kelembagaan sosial ekonomi, survei lapangan, workshop/FGD, mid-term review, dan evaluasi dampak.

Sebagai tahap akhir kegiatan Indogreen, pada tahun 2023 tim melakukan *policy dialog*, dan pelatihan kopimod. *Policy dialog* dilakukan untuk menggali masukan dari para stakeholder terkait hasil kegiatan Indogreen. Berdasarkan hasil *policy dialog* perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut terkait usahatani kopi yang diusulkan sebagai alternatif dibudidayakan untuk perbaikan ekonomi sekaligus lingkungan. Pelatihan kopimod dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari *policy dialog* yang membahas mengenai penggunaan lahan alternatif dan pengujiannya, meliputi pengujian jika terjadi perubahan harga output, pengujian teknik pemanenan, pengujian penanaman Kembali pohon atau buah.

Selain melakukan dua kegiatan tersebut, tim juga melakukan kegiatan *workshop end of project review*. Kegiatan ini melibatkan anggota tim dari Australia, PSEKP, ICRAF, WWF, tim review, dan advisory committee. Workshop ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap capaian proyek Indogreen mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan dalam proposal.

c. Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region (IndoAWM)

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama penelitian antara PSEKP dengan ACIAR sebagai donor hibah. Dalam pelaksanaannya ACIAR juga bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbanghorti) yang selanjutnya menunjuk Balai Penelitian Buah (Balitbu) sebagai pelaksana kegiatannya, Direktorat Perlindungan Hortikultura (Ditlinhorti), Universitas Gajah Mada, dan *Department of Agriculture and Fisheries* (Queensland). Kontrak telah ditandatangani oleh PSEKP pada bulan November 2018. Semula kegiatan IndoAWM ini akan dilaksanakan pada periode 2018-2023, namun dalam perjalanannya terjadi perubahan durasi kegiatan menjadi 30 Juni 2024, karena ada tambahan kegiatan untuk mengkaji terkait gender.

Tujuan kegiatan IndoAWM adalah menganalisis dampak sosial ekonomi terkait penerapan teknologi Wide Area Management (WAM) yang diterapkan pada budidaya mangga. Lokasi kegiatan mencakup Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Sasaran kegiatan adalah para petani mangga di dua kabupaten tersebut. Kegiatan yang dilakukan antara lain survei lapang, memberikan pelatihan kepada petani mangga tentang pentingnya budidaya mangga yang baik untuk menghasilkan mangga berkualitas, menganalisis dampak sosial ekonomi, melakukan sosialisasi dan pelatihan, dan memberikan pendampingan kepada petani mangga terkait pemasaran mangga ke pasar modern.

Kegiatan Indo AWM pada tahun 2023 yaitu re-survei dan survei kajian gender. Re-survei dilaksanakan pada bulan Maret 2023 berlokasi di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Re-survei ini berhasil dilakukan pada 70% responden dengan temuan terjadinya penurunan pendapatan karena ada beberapa petani tidak panen, faktor cuaca menjadi pemicu kegagalan panen sehingga program AWM bukan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, survei kajian gender mulai dilakukan pada bulan Juli 2023 di Kabupaten Indramayu dan Cirebon dengan metode FGD.

Disamping dua kegiatan diatas, pada tahun 2023 tim IndoAWM juga mengikuti kegiatan webinar mengenai *Woman as IPM Leader: Participatory Research: Involving Women in Project Development*. Workshop ini diselenggarakan oleh *FAW Secretariat* dengan narasumber dari berbagai negara yang memiliki keahlian mengenai gender.

d. Innovative & Inclusive Agricultural Value Chain Financing (IndoFinance)

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama penelitian antara PSEKP dan IFPRI dengan dukungan dana hibah dari ACIAR. Kegiatan penelitian kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2019 dan telah memenuhi seluruh proses serta tahapan administrasi sesuai peraturan pengelolaan hibah yang berlaku. Kegiatan ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kegiatan IndoFinance bertujuan untuk merancang desain pembiayaan inovatif dan inklusif pada rantai nilai di sektor Pertanian. Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup (1) review kebijakan dan implementasi pembiayaan pertanian di Indonesia, (2) review model dan desain implementasi pembiayaan pertanian, (3) review dan kajian lembaga pembiayaan bank dan non-bank serta formal atau informal yang melayani pertanian, (4) survei, dan (5) menganalisis terhadap uji coba pemberian kredit ke kelompok tani di lokasi kajian.

Kegiatan tim Indo Finance pada tahun 2023, diantaranya adalah survei lapang dan workshop. Survei pada tahun 2023 ini fokus pada topik kesetaraan gender dengan lokasi survei adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Disamping itu tim juga melakukan survei ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang bertujuan (1) memperoleh data/informasi pembiayaan usaha tani khususnya pada usahatani sayuran (KUR dan pinjaman on line/kredit digital), dan (2) mengumpulkan data/informasi terkait pembiayaan pertanian dari UPTD Sub Terminal Agribisnis/STA dan Agropolitan Kabupaten Cianjur, Koperasi STA, koperasi Porang Cianjur.

Workshop Innovative and Inclusive Agricultural Value Chain Financing dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 di Bogor yang dihadiri oleh peserta dari lingkup Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bappenas, BUMN, organisasi internasional, lembaga penelitian, akademisi, dan swasta (pelaku usaha). Workshop ini dilaksanakan sehubungan dengan akan selesainya kegiatan Innovative and Inclusive Agricultural Value Chain Financing (IndoFinance) tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk diseminasi hasil kajian empiris tentang pembiayaan usaha pertanian, dan menjaring masukan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.

e. Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan (IndoTransform)

Kegiatan penelitian/kajian ini merupakan kerja sama antara PSEKP dan ACIAR. Kegiatan penelitian kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah memenuhi seluruh proses serta tahapan administrasi sesuai peraturan pengelolaan hibah yang berlaku, melalui penerbitan nomor register hibah dari Kementerian Keuangan. Kegiatan kerja sama pada awalnya direncanakan akan berjalan pada awal tahun 2020, namun karena terjadi pandemic Covid-19, maka kegiatan baru dimulai pada pertengahan tahun 2020 dan berakhir pada Desember 2023.

Tujuan akhir kegiatan IndoTransform adalah merumuskan rekomendasi kebijakan terkait transformasi perdesaan dengan *lessons learnt* dari negara lain. Output yang diharapkan adalah rancangan model transformasi dari sistem *grain base* kepada *high value crop (more commercially and more oriented towards markets)*.

Kegiatan utama yang dilakukan tim Indotransform pada tahun 2023, diantaranya adalah konferensi internasional, *stakeholder meeting*, dan kunjungan lapang. Tim Indotransform berkesempatan mengikuti Australian Agricultural & Resource Economic Society (AARES) Conference di New Zealand pada bulan Februari 2023 dan *International Conference "Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural regional Transformation"* di Beijing pada bulan Desember 2023. Pada AARES, tim menyampaikan dua paper mengenai mengenai 1) *Rural transformation and rural income inequality in Indonesia 2000-2020* dan 2) *Rural transformation and its impacts on rural household income and poverty rate in Indonesia: 2000-2020*.

Stakeholder meeting dilaksanakan sebanyak dua pertemuan yang dilaksanakan di bulan Oktober dan November. Stakeholder meeting pertama melibatkan berbagai pemangku kepentingan diantaranya, BRIN, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pertanian, HKTI, dan lainnya. Stakeholder meeting kedua melibatkan Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas. Masukan yang didapatkan dari kegiatan ini, antara lain (1) Transformasi pertanian perlu diarahkan pada pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi yang meliputi hortikultura, perkebunan, dan peternakan; (2) Prioritas kebijakan yang selama ini lebih fokus pada peningkatan produksi pangan, perlu penyesuaian sehingga ada "keseimbangan" dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan komoditas selain pangan; dan (3) Strategi ini perlu dilakukan secara bersamaan dengan perluasan kesempatan kerja non-pertanian di pedesaan.

Kunjungan lapang dilakukan pada bulan November di Provinsi Jawa Barat. Lokasi kunjungan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Jawa Barat bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur produksi pertanian dari produk pertanian bernilai rendah ke *high value commodity* misalnya hortikultura, perkebunan dan kebijakan yang mempengaruhi transformasi produk pertanian. Selain itu juga melihat kabupaten dengan proses transformasi yang berjalan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

f. Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat terhadap Efisiensi Biaya dan Daya Saing Kelapa Sawit Rakyat

Kegiatan kajian ini merupakan mandat dari Kementerian Pertanian terkait perkembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan melakukan bentuk kerjasama kegiatan kajian antara Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kegiatan kerjasama tersebut awalnya akan dilaksanakan hingga tahun 2025 dengan rancangan kegiatan dilakukan setiap tahun sesuai tahun anggaran berjalan. Kegiatan kajian pertama dimulai pada akhir tahun 2022 dan berlanjut pada tahun berikutnya yakni tahun 2023 sehingga praktis tahun 2024 merupakan tahap ke-tiga yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan antar tahun terjadi dinamika mengingat adanya kepentingan dari pihak pemberi dana dalam hal ini BPDPKS, namun pelaksanaan pada setiap tahun anggaran dapat berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati

bersama. Tahap pertama kegiatan dilakukan pada periode September-Desember 2022 sementara tahap kedua dilakukan pada periode Juli-Desember 2023.

Perkembangan Program PSR di lapangan sudah mulai menunjukkan hasilnya, artinya tanaman kelapa sawit hasil peremajaan melalui Program PSR di lapangan sudah berproduksi dan berkontribusi terhadap pendapatan pekebun serta daya saing nasional dikarenakan kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas ekspor dari sub sektor perkebunan. Namun, mengamati perkembangan realisasinya masih jauh dibawah target yang ditetapkan. Hingga tahun 2022 realisasi Program PSR baru mencapai 27,94 persen, capain tersebut relatif kecil mengingat total target peremajaan secara nasional seluas 2,4 juta hektar. Program PSR di lapangan menghadapi berbagai tantangan dan kendala serta memerlukan alternatif solusi kebijakan untuk mempercepat pencapaian Program PSR kedepan.

Tujuan kegiatan kajian adalah mengetahui pengaruh Program PSR terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi biaya usaha tani dan daya saing kelapa sawit di Indonesia. Analisis yang dilakukan meliputi perubahan produktivitas, capaian efisiensi biaya usaha tani dan daya saing global antara pekebun peserta program dan bukan penerima program PSR. Rincian untuk mencapai tujuan tersebut secara spesifik melalui (1) memperoleh gambaran umum pelaksanaan Program PSR secara nasional (2) mengembangkan data base input dan output usaha tani serta pengumpulan data dan informasi terkait karakteristik petani penerima dan bukan penerima Program PSR (3) mengevaluasi implementasi Program PSR pada berbagai tingkatan level (4) menganalisis pengaruh Program PSR terhadap produktivitas dan efisiensi biaya usaha tani (5) identifikasi proporsi usaha tani kelapa sawit yang berproduksi secara kompetitif terhadap total produksi dari luasan yang dihasilkan Program PSR (6) merumuskan usulan perbaikan dan rekomendasi model perbaikan ditingkat petani dan (7) merumuskan usulan rekomendasi model perbaikan Program PSR untuk akselerasi dan strategi pengembangan Program PSR yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya dan daya saing yang komprehensif dan aplikatif.

Sebagian besar kegiatan kajian ini adalah kegiatan turun survey lapangan dan disertai *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan metode wawancara dengan panduan kuesioner. Kegiatan FGD dilakukan dengan informan kunci pada berbagai tingkatan, seperti tingkat pusat, tim pokja PSR, dinas perkebunan provinsi dan kabupaten, pengurus kelompok/gapoktan/koperasi, tokoh masyarakat, ahli dan praktisi, pedagang, perusahaan mitra, penyuluh pertanian serta pendamping pelaksanaan Program PSR.

Hingga akhir tahun 2023, hasil kajian menghasilkan sekelompok faktor yang menjadi kendala, hambatan, dan permasalahan Program PSR yang meliputi: Aspek Kebijakan, Faktor Legalitas lahan, Faktor Sosial Ekonomi dan Faktor yang bersifat teknis dalam implementasi Program PSR. Usulan kebijakan yang ditawarkan adalah, (1) perubahan Peraturan Kementerian Pertanian yang dilakukan tidak terkesan

tambal sulam dikarenakan justru memberikan dampak ketidakpastian dan menambah kerumitan pelaksanaan Program PSR di lapangan. (2) Perlu menambah intensitas sosialisasi dan pendampingan terkait implementasi peraturan Program PSR dengan dukungan anggaran yang memadai (3) melakukan pendataan petani yang terdampak dari permasalahan khususnya faktor legalitas lahan sehingga penyusunan target Program PSR lebih realistis (4) peningkatan koordinasi dengan KLHK untuk mendorong penyelesaian permasalahan lahan dalam kawasan serta koordinasi yang melibatkan lintas K/L (Kementan, Kemenkeu, BPN, KLHK dalam hal pendataan melalui sistem elektronik (5) Pada aspek pelaksanaan perlu peningkatan koordinasi antara Kementan dan BPDPKS sebagai motor penggerak utama mengakselerasi Program PSR (6) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PSR oleh kementan dan pengembangan layanan pada BPDPKS terkait alternatif pemanfaatan pembiayaan lainnya yang berpeluang misalnya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

6.2. Layanan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kegiatan diseminasi dan publikasi PSEKP dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Secara rutin dan berkala diterbitkan Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE) dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) secara OJS dan tercetak dalam dua nomor setiap tahun, dan Newsletter terbit tercetak tiga kali setahun. PSEKP juga memiliki media diseminasi digital berupa website dan media sosial (facebook, twitter, instagram, dan youtube). Kegiatan diseminasi juga dilakukan dengan menerbitkan buku tematik. Layanan perpustakaan juga tersedia yang dapat diakses secara digital maupun melalui kunjungan langsung.

6.2.1. Bentuk-bentuk Diseminasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Saat ini PSEKP mengelola tiga jurnal yaitu Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE), dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) yang terbit dalam bentuk OJS dan tercetak (Gambar 6). Terdapat dua hal yang memengaruhi proses penerbitan jurnal yang dikelola PSEKP pada tahun 2023 yaitu terjadinya serangan *cyber* dan perubahan struktur organisasi. Serangan *cyber* mengakibatkan postingan jurnal pada OJS tidak dapat diakses. Perbaikan telah dilakukan oleh Pusdatin dan Pustaka, namun belum pulih sepenuhnya.

Perubahan organisasi berupa dihapusnya Balitbang dari K/L menyebabkan server/domain jurnal juga harus berubah, yang semula di Litbangtan harus dilakukan migrasi ke Pusdatin. Namun hal ini masih belum bisa dilakukan karena OJS yang sebelumnya dikelola Litbangtan masih *under spec* sehingga harus ada beberapa upaya yang dilakukan agar pengelolaan dan penerbitan jurnal bisa berlangsung dengan baik.

Naskah masuk untuk ketiga jurnal selama tahun 2023 cukup banyak yaitu sebanyak 72 naskah. Dengan sisa naskah tahun 2022 sebanyak 41 naskah maka



Gambar 6. Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE), Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) yang dikelola PSEKP, 2023

total naskah yang dikelola tahun 2023 mencapai 113 naskah. Namun yang memenuhi standar minimal masih sangat kurang yang dapat dilihat dari cukup tingginya persentase naskah yang ditolak yaitu 51,32% dari total naskah. Dengan kata lain, naskah yang terbit tahun 2023 kurang dari setengahnya yaitu hanya 48,67 % dari total naskah yang dikelola tahun 2023 (Tabel 25).

Naskah masuk untuk JAE selama 2023 sebanyak 21 naskah ditambah sisa naskah tahun sebelumnya 11 naskah, sekitar 81% di antaranya ditolak. Berbeda dengan jurnal FAE dimana naskah masuk yang ditolak sekitar 43%, dan untuk AKP jumlah naskah yang ditolak hanya 35%. Alasan penolakan antara lain karena ketidaksesuaian substansi, metodologi, dan analisis yang kurang memenuhi standar minimal. Sampai Desember 2023 masih banyak naskah AKP yang sedang dalam perbaikan penulis dan berpotensi akan diterbitkan pada tahun 2024.

Naskah masuk pada jurnal FAE dan AKP terdistribusi merata sepanjang tahun. Pola yang berbeda pada naskah masuk untuk JAE, pada Bulan Maret – Juni dan November-Desember terlihat tidak ada naskah masuk, bahkan pada

Tabel 25. Statistik naskah jurnal PSEKP, 2023

Nama jurnal	Sisa naskah 2022	Naskah masuk 2023	Hasil penilaian naskah		Naskah dalam proses penilaian dan perbaikan			
			Tolak	Sudah terbit	TE	MB	RP	Penulis
Jurnal Agro Ekonomi	11	21	26	5	1	0	0	0
Forum Agro Ekonomi	14	27	18	5	4	0	8	6
Analisis Kebijakan Pertanian	16	24	14	15	0	0	0	11
Total	41	72	58	25				

September-Oktober hanya 1 naskah masuk. Kondisi ini sejalan dengan transformasi kelembagaan penelitian pada K/L yang beralih ke BRIN berdampak pada keenganan penulis yang mengajukan naskah ke jurnal di PSEKP yang tidak lagi lembaga penelitian. Kecuali jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) yang sejalan dengan tugas dan fungsi baru PSEKP untuk menghasilkan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang menjadi pilihan bagi pejabat fungsional analisis kebijakan untuk menerbitkan naskahnya di AKP (Tabel 26).

Tabel 26. Naskah masuk per bulan untuk jurnal PSEKP, 2023

Nama jurnal	Bulan												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jurnal Agro Ekonomi	9	6	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	21
Forum penelitian Agro Ekonomi	2	4	1	0	1	0	1	0	3	3	5	2	22

1. *Jurnal Agro Ekonomi (JAE)*

Jurnal Agro Ekonomi (JAE) adalah media ilmiah primer penyebaran hasil-hasil penelitian sosial-ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian serta informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku, dan pemerhati pembangunan pertanian dan perdesaan. JAE diterbitkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan Oktober, terbit perdana pada Oktober 1981. Sejak tahun 2017, untuk menjaring lebih banyak naskah dan memperkaya artikel JAE, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat nomor 726.5/HM.140/A.11/6/2017 dan 1306/SK/PP.PERHEPI/ VI/2017.

Jurnal Agro Ekonomi terbit dalam bentuk tercetak dan daring (online journal system-OJS). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/>. JAE (versi cetak) sudah terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan sertifikat akreditasi nomor 645/AU3/P2MI-LIPI/07/2015. Pada tahun 2018 JAE telah melakukan akreditasi ulang dan berhasil meraih sertifikat akreditasi dengan nomor 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020 JAE ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Akreditasi berlaku selama lima tahun, yaitu Volume 37 Nomor 2 Tahun 2019 sampai Volume 42 Nomor 1 Tahun 2024.

Selama tahun 2023 telah diterbitkan JAE dalam bentuk cetak sebanyak satu nomor, yaitu JAE Volume 40 Nomor 2 Oktober 2022 dan Volume 41 Nomor 1 Mei 2023, demikian pula terbitan secara OJS pada Tahun 2023 terjadwal untuk JAE

Tabel 27. Judul dan penulis artikel Jurnal Agro Ekonomi Vol. 40 No. 2, Oktober 2022

No.	Judul	Penulis
1.	Economic Feasibility and Performance of Biogas Production From Cacao Waste	Bernardia Vitri Arumsari, Mohd Razif Harun
2.	Performa Rantai Pasok dan Strategi Pengembangan Manggis Tujuan Ekspor di Kabupaten Bogor	Muhamad Hanafi, Andrea Emma Pravitasari, Sahara
3.	Kesediaan Peternak Membayar Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Irma Fauziah, Jamhari, Arini Wahyu Utami
4.	Kesediaan Petani Skala Kecil Membayar Pupuk Bersubsidi: Studi Kasus di Kabupaten Jember, Jawa Timur	Ahmad Zainuddin, M. Rondhi, Intan Kartika Setyawati, Rena Yunita Rahman, Illia Seldon Magfiroh
5.	Kepuasan Petani terhadap Pilihan Lembaga Pemasaran Karet di Kabupaten Kuantan Singingi	Rosnita, Arifudin, Chairun Annisa

Tabel 28. Judul dan penulis artikel Jurnal Agro Ekonomi Vol. 41 No. 1, Mei 2023

No.	Judul	Penulis
1.	Mapping of the Potential Economic Sectors of Rengat Peatland	Yelly Zamaya
2.	Pengaruh Indeks Kewirausahaan dan Preferensi Risiko Produksi terhadap Pendapatan Petani Tebu di Kabupaten Malang	Intan Mega Maharani, Nuhfil Hanani, Syafrial
3.	Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Smartphone oleh Petani Padi Sawah di Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara	Roza Yulida, Rosnita, Meki Herlon, Fanny Septya, Yulia Andriani
4.	Integrasi Pasar Biji Kakao Indonesia dengan Pasar Dunia	Siti Nur Faizah, Jamhari, Masyhuri
5.	Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Utara Pasca Gempa Bumi Tahun 2018	Shabilla Uswatun Hasanah, Arini Wahyu Utami, Jangkung Handoyo Mulyo, Yahya Shafiyuddin Hilmi

Volume 40 Nomor 1 dan Volume 41 Nomor 1 (Tabel 27 dan Tabel 28). Terbitan JAE Volume 41 Nomor 2 Oktober 2023 tidak bisa terpenuhi dikarenakan kekurangan naskah yang masuk maupun yang memenuhi standar naskah yang diterbitkan di JAE.

2. *Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE)*

Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi hasil penelitian yang berisi review hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di

Indonesia, terbit untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1982 dengan No. ISSN 0216-4361. FAE memuat *critical review* hasil-hasil penelitian para peneliti PSEKP dan lembaga lainnya. FAE juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan-gagasan ataupun konsepsi-konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi pertanian. FAE terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Desember dengan omset 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. Pada Tahun 2017, untuk menjaring lebih banyak naskah dan memperkaya artikel FAE, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat nomor 726.6/HM.140/A.11/ 6/2017 dan 1305/SK/PP.PERHEPI/VI/2017. Forum Agro Ekonomi terbit dalam bentuk tercetak dan daring (online journal system-OJS). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/>.

Pada bulan Juli 2015, FAE mendapat sertifikat Terakreditasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nomor akreditasi 643/AU3/P2MI-LIPI/07/2015. FAE terakreditasi kembali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor sertifikat 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018. Akhir tahun 2020 reakreditasi kembali diajukan, dan kembali berhasil terakreditasi Sinta 2 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan: 158/E/KPT/2021 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2021 tertanggal Desember 2021.

Selama tahun 2023 telah diterbitkan FAE dalam bentuk cetak dan daring sebanyak dua nomor, yaitu FAE Volume 40 Nomor 2 Desember 2022 (Tabel 29) dan FAE Volume 41 Nomor 1 Juli 2023 (Tabel 30). Terbitan FAE Volume 41 Nomor 2 Desember 2023 tidak bisa terpenuhi karena kekurangan naskah yang masuk

Tabel 29. Judul dan penulis artikel Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 40 No. 2, Desember 2022

No.	Judul	Penulis
1.	Kerugian Ekonomi dan Manajemen Pengendalian Serangan Lalat Buah pada Komoditas Hortikultura di Indonesia	Ening Ariningsih, Ashari, Saptana, Handewi Purwati Saliem, Kartika Sari Septanti
2.	Kebijakan Sumber Daya Lahan dan Sistem Tenurial di Indonesia: Konsolidasi Lahan Melalui Pertanian Korporasi	Rizka Amalia Nugrahapsari, Suharno
3.	Tata Kelola Bantuan Alat dan Mesin Pertanian sebagai Instrumen Pendukung Pertanian Modern	Iwan Setiajie Anugrah, Syahyuti, Juni Hestina
4.	Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeknya di Merauke Papua	Maria Maghdalena Diana Widiastuti, Yusman Syaukat, A. Faroby Falatehan, Dedi Budiman Hakim
5.	Strategi Prioritas untuk Keberlanjutan Subsektor Perkebunan Indonesia	Muhammad Ibnu

Tabel 30. Judul dan penulis artikel Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 41 No. 1, Juli 2023

No.	Judul	Penulis
1.	Tantangan dan Strategi Kebijakan Pengurangan Limbah Pangan di Indonesia	Esty Asriyana Suryana, Mohammad Wiryadi Effendi, Prima Luna
2.	Urgensi dan Efektivitas Program Bantuan Sembako terhadap Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Petani	Rahmadanih, Ni Made Viantika S, Darmawan Salman, Sitti Bulkis, Wahyudi
3.	Resiliensi Petani Wanita Kepala Keluarga Menghadapi Krisis Pangan	Rizghina Ikhwan dan Sri Suharyono
4.	Peran Penyuluhan, Komunikasi dan Organisasi Petani Dalam Membangun Resiliensi Petani Skala Kecil: Systematic Literature Review	Rafnel Azhari, Siti Amanah, Anna Fatchiya, Rilus A. Kinseng
5.	Strategi Pengembangan Komoditas Porang di Indonesia dari Perspektif Produsen dan Konsumen	Rizma Aldillah, Harianto, Suprehatin, I Gede Mahatma Yudha Bakti

Tabel 31. Judul dan penulis artikel Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi Vol. 41 No. 2, Desember 2023

No.	Judul	Penulis
1.	Komunikasi digital untuk motivasi generasi Z meningkatkan keterlibatan dalam bidang pertanian Indonesia	Olih Solihin, Shinta Anggreany, Rismawaty Rais, Ballia Siregar
2.	Perkembangan global kajian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan pedesaan: Bibliometrik analisis	Iis Mardiansyah dan Rafnel Azhari
3.	Urgensi peran jaringan komunikasi sebagai elemen penting dalam pengembangan korporasi petani: Literature review	Shinta Anggreany, Sumardjo, Djuara Lubis, Syahyuti
4.	Tinjauan kritis keamanan pangan dan kehalalan pada daging ayam broiler di Indonesia	Ening Ariningsih, Mewa Ariani, Nyak Ilham, Eni Siti Rohaeni, Sri Hastuti Suhartini, Adang Agustian, Achsanah Hidayatina, Sumaryanto, Imron Suandy

maupun yang memenuhi standar naskah yang diterbitkan di FAE. Namun terdapat 4 kandidat naskah untuk diterbitkan pada FAE Volume 41 Nomor 2 Desember 2023 sehingga untuk jurnal FAE tersebut masih kurang 1 naskah (Tabel 31).

3. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP)*

Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) adalah jurnal ilmiah yang membahas isu aktual pembangunan pertanian yang memuat artikel analisis

kebijakan responsif dan antisipatif pertanian daerah dan nasional. Pada Tahun 2017, untuk menjangkau lebih banyak naskah dan memperkaya artikel AKP, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat Nomor: 727.7/HM.140/A.11/6/2017 dan Nomor: 1304/SK/PP.PERHEPI/ VI/2017. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian terbit dalam bentuk tercetak dan daring (*online journal system-OJS*). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/>.

Analisis Kebijakan Pertanian terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor: 672/Akred/P2MI-LIPI/O7/2015. Pada tahun 2018, AKP terakreditasi kembali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan nomor sertifikat 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018. Reakreditasi Kembali telah diajukan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020 AKP ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2.

Akreditasi berlaku selama lima tahun, yaitu Volume 17 Nomor 2 Tahun 2019 sampai Volume 22 Nomor 1 Tahun 2024. Jurnal AKP terbit sesuai jadwal dalam bentuk cetak sebanyak dua nomor pada Tahun 2023, yaitu AKP Volume 21 Nomor 1 Juni 2023 dan AKP Volume 21 Nomor 2 Desember 2023. Secara daring (OJS), jurnal AKP terjadwal untuk AKP Volume 21 Nomor 1 pada Juni 2023 (Tabel 32) dan Volume 21 Nomor 2 pada Desember 2023 (Tabel 33).

Tabel 32. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 21 No. 1, Juni 2023

No.	Judul	Penulis
1.	Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional	Tono, Mewa Ariani, Achmad Suryana
2.	Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya	Syaiful Hadi, Djaimi Bakce, Didi Muwardi, Jum'arti Yusri, Fanny Septya
3.	Peningkatan Produktivitas Lahan Pekebun melalui Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia	Andreas Budi Rahutomo, Mahawan Karuniasa, Evi Frimawaty
4.	Keberlanjutan Agroindustri Penggilingan Padi Skala Besar di Kabupaten Subang, Jawa Barat	Norma Dewi, Trisna Insan Noor, Lucyana Trimo
5.	Keberlanjutan Korporasi Petani Jagung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Gusti Reza Puspita, Tuti Karyani, Iwan Setiawan
6.	Keberlanjutan Agribisnis Vanili di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat	Darma Setiawan, Iwan Setiawan, Eliana Wulandari
7.	Alternatif Kebijakan dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Papua	Rachmaeny Indahyani, La Maga
8.	Rekayasa Sosial pada Usaha Tani Berresponsif Gender di Kawasan Program Food Estate, Provinsi Kalimantan Tengah	Rizghina Ikhwan, Syahyuti, Sri Suharyono

Tabel 33. Judul dan penulis artikel Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 21 No. 2, Desember 2023

No.	Judul	Penulis
1.	Prospek Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Instrumen Sumber Pembiayaan Dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung	Iwan Setiajie Anugrah, Yonas Hangga Saputra, Erwidodo
2.	Volatilitas Harga Gandum Dunia dan Dampaknya Bagi Ketahanan Pangan Nasional Pembelajaran selama Covid-19	Lidya Rahma Shaffitri, Annisa Fauzia Astari, Miftahul Azis
3.	Resiliensi Komunitas Petani Kopi Arabika Gayo di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada Masa Pandemi Covid-19	Husaini, Ishar, A. Makki Arrozi, Rini Andriani, Fawwa Rahly
4.	Pengembangan Wilayah Kabupaten Pangandaran Berbasis Komoditas Unggulan Tanaman Pangan	Reni Hendriany, Andrea Emma Pravitasari, Ernan Rustiadi
5.	Potensi Pertanian Berbasis Dukungan Komunitas sebagai Solusi Persoalan Petani Kecil di Indonesia	Catharina Any Sulistyowati, Suraya A. Afiff, M. Baiquni, Mia Siscawati
6.	Model Pengembangan Agroindustri Sorgum Mendukung Diversifikasi Pangan: Studi Kasus di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ira Mulyawanti, Esty Asriyana Suryana, C H Winarti, S Joni Munarso
7.	Daya Saing dan Kebijakan Bea Keluar pada Komoditas Kakao (<i>Theobroma Cacao</i>) Indonesia	Rifqi Aulia Ramadhani, Amzul Rifin, Tanti Novianti

4. *Agro Socio-economic Newsletter*

PSEKP juga memiliki terbitan berkala berupa *Agro Socio-economic Newsletter* yang merupakan media berbahasa Inggris, diterbitkan dalam upaya memperluas pembaca, baik untuk berbagai mitra dan lembaga riset serta lembaga pemerintahan di dalam negeri dan di luar negeri. *Agro Socio-economic Newsletter* terbit dalam bentuk cetak tiga kali dalam setahun sejak 2007. Namun untuk terbitan tercetak, Nomor 3 yang terjadwal terbit pada Desember tahun berjalan, dicetak pada tahun berikutnya. Majalah ini berisi lima topik: temuan-temuan penelitian PSEKP yang menarik (*research finding*), tinjauan terhadap kebijakan pemerintah yang terbaru tentang pembangunan pertanian (*recent policy development*), kegiatan penelitian PSEKP (*research activities*), publikasi terbaru PSEKP (*publication*), berita kegiatan PSEKP pada forum nasional maupun internasional (*ICASEPS news*).

Selama tahun 2023 telah dicetak *Agro Socio-economic Newsletter* Volume 15 Nomor 3 Desember 2022, Volume 16 Nomor 1 April 2023 dan Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023. Sementara itu Volume 16 Nomor 3 Desember 2023 akan dicetak pada tahun anggaran berikutnya (Gambar 7).



Gambar 7. Agro Socio-economic Newsletter yang dikelola PSEKP, 2023

5. Website dan Media Sosial

a. Website

Pusat Sosial Ekonomi Website dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) juga menggunakan media daring sebagai media diseminasinya, yang dapat diakses pada alamat <https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/>. Alamat baru website ini dibuat setelah serangan cyber yang membuat alamat website yang lama tidak bisa diakses lagi.

Antara website lama dengan baru terdapat perbedaan struktur sehingga tidak bisa dilakukan migrasi, sehingga harus dibangun website dengan menu-menu baru sekaligus sebagai bentuk pembaruan. Website menampilkan berbagai kegiatan dan informasi seputar PSEKP. Unggahan untuk website tidak terjadwal, untuk fitur tertentu pembaruan isi dilakukan setiap tahun, dan ada juga unggahan yang dilakukan jika ada kegiatan tertentu (Gambar 8).



Gambar 8. Website PSEKP, 2023

Serangan siber yang semakin marak menyerang server Pusdatin Kementan dan berdampak pada website PSEKP. Untuk perbaikan ke depan Pusdatin menerapkan kebijakan baru dalam pembuatan dan spesifikasi website di Kementan. Didapatkan bahwa spesifikasi website PSEKP sudah tidak adaptif

sehingga dibutuhkan pengembangan website PSEKP dengan teknologi terkini dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Pusdatin. Selama tahun 2022 setelah telah dilakukan pengembangan website PSEKP. Selama tahap pengembangan, website PSEKP tetap dapat diakses namun hanya berisi informasi umum instansi PSEKP. Reviu hasil pengembangan website dilakukan pada akhir Desember 2022. Website PSEKP terbaru dapat diakses online pada Januari 2023.

Tahun 2023 difokuskan pada pemulihan kembali website PSEKP yang sempat hilang dari pencarian search engine. Pengembangan website PSEKP sekaligus mengidentifikasi konten-konten lama maupun menu yang perlu dihilangkan. Website PSEKP memiliki menu beranda, profil, informasi publik, publikasi, dan layanan (Tabel 34).

Website PSEKP dapat diakses 24 jam sehari dengan menggunakan browser apa saja selama komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Backup data website dilakukan rutin setiap bulan. Hal ini dilakukan sebagai tindakan mitigasi jika terjadi serangan siber kembali.

b. Medsos

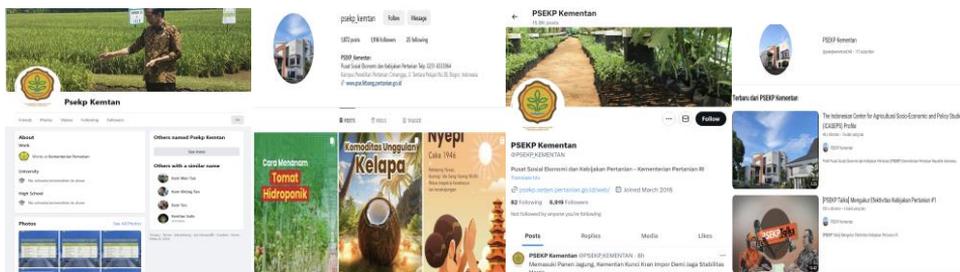
Terdapat empat jenis media sosial yang dikelola PSEKP sebagai media diseminasi dan penyebaran berbagai informasi kegiatan PSEKP maupun Kementan yaitu Facebook (Fb), Twitter (Tw), Instagram (Ig), dan Youtube (Yt). Keempat medsos PSEKP dapat dilihat pada alamat:

- <https://www.facebook.com/PSEKP.KementerianPertanian/>
- https://twitter.com/PSEKP_KEMANTAN/
- https://www.instagram.com/PSEKP_KEMTAN/
- https://www.youtube.com/results?search_query=psekp

Unggahan konten dan pelaporan medsos dilakukan setiap hari, bahkan saat hari libur. Konten merupakan reposting dari website Kemtan, berita tentang aktivitas yang dilakukan PSEKP, atau berita pertanian dengan permintaan khusus untuk diviralkan. Konten yang diunggah hari ini akan dilaporkan keesokan harinya (Gambar 9).

Tabel 34. Menu website PSEKP, 2023

No.	Menu	Sub Menu
1.	Beranda	
2.	Profil	Sejarah; Tugas
3.	Informasi Publik	Program; Kinerja; Indeks Kepuasan Masyarakat
4.	Publikasi	Jurnal JAE; Jurnal FAE; Jurnal AKP; Newsletter; Publikasi Lainnya; Policy Brief; Kajian Lainnya
5.	Layanan	Perpustakaan



Gambar 9. Media sosial PSEKP, 2023

Aktivitas medsos Facebook dan Twitter merupakan yang terbanyak selama Tahun 2023, Fb pada posisi pertama untuk jumlah unggahan, likes, dan share, sedangkan Twitter berada di posisi pertama untuk interaksi, like, klik dan jumlah followers. Jumlah followers Twitter PSEKP pada Tahun 2023 meningkat sebanyak 2,5%, Ig PSEKP 5,3%, Fb PSEKP 2,9%, dan Youtube PSEKP 12,9% (Tabel 35).

Tabel 35. Rekap unggahan media sosial PSEKP Tahun 2023

Medsos	Jumlah unggahan	Interaksi	Likes	Komen	Share/RT/ views/klik	Followers	
						2022	2023
Facebook	2.396	9.537	8.644	234	712	4.151	4.272
Twitter	2.512	10.834	6.721	568	2.834	6.738	6.906
Instagram	332	1.835	1.156	521	275	1.800	1.895
Youtube	1	331	14	0	310	101	114

6.2.2. Distribusi Publikasi

Publikasi yang didistribusikan berupa publikasi tercetak, dibagikan kepada berbagai pihak, baik dengan cara dikirim atau diberikan langsung. Biasanya pengiriman dilakukan dua kali setahun, namun untuk Tahun 2023 hanya dilakukan satu kali pengiriman terjadwal, selebihnya pengiriman dilakukan atas permintaan instansi yang membutuhkan. Publikasi yang didistribusikan pada tahun berjalan tidak hanya publikasi yang dicetak pada tahun tersebut, namun juga mencakup beberapa terbitan tahun sebelumnya jika hal tersebut diminta oleh penerima (Tabel 36).

Penerima publikasi PSEKP yaitu (1) perorangan (peneliti/AK/pengambil keputusan/penulis/editor/MB) lingkup Kementan dan luar Kementan, (2) perpustakaan K/L lingkup Kementan, (3) perpustakaan perguruan tinggi. Pengiriman dilakukan untuk menyampaikan publikasi PSEKP kepada instansi atau lembaga dan perorangan (penulis, tim editor, mitra bestari) yang berasal dari luar PSEKP, sedangkan untuk dewan redaksi yang berstatus sebagai peneliti/analisis kebijakan PSEKP disampaikan secara langsung. Buku/jurnal/terbitan lainnya juga

Tabel 36. Distribusi publikasi PSEKP 2023

No.	Jenis publikasi	Penerima	Jumlah (exp)
1.	Forum penelitian Agro Ekonomi	Instansi Kemtan, Luar Kemtan dan Perguruan Tinggi	76
2.	Analisis Kebijakan Pertanian	Instansi Kemtan, Luar Kemtan dan Perguruan Tinggi	80
3.	Jurnal Agro Ekonomi	Instansi Kemtan, Luar Kemtan dan Perguruan Tinggi	76
4.	Newsletter	Instansi Kemtan, Luar Kemtan dan Perguruan Tinggi	196
5.	Laporan Tahunan	Instansi Kemtan, Luar Kemtan dan Perguruan Tinggi	76

dibagikan kepada khalayak dalam kegiatan pameran atau kegiatan temu ilmiah lainnya.

6.2.3. Perpustakaan

Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan salah satu bentuk unit pelaksana dari tim kerja pemanfaatan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP, merupakan perpustakaan khusus yang melayani berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di bidang sosial ekonomi pertanian. Bahan-bahan pustaka yang dikoleksi berupa bahan tercetak, pangkalan data (database), dan internet.

Pengadaan bahan pustaka memegang peranan penting dalam kegiatan penelitian. Oleh sebab itu sebagai unit pelaksana penyedia informasi perpustakaan PSEKP berusaha mengembangkan diri dalam penyediaan informasi, sesuai kebutuhan pemustaka yang makin dinamis khususnya yang berupa bahan pustaka digital bertujuan untuk meningkatkan mutu pengembangan dan layanan perpustakaan. Sepanjang tahun 2023 perpustakaan PSEKP berusaha mengembangkan diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan Tupoksi. Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan layanan perpustakaan, pemustaka (pengguna) Perpustakaan PSEKP tidak saja melayani kebutuhan para peneliti, tetapi juga, analisis kebijakan, dan pegawai PSEKP pada umumnya. Namun, tidak sedikit pemustaka di luar PSEKP yang memanfaatkan layanan Perpustakaan PSEKP, seperti peneliti, penyuluh, mahasiswa, dan masyarakat umum dengan fasilitas layanan yang terbatas, tidak sama dengan pemustaka PSEKP baik peneliti dari dalam maupun dari luar PSEKP, yang memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di bidang sosial ekonomi pertanian. Sebagian besar jenis koleksi bahan perpustakaan yang dimiliki Perpustakaan PSEKP berkaitan dengan bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, berupa bahan tercetak dan elektronik tersimpan di pangkalan data database (serverlib dan InlisLite).

Sepanjang tahun 2023 Perpustakaan PSEKP selalu berusaha berinovasi mengembangkan layanan kepada pemustakanya dalam bentuk koleksi buku baru dan menu-menu digital dengan jumlah update data sebanyak 934 PDF/ebook sesuai kebutuhan pemustaka yang semakin dinamis. Untuk entry katalog induk yang beralamat di <http://kikp.pertanian.go.id/psekp/opac/> per kriteria periode Desember 2022 sampai dengan November 2023 sudah terealisasi update 272 judul dan entry pengadaan koleksi periode Desember-2022 sampai dengan November 2023 sudah terealisasi 411 eksemplar judul buku baru. Dan tim sosial-media perpustakaan berhasil mempromosikan koleksi dan layanan perpustakaan dengan infografis dan videografis sebanyak 44 konten melalui konten WhatsApp group dan Instagram tentang informasi terkini berita pertanian sepekan yang dapat diakses secara lengkap di <http://serverlib/opini/>. Pada tahun 2023 tercatat angka kunjungan periodik langsung ke perpustakaan PSEKP sebanyak 153 orang, meningkat jika dibandingkan angka kunjungan tahun 2022 sebanyak 84 orang. Terkait dengan pengembangan kompetensi kepustakawan dan pengelola Perpustakaan PSEKP pada tahun 2023 juga telah mencatat mengikuti 16 kegiatan seminar luring dan webinar literasi visual.

Terkait dengan tujuan utama pengelolaan perpustakaan yaitu meningkatkan mutu layanan, baik bagi pemustaka dari PSEKP maupun dari luar PSEKP, telah dilaksanakan lima kegiatan, yaitu (1) pengadaan bahan pustaka, (2) pengelolaan perpustakaan, (3) pelayanan perpustakaan, (4) pengembangan perpustakaan digital, (5) pengembangan kompetensi, dan (6) administrasi dan pelaporan.

a. Pengadaan Bahan Pustaka

Pengadaan bahan pustaka perpustakaan PSEKP selain dengan cara pembelian juga pengadaan lewat hadiah atau hibah dan tukar menukar masih berjalan seperti tahun sebelumnya. Jenis bahan pustaka yang diadakan adalah buku dan jurnal terbitan dalam negeri. Selain itu, perpustakaan mengumpulkan karya tulis ilmiah para peneliti dan akademisi yang tidak atau belum diterbitkan seperti makalah seminar hasil penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi.

Pada tahun 2023 realisasi pengadaan bahan koleksi perpustakaan PSEKP dari pembelian sebanyak 45 judul dan 52 eksemplar buku (Lampiran 1). Perpustakaan PSEKP juga menerima hadiah berupa buku, jurnal, dan majalah dari berbagai instansi pemerintah dan swasta dan juga hibah dari perorangan serta tukar menukar.

b. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan PSEKP tergolong dalam jenis perpustakaan khusus, dan sudah mengembangkan koleksinya selaras dengan fungsinya sebagai Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Oleh karena itu, koleksi yang dimilikinya harus menunjang unit pelaksana dari tim kerja pemanfaatan hasil

analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, program penelitian serta relevan dengan berbagai bidang yang sesuai dengan misi PSEKP. Pengolahan koleksi bahan pustaka perpustakaan PSEKP diutamakan pada beberapa jenis bahan pustaka berupa referensi, buku teks, majalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sejenisnya yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi, baik dalam bentuk tercetak maupun media rekam lainnya.

Pengolahan bahan pustaka digital Perpustakaan PSEKP tahun 2023 telah berkembang sesuai dengan target. Penambahan konten dalam bentuk file pdf di setiap menu yang tersedia, baik dalam serverlib ataupun dalam aplikasi InlisLite telah dilakukan. Penambahan-penambahan tersebut terdiri dari: (a) penambahan database katalog OPAC inlistlite, (b) Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk PDF File, (c) Penelusuran klipring berita pertanian terbitan setiap hari kerja, promosi dalam bentuk opini setiap sepekan (d) Tiga arsip Jurnal terbitan PSEKP versi off-line untuk JAE, FAE dan AKP, (e) Digital Prosiding dan Monograph untuk terbitan PSEKP lawas, (f) Publikasi menu-menu statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, dan (g) Koleksi ebook yang disajikan dalam bentuk File PDF untuk terbitan setiap unit kerja setiap terbitannya. Perpustakaan digital PSEKP telah dapat diakses dari Gedung A dan B kantor PSEKP Cimanggu. Pada tahun mendatang akan diupayakan agar dapat disajikan online melalui jaringan internet global.

Pengelolaan koleksi perpustakaan digital yang dilakukan kepada pemustaka merupakan hasil pengolahan yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan digital. Pengelolaan perpustakaan digital diharapkan agar koleksi perpustakaan bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Update setiap hari dilakukan untuk memperkaya bahan koleksi elektronik, baik itu oleh pengelola perpustakaan maupun pustakawan dilakukan dengan melalui penelusuran melalui internet dan menyimpannya dalam bentuk file di komputer masing-masing. Oleh karena itu, pada tahun-tahun yang akan datang disarankan agar pengalihan buku cetak koleksi perpustakaan menjadi buku elektronik dapat segera terwujud agar koleksi perpustakaan tidak hanya dimanfaatkan oleh pemustaka dari PSEKP saja tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dengan jangkauan yang lebih luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, memang dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dari anggaran yang ada saat ini. Sementara pada saat ini, fasilitas dan anggaran yang dimiliki perpustakaan untuk mengalihkan koleksi buku cetak menjadi buku elektronik belum memadai.

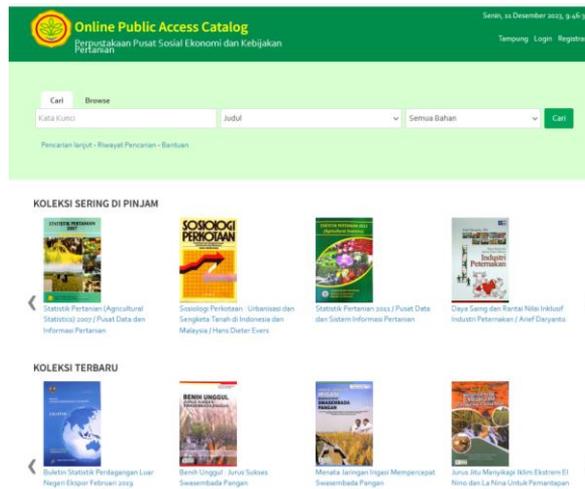
Pada tahun 2023 telah dilakukan penataan kembali ruang perpustakaan, khususnya pada ruang koleksi dan ruang baca yang cukup nyaman dan luas. Pada ruang koleksi sudah terlihat padat disetiap raknya, terutama koleksi buku BPS dan Textbook pengelola berharap ditahun anggaran 2024 dapat diusulkan pengadaan rak buku yang baru.

c. Pelayanan Perpustakaan

Penggunaan aplikasi perpustakaan memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk memanfaatkan jasa penelusuran bahan pustaka, baik dengan

cara datang langsung ataupun melalui internet. Penelusuran langsung dapat menggunakan fasilitas OPAC (*On-line Public Acces Catalog*) Inlislite dan fasilitas penelusuran serverlib. Untuk koleksi buku perpustakaan PSEKP dapat diakses melalui InlisLite dengan alamat <https://kikp.pertanian.go.id/psekp/opac/> atau dengan alamat http://serverlib/psekp/search_terms.php. Sementara, untuk koleksi perpustakaan PSEKP lainnya, seperti laporan kegiatan, jurnal, PATANAS, klipng dalam bentuk Opini Sepekan, koleksi ebook, menu BPS time series dan sebagainya dapat diakses melalui <http://serverlib/psekp/>.

Perpustakaan PSEKP juga melayani permintaan layanan melalui e-mail atau melalui aplikasi *whatsapp*. Dengan fasilitas ini pemustaka mendapat layanan



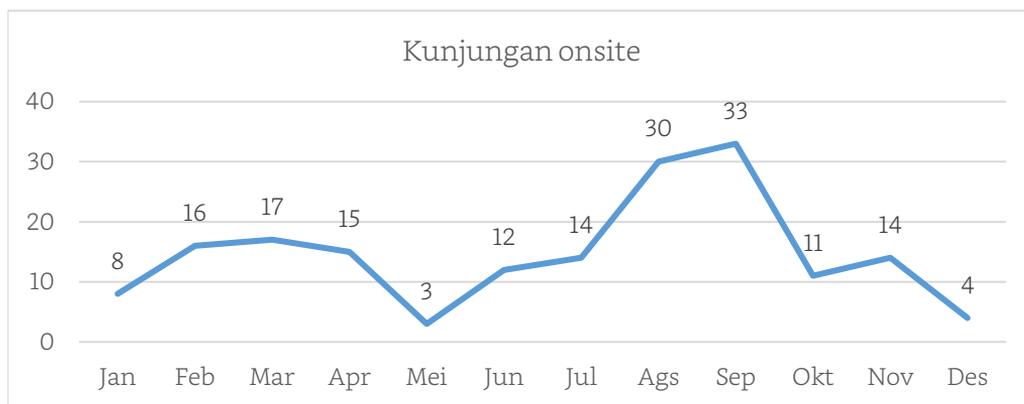
Gambar 10. Tampilan OPAC Perpustakaan Digital PSEKP melalui aplikasi Inlislite.



Gambar 11. Tampilan Perpustakaan Digital PSEKP melalui serverlib/PSEKP/

tanpa harus datang ke perpustakaan, sedangkan bahan pustaka yang diperlukan dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* atau file.

Pelayanan perpustakaan berupa layanan kunjungan langsung, dan jasa penelusuran bahan pustaka, baik dengan cara datang langsung maupun melalui aplikasi perpustakaan digital. Selama tahun 2023, pengunjung yang datang langsung ke Perpustakaan PSEKP tercatat sebanyak 177 (Gambar 12). Kunjungan perpustakaan terbanyak terdapat pada bulan Agustus dan September, yaitu masing-masing sebanyak 30 dan 33 pengunjung. Pada bulan ini terdapat beberapa kali kunjungan yang bersifat rombongan, baik itu untuk mencari literatur, konsultasi, diskusi, dan juga *study banding*.



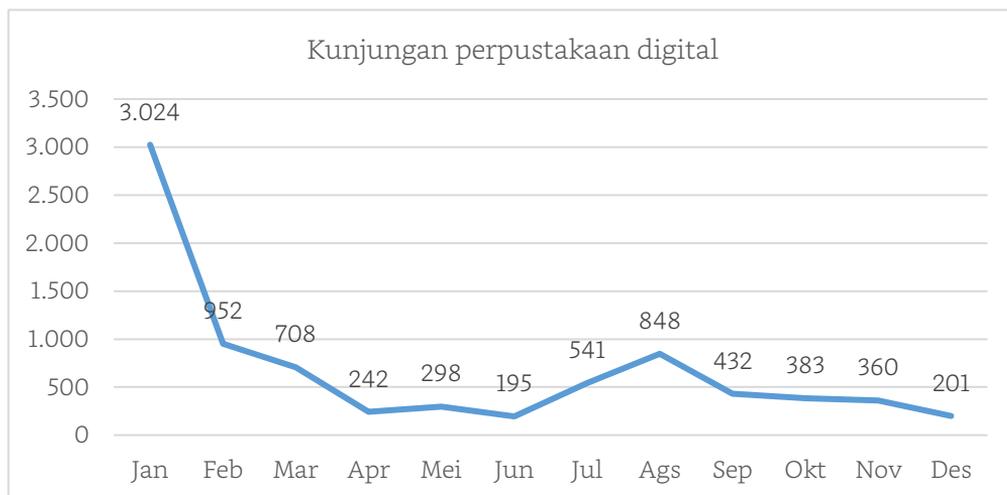
Gambar 12. Pengunjung Perpustakaan PSEKP, 2023

Tidak sedikit pemustaka di luar PSEKP yang memanfaatkan layanan Perpustakaan PSEKP, seperti peneliti, penyuluh, mahasiswa, dan masyarakat umum, yang memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, dan kebijakan pertanian. Berdasarkan data pengunjung pada Tabel 37, terlihat pengunjung terbanyak memiliki profesi sebagai analis kebijakan (25,42%), peneliti (24,29%), fungsional umum (19,21%), dan mahasiswa (15,25%). Dengan demikian, kehadiran Perpustakaan PSEKP telah memberikan kontribusi dalam menunjang tugas dan fungsi PSEKP, dimana pengunjung terbanyak berasal dari PSEKP sendiri dengan profesi analis kebijakan (Tabel 37).

Selain kunjungan secara langsung, Perpustakaan PSEKP juga kerap dikunjungi secara daring melalui aplikasi perpustakaan digital, baik itu yang berbasis *online* maupun *localhost*. Penelusuran katalog atas buku-buku yang dimiliki oleh Perpustakaan PSEKP dapat dilakukan melalui <https://kikp.pertanian.go.id/psekp/opac>, sedangkan koleksi perpustakaan PSEKP diakses melalui <http://serverlib/psekp/>. Selama tahun 2023, akses pengguna ke Perpustakaan Digital PSEKP sebanyak 8.184 hits dengan akses tertinggi pada bulan Januari sebanyak 3.024 hits (Gambar 13).

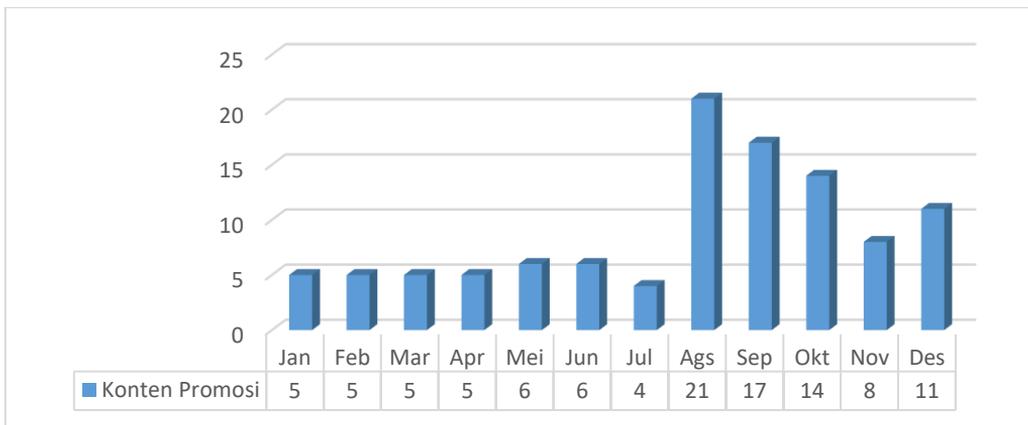
Tabel 37. Sebaran pengunjung Perpustakaan PSEKP berdasarkan profesi, 2023

No.	Profesi Pengunjung	Jumlah	Persentase
1	Analisis Kebijakan	45	25.42
2	Peneliti	43	24.29
3	Dosen	1	0.56
4	Mahasiswa	27	15.25
5	Pelajar	3	1.69
6	Fungsional umum	34	19.21
7	Penyuluh pertanian	2	1.13
8	Pustakawan	7	3.95
9	Pranata Komputer	3	1.69
10	Statistisi	8	4.52
11	Arsiparis	1	0.56
12	Umum	3	1.69
Total		177	100



Gambar 13. Grafik akses pengguna ke aplikasi Perpustakaan Digital PSEKP per bulan, 2023

Perpustakaan juga melakukan kegiatan promosi melalui media sosial Instagram (@perpustakaan_psekp), Facebook (@Perpustakaan PSEKP), dan Whatsapp Group (Gambar 14). Tujuannya untuk mempromosikan koleksi dan layanan perpustakaan kepada pengguna. Selain itu, strategi promosi melalui media sosial untuk meningkatkan visibilitas, partisipasi, dan keterlibatan pengguna perpustakaan. Materi promosi dibuat menarik, informatif, dan estetik. Selain itu, digunakan pula gambar, infografis, dan video untuk meningkatkan



Gambar 14. Grafik sebaran konten promosi Perpustakaan PSEKP melalui media sosial selama tahun 2023

daya tarik visual. Selama tahun 2023, sebanyak 107 konten promosi perpustakaan yang diunggah melalui media sosial.

Pada Mei 2023, Perpustakaan PSEKP menyelenggarakan Kelas Literasi Penyusunan Infografis sebagai salah satu bentuk layanan perpustakaan kepada penggunanya sekaligus sebagai wadah promosi perpustakaan. Kelas Literasi Penyusunan Infografis diselenggarakan pada 23-24 Mei 2023 di Auditorium Ismunadji dengan narasumber Kepala Bagian Umum PSEKP, Eko Nugroho, S.Kom., M.M. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam mengemas ulang informasi sekaligus untuk meningkatkan layanan informasi kepada publik. Melalui infografis, informasi yang ingin disampaikan kepada publik dapat disajikan dengan sederhana namun mudah diingat, informatif, menarik, dan *eye catching* bagi pembaca. Kegiatan ini diikuti oleh 16 orang peserta, dengan rincian 12 orang dari PSEKP, 1 orang Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian (PUSTAKA), 1 orang dari Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BB PSIP), 1 orang dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Biogen (BBPSI Biogen), dan 1 orang dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik (BPSI-TROA).



Gambar 15. Kegiatan kelas literasi penyusunan Infografis, 2023

d. Pengembangan Perpustakaan Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah paradigma dalam penyebaran dan akses informasi. Pada era digital ini, perpustakaan digital muncul sebagai solusi inovatif untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan akses yang lebih cepat, luas, dan mudah terhadap berbagai jenis informasi, perpustakaan PSEKP bekerja sama dengan seluruh perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian dengan mengembangkan perpustakaan digital. Melalui jaringan internet di Gedung A dan B PSEKP, pemustaka dapat mengakses alamat server perpustakaan psekp, yaitu <http://serverlib/psekp/> pada alamat tersebut dapat diakses link untuk pengolahan data katalog perpustakaan PSEKP, koleksi ebook dan statistik BPS yang sudah diolah oleh Pusdatin Kementan dalam bentuk Basis Data Statistik Pertanian, SIM Pangan Strategis dan SIM Harga Komoditas Pertanian.

Perpustakaan digital PSEKP pada tahun 2023 berhasil membuat penelusuran ebook khususnya untuk terbitan PSEKP dan luar PSEKP, dalam bentuk arsip PDF sebanyak 7.718 file, yang dapat diakses dengan beberapa alamat link yang sudah tersedia diantaranya menu Laporan Hasil Penelitian PSEKP, PATANAS, Prosiding dan Monograph terbitan PSEKP lawas (terdapat 1.551 file judul artikel digital masih dalam Proses scan), Ejournal PSEKP versi off-line, Kliping Koran Digital Berita Pertanian, 20 Naskah Orasi Profesor Riset PSEKP, menu penelusuran buku-buku terbitan BPS dan koleksi ebookpsekp dan suplement ebook Islam. Pada alamat tersebut diatas juga dapat diakses Laporan Hasil Penelitian PSEKP dari tahun 1990-2022 sebanyak 327 judul penelitian dalam bentuk File PDF, Laporan Hasil Penelitian PATANAS PSEKP Periode Tahun 2003-2022 sebanyak 20 judul, dan untuk terbitan Opini Sepekan sebanyak 1.763 terbitan tiap harinya dari tahun 2016-2023.

Di Perpustakaan Digital PSEKP juga dapat diakses secara off-line jurnal terbitan PSEKP full text untuk Jurnal Agro Ekonomi, Jurnal Forum penelitian Agro Ekonomi dan Analisis Kebijakan Pertanian dengan alamat di <http://serverlib/ejournal/>. Jumlah artikel yang sudah diupload sebanyak 1.054 judul artikel. Perpustakaan PSEKP masuk ke dalam Katalog Induk Kementerian Pertanian yang dapat diakses secara daring melalui alamat <https://kikp.pertanian.go.id/psekp/opac/> dengan total sebanyak 10.182 judul dan total sebanyak 10.568 eksemplar. Disamping itu, perpustakaan digital untuk koleksi terbitan luar PSEKP khususnya terbitan BPS telah diupload sebanyak 1.916 judul dalam bentuk PDF. Penelusuran pemustaka PSEKP dilengkapi juga buku elektronik Publikasi Statistik sebagai seri publikasi Buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan melalui Statistik Survei di Indonesia dalam bentuk Full PDF.

6.3. Penyelenggaraan 2nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (ICANaRD)

Pada TA. 2023 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian

Indonesia (PERHEPI) kembali menyelenggarakan konferensi internasional yang ke-2, yaitu 2nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (ICANaRD). Konferensi yang berjudul “Enabling Policies Towards Resilient Agriculture and Sustainable Rural Development: The Importance of Rice in Food Systems” telah diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 17-18 Oktober 2023. Pada hari pertama penyelenggaraan konferensi dilakukan secara luring (offline) dan hari kedua dilaksanakan secara daring (online). Konferensi mengambil tema “Strategic Measures Towards Resilience of Rural Resources and Sustainable Rice Supply Chain”. Tujuan penyelenggaraan 2nd ICANaRD adalah berbagi pengetahuan (sharing knowledge) tentang tata Kelola dan kebijakan perberasan di negara produsen beras, yang nantinya dapat diperoleh pembelajaran (lesson learned) sebagai bahan masukan para pengambil kebijakan untuk meningkatkan tata kelola dan kebijakan perberasan di Indonesia menjadi lebih baik.

Pada konferensi hari pertama, Keynote Speech disampaikan oleh Plt. Menteri Pertanian. Materi utama yang disajikan pada hari pertama yaitu tentang pengelolaan dan kebijakan perberasan di beberapa negara produsen beras, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Jepang, Bangladesh, RRC, dan Turki. Materi dari negara lain ini disampaikan oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara penugasan. Selain itu, beberapa pembicara dari lembaga nasional (PERHEPI) dan lembaga internasional (IFPRI, FAO, World Bank, ERIA) juga turut berpartisipasi dalam konferensi ini. Pada hari kedua konferensi, telah dipaparkan materi dari 50 makalah pendukung. Peserta konferensi berasal dari berbagai lembaga, seperti Kementerian Pertanian, K/L terkait, BUMN, lembaga internasional, organisasi profesi, Akademisi, Praktisi, KTNA, dan swasta.

Seluruh materi dari KBRI yang menyajikan materi tentang tata kelola dan kebijakan perberasan di negara Thailand, Vietnam, Filipina, Jepang, Bangladesh, RRC, dan Turki, sebagian dipresentasikan langsung oleh Duta Besar dan sebagian diwakili oleh Wakil Duta Besar atau Tim ekonomi KBRI. Beberapa catatan dari seluruh materi yang disajikan, dapat diperoleh pembelajaran (*lesson learned*), antara lain:

- (1) Beras diposisikan sebagai komoditas pangan strategis, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, untuk itu ketersediaan beras harus menjadi prioritas utama pemerintah. Produksi padi menjadi program utama dengan dukungan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan usaha budidaya padi. Kebijakan perberasan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.
- (2) Tantangan peningkatan produksi padi secara berkelanjutan relatif sama, yaitu perubahan iklim, *aging farmer* (penuaan petani padi); konversi lahan pertanian untuk penggunaan nonpertanian; skala pengusahaan petani padi relatif kecil; dan lambannya adopsi teknologi oleh petani.

- (3) Diperlukan instrumen kebijakan untuk mengatasi tantangan peningkatan produksi secara berkelanjutan.
- (4) Program peningkatan produksi padi dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang disertai dengan data luas baku lahan sawah dan produksi padi yang valid;
- (5) Perlu upaya untuk mengurangi konsumsi beras per kapita untuk mengurangi tekanan peningkatan produksi.
- (6) Kerja sama antar kementerian/lembaga terkait termasuk para pelaku usaha perberasan perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan produksi padi secara optimal.

Materi makalah pendukung yang dipresentasikan pada hari kedua konferensi mencakup berbagai aspek, antara lain: (1) produksi, pengolahan, pascapanen; (2) pemasaran, rantai pasok, agribisnis, dan perdagangan internasional; (3) infrastruktur pertanian, mekanisasi; (4) gender, pemberdayaan petani skala kecil dan pemuda tani; (5) kelembagaan pertanian, permodalan, dan asuransi pertanian; (6) perubahan iklim; (7) digitalisasi pertanian; dan (8) aspek lainnya terkait perberasan. Seluruh makalah pendukung akan dipublikasikan dalam bentuk prosiding dan diterbitkan oleh penerbit terindeks global.

Sebelum pengiriman artikel kepada penerbit, telah dilakukan proses copy editing mencakup pengecekan similarity, format dan bahasa. Pengecekan similarity bertujuan untuk menentukan artikel prosiding yang memiliki skor diatas 15 persen dikembalikan ke penulis untuk re-write (penulisan ulang) sampai skor similarity kurang dari 15 persen. Sedangkan paper dengan similarity di bawah 15 persen dilanjutkan dengan perbaikan format dan bahasa (*proofread*). Perbaikan format difokuskan pada aspek: (i) Format penulisan judul, penulis dan afiliasi; (ii) Jenis dan ukuran font; (iii) Jarak antar bagian dalam teks; (iv) Format tabel dan gambar; dan (v) Format dan kesesuaian daftar pustaka dengan sitasi dalam narasi paper. Selanjutnya perbaikan bahasa difokuskan pada beberapa hal, yaitu (i) Jenis bahasa yang digunakan adalah British dan American; (ii) Penggunaan terminologi standar; dan (iii) Tata bahasa yang digunakan. Saat ini telah selesai dilakukan copy editing 50 artikel dengan skor similarity kurang dari 15 persen.

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Kegiatan Evaluasi

Struktur organisasi Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berada dalam lingkup Kelompok Substansi Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Uraian tugas Subkelompok Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2021 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, adalah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Tugas pelaporan dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Koordinasi kegiatan monev dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seminar proposal/KAK, penyusunan dan perbaikan proposal/KAK operasional, penyusunan *outline* kegiatan analisis, penyusunan kuesioner, penyusunan *review* terkait kajian yang akan dilaksanakan, perbaikan petunjuk pelaksanaan (juklak) monev, seminar penajaman rumusan kebijakan, pemeriksaan kelengkapan laporan akhir hingga penyusunan bahan advokasi dan diseminasi hasil analisis. Pelaksanaan kegiatan monev tahun 2023 belum berjalan optimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan birokrasi, dimana sebagian besar anggota tim monev adalah peneliti yang beralih ke BRIN, tetapi secara umum pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun tidak seluruhnya tim dapat menyelesaikan laporan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan kegiatan pelaporan, Tim Kerja Evaluasi bertugas menyusun berbagai jenis laporan seperti hasil kegiatan analisis kebijakan untuk kepentingan institusi yang ditujukan kepada *stakeholders* atau pengguna lainnya. Penyusunan laporan yang sifatnya rutin bulanan adalah bahan untuk Sekretariat Jenderal dan laporan kinerja penyerapan anggaran melalui aplikasi yang diatur dalam PMK 249/2011 Kemenkeu, serta pelaporan pada aplikasi *e-monev* BAPPENAS.

Kegiatan lain yang cukup penting dan sudah terlaksana dengan baik adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) yang bersifat rutin tahunan. LAKIN merupakan laporan yang berisi kinerja institusi pada tahun yang bersangkutan. LAKIN PSEKP dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan penyempurnaan, khususnya menyangkut format laporan. Penyusunan LAKIN PSEKP sampai saat ini tidak mengalami hambatan yang berarti, kecuali cukup sulit dalam melakukan pengukuran manfaat dan dampak hasil kegiatan analisis mengingat output yang dihasilkan bukanlah berupa teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangibile*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil kegiatan analisis PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh

masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak baru terlihat setelah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Pelaporan rutin tahunan lainnya yang juga telah dilakukan dengan baik adalah Laporan Tahunan PSEKP tahun 2022 yang menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum, Kelompok Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta Kelompok Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Materi pokok yang disajikan dalam laporan tahunan tersebut meliputi organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, pendayagunaan hasil analisis dengan publikasi, dan kegiatan kerja sama, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, dalam Laporan Tahunan 2022 disajikan pula sinopsis hasil-hasil kegiatan analisis kebijakan yang telah dilakukan PSEKP selama tahun 2022.

7.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan analisis kebijakan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat netral. Selain kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan analisis kebijakan dan fungsional tertentu lainnya seperti fungsional statistisi, pranata komputer, serta lainnya, diperlukan juga dukungan pelayanan institusi secara keseluruhan. Keduanya diperlukan dalam satu kesatuan yang saling terkait secara fungsional sehingga dapat memperoleh keluaran (*output*) analisis kebijakan sesuai kebutuhan pengguna (*stakeholders*). Kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) sangat membantu dalam memberikan umpan balik (*feed back*) untuk menyempurnakan sistem yang ada menjadi lebih baik.

Kegiatan *monev* PSEKP selama tahun 2023 mencakup *monev* kegiatan analisis kebijakan dan *monev* kegiatan pendukung. *Monev* kegiatan analisis kebijakan dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan mulai dari: (1) tahap persiapan dengan materi meliputi: proposal/KAK operasional, juklak kegiatan analisis kebijakan, rencana laporan (*outline*), serta kuesioner (*outline* kuesioner data primer dan sekunder); (2) tahap pelaksanaan analisis kebijakan dengan materi meliputi: kuesioner, laporan perjalanan, *entry/input* data (baik data primer maupun sekunder); (3) tahap pengolahan data dan penulisan dengan materi meliputi pengolahan data, tabulasi, dan tabel analisis data primer dan sekunder, serta draft laporan; (4) seminar akhir berupa advokasi dan diseminasi hasil analisis kebijakan, dan laporan final. Sedangkan *monev* pelayanan dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan sebagai pendukung kegiatan analisis kebijakan, yang meliputi pelayanan keuangan, pengolahan data atau komputerisasi, perpustakaan, publikasi, kendaraan dan sarana kegiatan. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar hasil-hasil analisis kebijakan dapat berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna.

7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2023

Pelaksanaan kegiatan *Monev* penelitian lingkup PSEKP TA 2023 dilakukan oleh Manajemen yaitu Ketua Kelompok Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan

Kebijakan Pertanian, Ketua Kelompok Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bersama dengan Ketua dan anggota Tim Kerja Evaluasi Hasil Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tahun-tahun sebelumnya kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tetapi dengan adanya perubahan birokrasi dan masa transisi maka tahun 2023 tidak terlaksana. Tugas Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan mulai tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil analisis kebijakan menurut tahapan sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, dan (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau pada saat diperlukan serta mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi terfokus pada kegiatan analisis kebijakan mulai penyusunan proposal/KAK operasional hingga penyusunan laporan hasil. Sementara tahapan penjaringan judul analisis hingga tersusunnya proposal/KAK merupakan bagian tugas Tim Teknis. Sedangkan Tim Editor bertugas menangani *output* analisis kebijakan menjadi berbagai produk publikasi ilmiah yang ditujukan baik untuk *stakeholders* maupun pengguna lainnya.

Secara garis besar Tim Kerja Evaluasi telah melakukan kegiatan seperti: membantu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dukungan analisis kebijakan dan administrasi institusi, melaksanakan kegiatan seminar proposal berupa penajaman rumusan masalah kebijakan dan seminar akhir berupa advokasi dan diseminasi, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis kebijakan, laporan institusi, baik untuk keperluan Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian, dan Laporan Kinerja (LAKIN).

7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Analisis Kebijakan

Agar tercipta kesesuaian antara perencanaan (*input*), pelaksanaan analisis kebijakan dan pengolahan data/informasi (*proses*), serta pelaporan (*output*), maka perlu dirancang metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang baik agar tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat tercapai. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan analisis kebijakan PSEKP tahun 2023 menggunakan Draft Juklak Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian seperti Tahun 2022. Kegiatan monev pada tahun 2023 ini ditujukan terhadap 2 judul kegiatan analisis kebijakan periode satu tahun, 1 judul kegiatan koordinasi dan pendampingan kegiatan strategis Kementan, 11 judul kegiatan analisis kebijakan periode semester 1 dan 2,

serta 1 paket kegiatan analisis kebijakan responsif yang sumber dana berasal dari APBN (DIPA) TA 2023.

a. Monitoring dan Evaluasi Tahap Awal

Perencanaan merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim analisis kebijakan dan seluruh bidang pelayanan di lingkup PSEKP. Perencanaan yang dilakukan menyangkut tiga aspek, yaitu: (a) jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan, (b) susunan tim dan jadwal kegiatan, dan (c) rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap tim analisis kebijakan dan bidang pelayanan hendaknya menyusun perencanaan yang menyangkut ketiga aspek tersebut. Tujuannya adalah agar dapat dirancang sinkronisasi antara kegiatan analisis kebijakan dan kegiatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi.

Pada tahap awal, pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di lingkup PSEKP secara substantif meliputi dua kegiatan, yaitu: (a) menyusun proposal/KAK operasional yang merupakan acuan bagi seluruh rangkaian kegiatan analisis kebijakan, dan (b) mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan yang telah dirancang dalam proposal/KAK operasional, seperti petunjuk pelaksanaan (juklak), kuesioner, rencana kerangka laporan hasil (*outline*), dan penulisan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan tersebut memiliki peranan penting untuk menghasilkan analisis kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proposal/KAK yang disusun dengan baik menurut kaidah-kaidah ilmiah diharapkan dapat menghasilkan luaran kegiatan yang berkualitas. Oleh karena itu, proposal/KAK harus didukung dengan bahan dan perlengkapan yang memadai, seperti petunjuk pelaksanaan dan kuesioner sebagai pedoman pelaksanaan analisis kebijakan serta pengumpulan data primer dan data sekunder di lapangan. Kegiatan monitoring evaluasi pada tahap awal bertujuan untuk menyempurnakan bahan kelengkapan survei.

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi tahap awal pada tahun 2023 diawali dengan kegiatan seminar proposal/KAK operasional berupa penajaman rumusan rancangan kebijakan untuk mengevaluasi relevansi analisis kebijakan yang akan dilakukan dengan masalah pembangunan pertanian di tingkat nasional. Seminar proposal/KAK operasional kegiatan analisis kebijakan PSEKP TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Auditorium Dr. Ismunadji PSEKP dan *zoom meeting*. Jumlah proposal yang diseminarkan pada tahun 2023 sebanyak delapan judul yang sumber dananya berasal dari DIPA PSEKP. Kegiatan seminar proposal/KAK bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan serta sasaran kegiatan analisis kebijakan PSEKP pada TA 2023. Kegiatan seminar proposal/KAK operasional PSEKP DIPA TA 2023 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan lingkup

Kementerian Pertanian; seluruh manajemen, pejabat fungsional, dan pegawai PSEKP.

Dalam upaya mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan serta sasaran kegiatan hasil analisis kebijakan, diundang sebagai pembahas Prof. Dr. Achmad Suryana (Guru Besar UIKA Bogor), Dr. Abdul Basit (Perencana Ahli Utama Kementerian Pertanian), dan Dr. Muhrizal Sarwani (Analisis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Pertanian). Langkah ini ditempuh agar rencana kegiatan analisis kebijakan yang disusun dalam proposal/KAK operasional dapat dievaluasi secara obyektif oleh pihak lain, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan, serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Hasil seminar proposal/KAK ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka penajaman proposal operasional. Pelaksanaan seminar proposal /KAK TA 2023 seperti yang terlihat pada Gambar 14.



Gambar 16. Seminar proposal/KAK tim analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 21 Maret 2023

Berdasarkan hasil seminar proposal/KAK tersebut, selanjutnya Tim Analisis Kebijakan melakukan penyempurnaan proposal/KAK operasional. Kemudian dilakukan diskusi internal untuk mengevaluasi perbaikan proposal/KAK operasional sesuai dengan masukan dari hasil seminar yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi perbaikan proposal/KAK operasional tersebut selain mengacu hasil koreksi Tim Manajemen juga mengacu pada notulen seminar proposal/KAK. Langkah ini merupakan cara yang ditempuh dalam memantau dan mengevaluasi kesiapan tim untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal/KAK operasional. Tujuan diskusi tersebut adalah: (a) untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, (b) evaluasi materi dan penyempurnaan bahan pengumpulan data lapangan, baik data primer maupun data sekunder, dan (c) menciptakan sinkronisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh tim dengan bidang pelayanan terkait.

Dalam monitoring dan evaluasi internal tersebut dilihat pula aspek yang berkaitan dengan kelengkapan pelaksanaan kegiatan, yaitu: kesesuaian proposal/KAK operasional, petunjuk pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan (juklak), rencana kerangka laporan hasil dan kuesioner. Hasil penilaian kegiatan

monitoring dan evaluasi untuk masing-masing tim selanjutnya dimasukkan dalam tiga kategori penilaian, yaitu: (1) kategori I: tidak bermasalah, artinya jika ada perbaikan dapat dilakukan tanpa menghentikan kegiatan analisis kebijakan, (2) kategori II, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi, artinya tim harus melakukan perbaikan sebelum turun ke lapang, dan (3) kategori III, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi, setelah perbaikan tersebut disetujui oleh Kepala PSEKP maka Tim analisis kebijakan dapat melakukan kegiatan lapang.

b. Laporan Perjalanan

Pembuatan laporan perjalanan oleh tim analisis kebijakan bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapang agar dapat diantisipasi pemecahan masalahnya, (2) mendapatkan bahan perumusan kebijakan dari temuan dan isu-isu aktual hasil temuan di lapang, (3) tertib administrasi, dan (4) penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rincian obyek monitoring dan evaluasi untuk laporan perjalanan mencakup:

- (1) Perkembangan pengumpulan data (primer dan sekunder) sesuai dengan rencana yang dirumuskan dalam proposal/KAK.
- (2) Temuan dan isu aktual yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu tujuan monitoring dan evaluasi tahap ini adalah untuk memperoleh bahan *policy brief*.
- (3) Jadwal kegiatan. Pengecekan jadwal kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan rencana kegiatan selanjutnya.
- (4) Penyelesaian administrasi. Secara administratif, serapan dana harus seimbang dengan volume kegiatan analisis kebijakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu penyelesaian administrasi yang terkait dengan perjalanan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (5) Temuan masalah dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan. Dalam proses pengumpulan data di lapang kemungkinan akan ditemui berbagai masalah dan hambatan, oleh karena itu dengan kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat diupayakan solusi pemecahannya.

Laporan perjalanan dibuat sesuai dengan frekuensi perjalanan tim analisis kebijakan ke lapangan. Secara umum, seluruh tim pada tahun anggaran 2023 telah menyusun laporan perjalanan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain adalah: kurang terbukanya beberapa instansi serta responden tertentu, seperti pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, juga refocusing anggaran yang menghambat kegiatan analisis kebijakan ke lapangan.

c. Pengolahan Data

Monitoring dan evaluasi terhadap pengolahan data dilakukan untuk mengantisipasi masalah dalam pengolahan data serta meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengolahan dan analisis data. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan ini adalah target atau rencana penyelesaian dibanding tingkat pencapaian pada masing-masing tahap kegiatan. Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pada pengolahan data dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing tim. Untuk keteraturan pelaksanaan pengolahan data, telah dibuat aturan bahwa setiap tim yang akan berangkat ke lapangan (dimulai pada tahap II) harus sudah menyerahkan isian kuesioner dari survei tahap sebelumnya. Isian data dalam kuesioner harus sudah teredit dengan baik oleh Tim analisis kebijakan.

Data yang diolah dalam kegiatan pengolahan data ini meliputi data primer dan sekunder yang mendukung kegiatan analisis kebijakan. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara di lapang, baik di tingkat petani, kelompok tani, atau lembaga perdesaan lainnya, penggilingan padi, industri pengolahan hasil pertanian, pedagang, eksportir, dan lain-lain, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran data-data yang dipublikasikan oleh instansi terkait maupun melalui internet. Data primer yang diolah dari kuesioner jumlah dan ketebalannya bervariasi setiap tim. Jumlah kuesioner yang besar dari masing-masing tim membutuhkan pengaturan dalam pengerjaannya, terutama pada tahap *entry data* dan proses validasi data. Proses *input data* dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*), artinya tim yang menyerahkan kuesioner lebih dulu akan di-*entry* dan diolah lebih dulu, demikian seterusnya sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan data. Di samping itu dari pihak tim sendiri diharapkan kesadarannya untuk secepatnya menyerahkan kuesioner, data-data maupun informasi yang diperoleh dari lapang agar tidak terjadi penumpukan di bagian *entry data* dan pengolahan data, terutama pada tengah dan akhir tahun. Tahun 2023 ini hampir sebagian besar tim yang melakukan pengolahan data mandiri, kegiatan PATANAS yang dibantu tim pengolah data.

d. Monitoring dan Evaluasi Tahap Akhir

Kegiatan seminar PSEKP merupakan mata rantai penting dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tahap akhir untuk penyempurnaan hasil analisis kebijakan. Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kegiatan analisis kebijakan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 di Auditorium Ismunadji dan zoom meeting PSEKP, Bogor. Kegiatan seminar hasil tersebut bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan hasil kegiatan analisis kebijakan PSEKP untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pada TA 2023. Kegiatan seminar hasil analisis kebijakan PSEKP TA 2023 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian; Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian; dan instansi di

luar Kementerian Pertanian seperti BRIN, serta seluruh manajemen, pejabat fungsional, dan pegawai PSEKP (Gambar 15).

Kegiatan seminar hasil difokuskan kepada konsistensi antara judul, tujuan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Umpan balik yang diperoleh dalam seminar hasil tersebut digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan akhir kegiatan analisis kebijakan serta penyusunan *Policy Brief*.



Gambar 17. Kegiatan advokasi dan diseminasi hasil kajian analisis kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 19 Desember 2023

e. Draft Laporan Akhir Kajian

Penulisan draft laporan akhir analisis kebijakan merupakan salah satu tahap atau mata rantai penting dalam proses pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan. Pada tahapan ini, jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan atau hasil yang diperoleh tim dapat segera dilakukan koreksi atau penyesuaian. Indikator evaluasi terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) konsistensi proposal dengan laporan hasil analisis kebijakan, (2) koherensi pelaporan terkait kedalaman dan ketajaman hasil pembahasan, perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, (3) aspek editorial yang menyangkut redaksional, penyajian tabel, kelengkapan pustaka, dan (4) ketepatan waktu penyelesaian laporan dan konsistensi format serta isi laporan sesuai dengan Juklak Monev TA 2023.

Pada tahap penyusunan draft laporan akhir, ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu: (1) konsistensi antara proposal dan draft laporan hasil analisis kebijakan, (2) perlunya perbaikan dari segi koherensinya, dan (3) perlunya penyempurnaan dari sisi redaksional. Dari sisi substansi, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum Tim analisis kebijakan telah menyusun draft laporan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, konsistensi antara judul, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan secara umum telah tersusun dengan baik. Terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan akhir, secara umum sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Draft laporan hasil analisis kebijakan yang dievaluasi diharapkan sudah mengakomodir seluruh masukan dari seminar.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim melakukan perbaikan/revisi draft laporan akhir menjadi Laporan Akhir Analisis Kebijakan Tahun 2023. Pada setiap akhir tahun anggaran, Tim analisis kebijakan selain menyelesaikan laporan akhir, juga harus menyusun *Policy Brief* (dalam Bahasa Indonesia dan *optional* dalam Bahasa Inggris) dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan akhir perlu mendapatkan penekanan khusus karena merupakan produk akhir yang akan menjadi bahan referensi untuk kegiatan analisis kebijakan lanjutan atau kegiatan lain yang relevan. Dalam rangka diseminasi hasil analisis kebijakan terdapat sejumlah *output* yang perlu dikomunikasikan kepada *stakeholders* utama dan masyarakat pengguna iptek sosial ekonomi dalam arti luas. Bahan diseminasi tersebut meliputi bahan rapat pimpinan di tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian, materi untuk forum diskusi *ad hoc* di PSEKP, forum tingkat nasional, bahan publikasi/penerbitan ilmiah (baik terbitan PSEKP maupun di luar PSEKP) dan bahan laporan tahunan PSEKP TA 2023. Tim kajian wajib menyiapkan bahan diseminasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga pemerintah, PSEKP diharapkan mampu memberikan hasil-hasil analisis kebijakan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Pengguna hasil-hasil analisis kebijakan PSEKP secara umum adalah *stakeholders* pembangunan pertanian di tingkat pusat, daerah, dan akademisi. Mengingat hasil analisis kebijakan PSEKP sangat bermanfaat bagi *stakeholders*, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam kegiatan mendatang seyogyanya mengakomodasikan aspirasi para pengguna hasil analisis kebijakan PSEKP, terutama para *stakeholders* di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian masukan dan saran dari *stakeholders* tersebut akan lebih menyempurnakan kegiatan analisis kebijakan yang akan dilakukan.

Penyusunan *policy brief* otoritas penilaiannya berada di tangan struktural dengan finalisasi koreksi dan saran perbaikan dari Kepala PSEKP. Di sisi lain, otoritas penilaian bahan publikasi PSEKP dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Redaksi. Dengan mengacu pada prosedur tersebut, maka evaluasi terhadap bahan diseminasi dalam konteks pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dibatasi sampai pada penentuan status materi tersebut. Hal tersebut merupakan kewajiban dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka statusnya adalah apakah tim telah memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan materi diseminasi tersebut. Kalau persyaratan kelengkapan pengajuan ini belum dipenuhi, perlu dikemukakan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

Keluaran atau *output* kajian (data dan laporan) lingkup PSEKP telah didokumentasikan secara baik. Dokumentasi data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Dokumentasi yang terkait data primer meliputi: (1) kuesioner dan Buku Kode Variabel, dan (2) file data hasil *entry*. Dokumentasi yang terkait data sekunder meliputi: (1) dokumen asli, (2) dokumen olahan, dan (3) file data hasil pengolahan data. Secara umum hasil kegiatan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

Pertama, sintesis pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Hasil kegiatan ini digunakan untuk memberikan opsi rumusan kebijakan (sintesis), pemikiran akademis mengenai evaluasi kebijakan pembangunan pertanian (pertimbangan) dan memperjuangkan suatu kebijakan yang dianggap layak dan patut atau menolak kebijakan yang dianggap tidak layak dan tidak patut (advokasi). Sintesis kebijakan disampaikan langsung kepada pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, PSEKP juga memiliki media reguler Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian sebagai sarana penyuluhan, diseminasi dan diskusi kebijakan.

Kedua, rekayasa model inovatif kelembagaan pembangunan pertanian. Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antarmanusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Keberlanjutan sistem produksi dimungkinkan apabila inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dalam pembangunan pertanian, maka PSEKP memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek kelembagaan ini.

Ketiga, analisis deskriptif mengenai kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian yang meliputi: (1) ekonomi makro dan mikro serta perdagangan internasional, (2) pengelolaan sumber daya dan agribisnis berkelanjutan, (3) sistem inovasi teknologi pertanian, (4) ketahanan pangan dan kemiskinan, dan (5) dinamika sosial ekonomi perdesaan. Hasil kegiatan ini, berupa parameter mengenai perilaku ekonomi makro dan mikro untuk menunjang analisis maupun perumusan model kebijakan pembangunan pertanian. Parameter-parameter tersebut merupakan landasan untuk penyusunan model simulasi maupun analisis perumusan kebijakan. Hasil analisis deskripsi digunakan untuk menyusun *highlight* situasi terkini kinerja pembangunan pertanian dan lingkungan strategisnya. Laporan singkat ini dibuat dan disampaikan secara reguler kepada pimpinan Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan *well informed policy making*.

7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Kajian Analisis Kebijakan

Dalam melaksanakan fungsi kegiatan analisis kebijakannya, PSEKP didukung oleh beberapa bidang manajemen kegiatan, yaitu: aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana prasarana. Kelima bidang manajemen tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka mendukung kegiatan analisis kebijakan di PSEKP. Dengan demikian diharapkan keluaran yang dihasilkan dapat berdaya dan berhasil guna serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja manajemen kegiatan analisis kebijakan.

a. Pelayanan Keuangan

Untuk kelancaran administrasi keuangan, kegiatan analisis kebijakan perlu didukung pelayanan keuangan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah untuk meningkatkan ketepatan perencanaan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah DIPA yang dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sebelum pelaksanaan kegiatan ke lapang, kegiatan monitoring dan evaluasi juga melibatkan tim dengan pelaksana keuangan untuk penyesuaian jadwal keberangkatan dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan prosedur keuangan di lapang yang harus dilakukan oleh tim analisis kebijakan.

Indikator yang digunakan pada kegiatan ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan solusi pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan kinerja keuangan yang berhubungan dengan kegiatan analisis kebijakan, terlihat adanya kemudahan dalam pencairan dana. Hal ini tampak dalam pencairan dana relatif berjalan lancar. Di samping kegiatan ke lapang, pencairan dana untuk perjalanan dinas ke wilayah Jabodetabek untuk pengumpulan data sekunder dan informasi lainnya juga mengalami kemudahan.

b. Pelayanan Pengolahan Data

PSEKP dalam melaksanakan kegiatan analisis kebijakan didukung oleh pelayanan pengolahan data yang bertugas untuk menginput/*entry* data (primer dan sekunder) serta informasi yang diperoleh dari lapang serta mengolah data tersebut sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Indikator yang digunakan pada kegiatan monev layanan pengolahan data adalah: (1) sumber daya manusia (SDM), dan (2) *hardware*. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya manusia adalah: (1) jumlah orang, (2) pembagian kerja, dan (3) kompetensi. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi *hardware* adalah: (1) jumlah komputer tersedia, (2) kapasitas, dan (3) manajemen pemanfaatan *hardware*. Sedangkan indikator yang digunakan dalam jadwal kerja pengolahan data untuk setiap judul analisis kebijakan adalah: (1) perencanaan dan (2) pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data, bila dilihat dari sisi pengadaan sarana prasarana telah tersedia dengan baik, seperti: jumlah tenaga input data, validasi data dan pengolahan data, perangkat komputer, printer, serta sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana pengolahan data sudah cukup memadai. Unit pengolahan data, selain melakukan kegiatan pengolahan data hasil analisis kebijakan, juga melakukan kegiatan database PSEKP, seperti *entry* data, *updating* data, dan melayani permintaan data sekunder untuk para analis kebijakan dan *stakeholders*. Mengingat banyaknya kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan waktu sedemikian rupa sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Kondisi pada tahun 2023 tidak semua tim melakukan *entry* dan pengolahan data di layanan pengolahan data. Tim melakukan kegiatan *entry* dan pengolahan data sendiri.

c. Database

Seiring dengan perkembangan teknologi, data dan informasi untuk bahan analisis kebijakan sebagian diperoleh dari *database* yang dimiliki PSEKP. Data dan informasi selain dimanfaatkan untuk analisis/kajian perumusan kebijakan, juga diperlukan dalam menunjang implementasi kebijakan, monitoring, maupun evaluasi. Suatu rekomendasi kebijakan yang baik harus memenuhi syarat: tepat dalam memahami permasalahan, tepat dalam perumusan tujuan, konsisten dengan Haluan Negara, antisipatif terhadap dinamika empiris, dan realistis (dalam arti dapat diimplementasikan), berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pembangunan. Syarat-syarat seperti itu dapat dipenuhi hanya jika rekomendasi kebijakan dihasilkan dari suatu kegiatan, analisis, ataupun studi yang relevan dan berlandaskan prinsip-prinsip kegiatan ilmiah.

Dalam kegiatan ilmiah, peranan data sangat strategis. Bahkan pada hakekatnya nilai hasil kegiatan ilmiah sangat ditentukan oleh data dan informasi yang menjadi bahan analisisnya. Guna memenuhi kebutuhan terhadap data yang berkualitas dan dengan cepat dapat diperoleh, maka manajemen data merupakan salah satu aktivitas pokok dari suatu lembaga/instansi. Manajemen data yang baik bukan hanya membantu terciptanya pelaksanaan kajian yang baik tetapi juga mempermudah sistem verifikasi data dan informasi antar lembaga terkait.

Output yang dihasilkan oleh suatu lembaga yang terlibat dalam kegiatan analisis adalah data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rekomendasi kebijakan. Oleh karena sifatnya untuk mendukung pemecahan masalah, maka hampir semua kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan *output* tersebut adalah kegiatan terapan. Sebagai pengguna utama, maka *stakeholder* terpenting adalah pemerintah. Meskipun demikian, *user* lain juga sangat banyak, misalnya para peneliti, mahasiswa, petani, peternak, wartawan, dan lain sebagainya. Sejak beberapa tahun yang lalu, PSEKP telah melakukan aktivitas manajemen data. Dalam kegiatan ini, tercakup tiga aspek: (a) pengembangan sistem informasi *database*, (b) pengembangan kapabilitas programmer dan analis, (c) pengembangan infrastruktur pendukung. Ketiga aspek itu mutlak dibutuhkan dalam mewujudkan sistem data yang berdaya guna.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan *database* tahun 2023 hasilnya cukup banyak dan bervariasi, yaitu dari membangun sistem informasi database, *updating* (pemutakhiran) data, *entry* data pada pengadaan data yang sudah dikelola oleh lembaga lain, seperti BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Bulog, FAO dan sebagainya. Data-data yang diperoleh selanjutnya dilakukan *editing* dan validasi agar data yang ditampilkan sesuai dengan sumbernya dan siap saji. Kegiatan *database* tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kegiatan *database* yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, kegiatan *database* melakukan pemutakhiran data, penambahan jenis/subyek data yang dimasukkan ke dalam *database* PSEKP, serta

melakukan penyusunan format *database* masih dalam bentuk *long-format* agar lebih memudahkan pengguna untuk pengambilan data dalam *database*. Dengan penyusunan format *database* dalam bentuk *long-format*, pemutakhiran dan perluasan jenis/subyek data yang dimasukkan ke dalam *database*; diharapkan pelaksanaan kegiatan kajian analisis kebijakan dapat didukung oleh *database* PSEKP. Data yang ditampilkan dalam *database* secara umum adalah series hingga tahun 2023, namun ada beberapa jenis data yang belum sampai ke data terkini (*current data*). Hal ini disebabkan beberapa kendala, seperti publikasi dari instansi terkait belum keluar, perubahan format tabel/jenis data yang ditampilkan oleh instansi terkait, dan sebagainya. Namun demikian, ke depan Tim Database akan terus melakukan pemutakhiran/*updating* data serta perluasan jenis data baru yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penelitian PSEKP. Tim Database juga pada tahun 2023 membangun aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) Database agar *user* dapat mencari sendiri data yang diperlukan.

Tim database juga mengumpulkan data Sakernas tahun 2020 dan data Podes tahun 2020 mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan; perumahan dan lingkungan hidup; bencana alam dan mitigasi bencana alam; pendidikan dan kesehatan; sosial budaya; hiburan dan olah raga; angkutan; komunikasi dan informasi; penggunaan lahan; ekonomi; keamanan; program pemberdayaan masyarakat; otonomi; serta keterangan aparaturnya pemerintah desa/kelurahan. Data-data tersebut disajikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta kelurahan/desa; sehingga memungkinkan keterbandingan antar wilayah. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna data akan data-data sosial ekonomi.

Selain cakupan data sekunder, sejak tahun 2012 kegiatan database PSEKP mulai dilakukan inisiasi untuk menyusun data primer yang berasal dari hasil survei lapang kegiatan analisis kebijakan di lingkup PSEKP, di antaranya adalah kegiatan PATANAS dan kegiatan lainnya. Namun karena refocusing anggaran, beberapa kegiatan analisis kebijakan terkendala sehingga yang menggunakan data primer tidak banyak, dan sebagian besar mengolah dari data sekunder. Sehubungan dengan itu kegiatan penyusunan data primer ini dilanjutkan walaupun relatif terbatas, dengan demikian Tim Database lebih banyak mengolah data sekunder sesuai kebutuhan tim masing-masing (di luar kegiatan utama Tim Database).

7.3.3. Evaluasi Layanan Perpustakaan

Evaluasi layanan perpustakaan ditujukan untuk menyelidiki, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas berbagai aspek layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Evaluasi layanan perpustakaan menjadi langkah kritis dalam memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada penggunanya.

Evaluasi layanan Perpustakaan PSEKP menggunakan 5 (lima) indikator sebagai dasar penilaiannya. Yaitu, bukti fisik (*tangibles*), kehandalan (*reliability*),

daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati. Evaluasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 54 orang pengguna melalui *google form* dan menggunakan perhitungan dengan metode skala likert 1-5.

Pada indikator bukti fisik (*tangibles*), komponen yang diukur meliputi kebersihan ruang perpustakaan; pencahayaan ruang perpustakaan; sirkulasi udara ruang perpustakaan; kelengkapan fasilitas ruang perpustakaan (AC, kursi, meja, loker, akses, internet, computer, dll); tersedia alat bantu penelusuran koleksi buku maupun indeks artikel jurnal/majalah; desain ruangan perpustakaan sebagai tempat diskusi yang menarik minat pemustaka; kondisi fisik ruangan perpustakaan yang nyaman; dan kondisi peralatan serta perlengkapan yang cukup memadai dan berfungsi baik. Nilai skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 4,45.

Pada indikator bukti fisik (*tangibles*), komponen yang diukur meliputi kebersihan ruang perpustakaan; pencahayaan ruang perpustakaan; sirkulasi udara ruang perpustakaan; kelengkapan fasilitas ruang perpustakaan (AC, kursi, meja, loker, akses, internet, computer, dll); tersedia alat bantu penelusuran koleksi buku maupun indeks artikel jurnal/majalah; desain ruangan perpustakaan sebagai tempat diskusi yang menarik minat pemustaka; kondisi fisik ruangan perpustakaan yang nyaman; serta kondisi peralatan serta perlengkapan yang cukup memadai dan berfungsi baik. Nilai skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 4,45.

Pada indikator kehandalan (*reability*), komponen yang diukur meliputi ketersediaan koleksi buku dan materi lainnya yang lengkap, relevan, dan terkini; ketersediaan sumber daya referensi seperti ensiklopedia, kamus, dan sebagainya; konsistensi kualitas layanan perpustakaan dari waktu ke waktu; konsistensi dalam menyediakan informasi yang akurat kepada pengguna perpustakaan; ketersediaan dan kualitas akses ke sumber daya digital seperti basis data, e-journal, dan e-book; kemudahan navigasi dan ketersediaan informasi yang relevan di situs web perpustakaan; serta pustakawan dan pengelola perpustakaan dapat dipercaya karena memiliki pengetahuan dalam bidangnya. Nilai skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 4,41.

Pada indikator daya tanggap (*responsiveness*), komponen yang diukur meliputi kecepatan respon petugas dalam menanggapi/memenuhi permintaan pengunjung; ketepatan waktu layanan dalam memberikan/memenuhi permintaan pengunjung; ketanggapan petugas dalam melayani pengunjung; kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan; perpustakaan menanggapi dan menyelesaikan keluhan pengunjung; petugas perpustakaan selalu tanggap memberikan bantuan dalam mencari informasi yang diperlukan; kemampuan petugas perpustakaan dalam berkomunikasi dengan jelas dan efektif; serta adanya mekanisme untuk menerima umpan balik dan saran dari pengunjung. Nilai skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 4,45.

Pada indikator jaminan (*assurance*), komponen yang diukur meliputi kompetensi petugas perpustakaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas; keakuratan dan keterpercayaan informasi yang diberikan oleh staf perpustakaan; perpustakaan berupaya memastikan kualitas dan keaktualan koleksi; jaminan bahwa sumber daya digital dapat diakses dengan mudah dan aman; serta ketersediaan informasi yang cukup dan jelas kepada pengunjung mengenai layanan dan fasilitas perpustakaan. Nilai skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 4,42.

Pada indikator empati, komponen yang diukur meliputi keterampilan petugas perpustakaan dalam mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap pertanyaan atau masalah pengunjung; keterampilan petugas perpustakaan dalam menanggapi keluhan atau masalah pengunjung dengan sikap peduli dan memahami; keterampilan petugas perpustakaan dalam membantu pengunjung untuk mencari informasi dengan penuh perhatian; serta keterampilan petugas perpustakaan dalam memberikan bimbingan atau panduan dengan sikap yang ramah dan empatik. Nilai skor rata-rata yang diperoleh pada indikator ini adalah 4,39.

7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publikasi, indikator yang digunakan dalam evaluasi ini adalah: (1) perencanaan, yang terdiri dari rencana penerbitan, rencana distribusi, dan jadwal, (2) distribusi, yang terdiri dari lingkup PSEKP, Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi, dan lainnya. Indikator perencanaan dan pelaksanaan yang dimaksud dalam konteks ini ditekankan pada penerbitan dan distribusi dari masing-masing penerbitan yang dilakukan PSEKP.

Salah satu tugas PSEKP adalah mengomunikasikan hasil-hasil kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dalam pelaksanaannya dapat berupa publikasi. Beberapa publikasi yang diterbitkan oleh PSEKP adalah: (1) Jurnal Agro Ekonomi (JAE), (2) Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), (3) Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), (4) Prosiding hasil seminar, (5) Buku tematik, (6) Laporan tahunan, (7) *Newsletters*, dan (8) Laporan hasil analisis kebijakan.

Berbagai macam media publikasi tersebut disediakan oleh PSEKP dan digunakan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan SDM dalam mempublikasikan tulisan atau makalahnya. Jurnal Agro Ekonomi merupakan media ilmiah penyebaran hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian untuk menunjang pengembangan dan penelitian di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi memuat hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan profesionalisme para ahli sosial ekonomi pertanian dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pertanian, pangan, sumber daya, dan pembangunan ekonomi. Dalam JAE, kekuatan metodologi penelitian sangat diperhatikan, jurnal ini diterbitkan dua kali setahun. Forum Penelitian Agro Ekonomi adalah media ilmiah komunikasi hasil penelitian yang berisi *review* hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di

Indonesia, memuat “*critical review*” hasil-hasil penelitian para peneliti. Jurnal FAE juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan atau konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi pertanian, diterbitkan dua kali setahun. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian adalah media ilmiah yang membahas isu aktual kebijakan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan pertanian dalam bentuk gagasan, dialog, dan polemik, diterbitkan dua kali dalam setahun.

Adanya berbagai media penerbitan ilmiah di PSEKP, maka SDM PSEKP dapat menyalurkan ide, pemikiran, dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan sosial ekonomi pertanian dengan baik. Bagi SDM yang kreatif akan semakin mudah dalam meningkatkan jenjang fungsionalnya. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa ketersediaan media yang cukup banyak tersebut sangat membantu SDM dalam meningkatkan dan memelihara jabatan fungsionalnya. Salah satu yang mungkin perlu mendapat perhatian manajemen adalah ketepatan waktu penerbitan yang masih belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan perubahan birokrasi organisasi, dimana PSEKP saat ini bukan merupakan lembaga penelitian, maka keberadaan JAE dan FAE perlu didiskusikan lebih lanjut apakah akan tetap dipertahankan atau diserahkan ke BRIN mengingat saat ini sebagian besar peneliti PSEKP sudah beralih ke BRIN. BRIN hingga tahun 2023 belum dapat melanjutkan pengelolaan JAE dan FAE sehingga diijak pengalihan jurnal tersebut ke Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI).

Website dan Internet

Sebagai unit kerja yang khusus menangani kegiatan analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian di Kementerian Pertanian, PSEKP telah lama membina hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seringkali institusi dalam dan luar negeri membutuhkan data dan informasi hasil kegiatan PSEKP. Sebagai institusi publik, maka sudah selayaknya jika PSEKP memiliki sarana untuk dapat menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Pelayanan publikasi PSEKP juga telah membangun situs atau website sendiri dengan alamat: <http://www.psekp.setjen.pertanian.go.id> untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan melalui diskusi dengan publik. Website ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun *stakeholders* yang membutuhkan data dan informasi mengenai kegiatan PSEKP dan layanan perpustakaan selama 24 jam penuh. Situs atau website tersebut juga menjadi sarana komunikasi hubungan kerja antara PSEKP dengan institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini sedang dibuat tampilan baru untuk lebih memberikan kenyamanan dan kecepatan pengguna dalam mengakses situs PSEKP tersebut.

Juga telah dibangun perpustakaan digital, namun hanya dapat diakses dalam lingkungan kantor PSEKP melalui jaringan internet dengan alamat <http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~psekp/>. Selain itu, sedang disusun program

informasi opini yang dirancang untuk memberikan pandangan atau tanggapan terhadap masalah pembangunan pertanian terkini. Berita dan kegiatan PSEKP maupun Kementan juga dapat disebarluaskan melalui media sosial yang dikelola PSEKP yaitu facebook, twitter, instagram, dan youtube.

Selain website, PSEKP telah membangun jaringan internet di seluruh area kantor baik gedung A, B, maupun Auditorium Dr. Ismunadji. Layanan informasi tersebut dilakukan dengan pemasangan Access point Ruiji dan dilakukan manage service oleh CBN. Instalasi ini memiliki 2 unit switch yang masing-masing memiliki 24 port sehingga maksimal CPU yang dapat dijadikan jaringan adalah 48 unit terminal yang tersebar di seluruh gedung, mulai dari Gedung A di depan dan Gedung B di belakang. PSEKP juga telah menambah jalur backup fibre optic 2 jalur yang menjamin jaringan LAN tetap beroperasi jika salah satu jalur mengalami gangguan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Hal ini dapat dilakukan karena 2 jalur backup ini menggunakan 2 terminal box yang berbeda sehingga meningkatkan ketersediaan penggunaan jaringan yang maksimal.

Selain jalur backup, untuk peningkatan keamanan telah ditambahkan juga 1 unit sistem keamanan akses menggunakan switch firewall yang mampu melakukan filterisasi malware atau virus yang kemungkinan akan memasuki/menyerang jaringan LAN PSEKP. Pembangunan jaringan internet ini dimaksudkan agar para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai dapat mengakses perkembangan informasi secara cepat dan murah. Selain itu, adanya jaringan internet ini akan mempermudah analisis kebijakan dalam mengakses data dari berbagai institusi di seluruh dunia. Dengan demikian diharapkan kegiatan kajian analisis kebijakan sosial ekonomi pertanian dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

7.3.5. Sarana Kajian Analisis Kebijakan

Indikator yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan sarana kegiatan analisis kebijakan adalah: (1) rencana pengadaan dan (2) realisasi pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis, dan jumlah. Kedua indikator tersebut juga akan dilihat jika terdapat permasalahan yang dijumpai oleh pelayanan kegiatan dan cara pemecahan masalah.

Sarana kegiatan analisis kebijakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah sarana alat tulis kantor (ATK) terdiri dari tonner, tinta printer, kertas, *flash disk*, dan lainnya. Setiap tim dapat mengajukan kebutuhan ATK sesuai keperluan untuk pelaksanaan kajian baik menjelang survei maupun saat kegiatan di kantor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan, SDM telah dilengkapi fasilitas komputer dan jaringan internet yang tersedia di setiap ruangan. Telepon penghubung antarruangan sehingga memudahkan komunikasi antarpegawai, baik di dalam kantor maupun menerima telpon dari luar kantor disediakan untuk kelancaran komunikasi internal kantor. Setiap ruangan telah dilengkapi dengan fasilitas *air condition* (AC) untuk kenyamanan kerja. Ruang rapat yang lengkap dengan fasilitas yang memadai juga sudah tersedia.

VIII. PENUTUP

Laporan Tahunan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi sepanjang tahun 2023 mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan telah selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Renstra periode 2020-2024. Jumlah SDM saat ini ada 69 orang yang mendukung kinerja organisasi. Kegiatan layanan teknis diisi dengan kegiatan magang yang mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Universitas Lampung. Pelaksanaan pendampingan magang yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari pihak universitas.

Produk yang dihasilkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2023 berupa 14 rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam bentuk *policy brief* dan telaahan staf kepada pimpinan Kementerian Pertanian melalui Sekretaris Jenderal dan *stakeholder* lainnya mendapat respon positif. Selain itu ada kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak donor dari ACIAR dan IFPRI, serta kegiatan swakelola dari BPDPKS untuk percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Hasil-hasil kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian didiseminasikan dalam bentuk jurnal, buku tematik, *news letter*, disebarikan melalui medsos dan website. Kinerja SDM juga didukung manajemen dengan fasilitasi perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mendapat apresiasi sebagai salah satu perpustakaan terbaik dan terakreditasi nasional.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan anggaran yang berasal dari APBN dan dana hibah. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp18.751.539.000,00. Jumlah pagu DIPA PSEKP tahun 2023 tersebut mengalami revisi dengan adanya penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp1.764.669.000,00. Perkembangan pelaksanaan keuangan periode 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp17.583.425.940,00 (93,77%), dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2023 adalah Rp1.168.113.060,00 (6,23%).

Pelaksanaan kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selama tahun 2023 tidak luput dari berbagai permasalahan dan tantangan, tetapi hal ini tidak menjadi penghalang untuk menghasilkan kinerja terbaik. Kerja sama dan kolaborasi kegiatan yang akan dilakukan dengan pihak lain akan mendorong pelaksanaan kegiatan kedepan semakin maju, mandiri, dan modern.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengadaan bahan pustaka TA 2023

No.	Uraian	Jumlah (eksp.)
1.	Bunga Rampai Rantai Pasok Pertanian, Speciality Kopi Indonesia di Pasar Global	1
2.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2021 (Buku 1, 2 dan 3)	1
3.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2022 (Buku 1, 2 dan 3)	1
4.	Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Februari 2022	1
5.	Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2022	1
6.	Keadaan Pekerja di Indonesia, Februari 2022	1
7.	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Februari 2022	1
8.	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Agustus 2022	1
9.	Indikator Ekonomi 2022 (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2021)	7
10.	Statistik Pendapatan Agustus 2022	1
11.	Neraca Arus Dana Indonesia Triwulanan 2019-2022:2	1
12.	Neraca Pemerintah Umum Indonesia 2016-2021	1
13.	Statistik Indonesia 2023	2
14.	Pangan Berdaulat, Generasi Sehat, Bangsa Bermartabat	1
15.	Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pertanian: Karakteristik dan Penanggulangannya	1
16.	Ragam Topik dalam Kajian Ekonomi Pertanian dan Agribisnis: Teori dan Praktik Analisis Data	1
17.	Keong Mas Hama Padi Tantangan Dan Peluang	1
18.	Bioteknologi Industri Susu	1
19.	Metode dan Aplikasi Perhitungan: Pemanfaatan Data Sekunder di Bidang Ekonomi Pertanian dan Agribisnis	1
20.	Pemikiran Guru Besar Universitas Gadjah Mada Menuju Indonesia Maju 2045: Bidang Agro	1
21.	Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Rawa: Kearifan Kebijakan dan Keberlanjutan	1
22.	Trivia Rawa: Serba Serbi Sumber Daya Lahan Rawa	1
23.	Erosi Dan Konservasi Lahan	1
24.	Analisis Pangan	1
25.	Kebakaran Lahan Gambut: Dari Asap Sampai Kanalisasi	1
26.	Dinamika Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia	1
27.	Aspek Dasar Agronomi Berkelanjutan	1

No.	Uraian	Jumlah (eksp.)
28.	Debat Gambut	1
29.	Sistem Pertanian Terpadu: Pengukuran Potensi Sumber Daya & Ekonomi Pada Ruminansia Kecil	1
30.	Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan	1
31.	Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan	1
32.	Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian	1
33.	Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional	1
34.	Petunjuk Praktis Menulis Buku	1
35.	Fisiologi Pascapanen Buah dan Sayur	1
36.	Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian	1
37.	Karakteristik dan Keragaman Genetik Ayam Lokal Indonesia	1
38.	Manajemen Agribisnis Kelapa Sawit	1
39.	Pengantar Ilmu Pertanian	1
40.	Artificial Intelligence and Smart Agriculture Applications	1
41.	The Digital Age in Agriculture	1
42.	Engendering Agricultural Development	1
43.	Internet Of Things (IoT) Enabled Automation in Agriculture	1
44.	Internet Of Things for Agriculture 4,0	1
45.	Sustainable Agriculture for Food Security	1
	Total	52

